

Katalog: 9102062.73



**ANALISIS
HASIL SE2016
LANJUTAN**

POTENSI PENINGKATAN KINERJA USAHA MIKRO KECIL PROVINSI SULAWESI SELATAN



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Analisis Hasil SE2016 Lanjutan Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil

ISBN : 978-602-6426-86-4
No. Publikasi : 73550.1914
No. Katalog : 9102062.73
Jumlah Halaman : viii + 118 Halaman

Naskah:

Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor

Gambar Kulit:

Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Dicetak oleh:

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Tim Penyusun

Pengarah

Yos Rusdiansyah

Penanggung Jawab

Didik Nursetyohadi

Editor

Joko Siswanto

Penulis

Wuri Wahyuni

Desain Cover dan Layout

Muhammad Ilham Mubarak

<https://sulsel.id>

Kata Pengantar



Sensus Ekonomi yang digelar setiap 10 tahun sekali, memberikan gambaran perekonomian suatu wilayah secara terperinci. Data yang diperoleh dari hasil Sensus Ekonomi dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis dan perumusan kebijakan.

Pada Tahun 2016, BPS telah melaksanakan kegiatan pendataan lengkap atau listing Sensus Ekonomi Tahun 2016 (SE2016). Berikutnya, pada Tahun 2017 dilakukan SE2016 lanjutan untuk memperoleh gambaran lebih rinci aktivitas ekonomi. Responden pendataan SE2016 lanjutan adalah Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB).

Publikasi **Analisis SE2016-Lanjutan Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil Provinsi Sulawesi Selatan** merupakan analisis terhadap hasil pencacahan SE2016 lanjutan di Sulawesi Selatan. Tujuan dari penyusunan publikasi ini adalah menyediakan gambaran kualitas dan kuantitas UMK di Sulawesi Selatan. Publikasi ini juga menyediakan gambaran kinerja usaha dan determinannya yang ditinjau dari profitabilitas, dan menganalisis prospek usaha berdasarkan persepsi responden dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian informasi potensi yang masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja UMK dapat diperoleh. Besar harapan kami, hasil dari kajian ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi masyarakat luas serta para pengambil kebijakan.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran bagi penyempurnaan publikasi ini sangat berarti bagi penyempurnaan publikasi ini.

Makassar, Maret 2019
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Selatan

Yos Rusdiansyah

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB 1	1
UMK Sebagai Motor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi	
A. Kondisi Kinerja Usaha Mikro Kecil (UMK)	3
B. Dominasi UMK Sebagai Penggerak Perekonomian Sulawesi Selatan	5
C. UMK Sebagai Penyerap Tenaga Kerja Terbanyak	6
D. Bentuk Aktivitas UMK di Sulawesi Selatan	9
BAB 2	13
Bagaimana dan Siapa UMK di Indonesia	
A. Penggunaan Teknologi pada Pengelolaan UMK	15
B. Kualitas Pelaku UMK	17
C. Pembinaan UMK Harus Menjadi Prioritas	18
D. Pelaku UMK Masih Memerlukan Peningkatan Kualitas	20
BAB 3	23
Aksesibilitas Permodalan UMK	
A. Permodalan Merupakan Kendala Utama UMK di Sulawesi Selatan	26
B. Probabilitas UMK Mendapatkan Akses Permodalan dari Lembaga Keuangan	31
1. Faktor-Faktor yang Mendukung Pembiayaan Usaha Mikro Kecil	31
2. Probabilitas Peningkatan Aksesibilitas UMK di Sulawesi Selatan terhadap lembaga Keuangan	34
BAB 4	39
Kinerja Usaha dari Sisi Keuangan	
A. Kondisi UMK Menurut Laba yang Diperoleh	41
B. Kinerja UMK Menurut Rasio Pengeluaran terhadap Pendapatan	43
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laba UMK	45

BAB 5	49
Prospek dan Kendala Usaha	
A. Prospek UMK Semakin Baik	51
B. Permodalan dan Adanya Pesaing Menjadi Kendala Utama UMK dalam Mengembangkan Bisnis	54
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi UMK Lebih Prospektif	55
BAB 6	59
Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan	
A. Kesimpulan	61
B. Rekomendasi Kebijakan	63
Lampiran	65



BAB

1

**UMK SEBAGAI MOTOR
PENGGERAK
PERTUMBUHAN
EKONOMI**

UMK Sebagai Motor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi

A. Kondisi Kinerja Usaha Mikro Kecil

Sektor ekonomi Indonesia, khususnya dunia usaha masih didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK). Tak terkecuali Sulawesi Selatan. Dari hasil SE2016 Lanjutan, jumlah usaha ini hampir mencapai 915 ribu usaha atau 98,90 persen dari total usaha nonpertanian di Sulawesi Selatan. Usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja hampir 2,1 juta orang atau sekitar 85,29 persen dari total tenaga kerja non pertanian. Ketika krisis menerpa Indonesia pada sekitar tahun 1997-1998, UMK terbukti tetap berdiri kokoh di saat usaha-usaha besar lainnya berjatuh. Keunggulan UMK dalam bertahan dari badai krisis diungkapkan oleh CIDES (*Center for Information and Development Studies*) dalam artikel “Dampak Kenaikan Harga BBM pada sektor UKM di Indonesia” (Meryana, 2012).

Menurut CIDES terdapat tiga keunggulan UMK. Pertama, umumnya UMK menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga dialami oleh Jepang pasca luluh lantak oleh bom atom pada Perang Dunia II, sektor riil yang digerakkan oleh usaha kecil dan menengah tetap berdiri kokoh. Kedua, UMK tidak mengandalkan bahan baku impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal baik dari sisi sumber daya manusia, modal, bahan baku, maupun peralatannya. Ketiga, bisnis UMK menggunakan modal sendiri atau tidak ditopang pinjaman dari bank. Dengan keunggulan tersebut, UMK mampu bertahan ditengah krisis ekonomi yang menghantam Indonesia pada tahun 1997 atau pada tahun-tahun berikutnya yang biasanya ditandai dengan penurunan nilai tukar rupiah yang dalam (Tambunan 2005). Pengaruh krisis ini tidak dirasakan UMK lebih jauh dibandingkan UMB (Usaha Menengah Besar) karena minimnya interaksi dengan mata uang asing.

Meskipun mempunyai beberapa keunggulan, UMK mempunyai banyak keterbatasan. Keterbatasan ini membuat UMK sulit untuk berkembang dan mempunyai daya saing. LPPI dan BI (2015) menjabarkan keterbatasan-keterbatasan tersebut diantaranya

Hasil SE2016 Lanjutan, jumlah usaha ini hampir mencapai 915 ribu usaha atau 98,90 persen dari total usaha nonpertanian di Sulawesi Selatan. Usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja hampir 2,1 juta orang atau sekitar 85,29 persen dari total tenaga kerja non pertanian. Ketika krisis menerpa Indonesia pada sekitar tahun 1997-1998, UMK terbukti tetap berdiri kokoh di saat usaha-usaha besar lainnya berjatuh.

minimnya akses perbankan; kemampuan dan pengetahuan SDM yang masih rendah sehingga dikelola dengan cara yang sederhana; penggunaan teknologi yang terbatas; dan belum mampu mengimbangi perubahan selera konsumen khususnya yang berorientasi ekspor. Suryanto dan Muhyi (2017) memperkuat pendapat LPPI dan BI, jika UMK mempunyai beberapa permasalahan antara lain terbatasnya jiwa kewirausahaan pengusahanya, rendahnya kompetensi sumberdaya manusia, terbatasnya akses ke lembaga permodalan, dan kurang adanya bimbingan. Tambunan (2009) juga menambahkan jika mayoritas UMK tidak teregistrasi sehingga tidak mempunyai akses terhadap pajak maupun program-program pemerintah. Berbagai keterbatasan tersebut tentunya akan menghambat kinerja UMK di Indonesia yang perannya sangat nyata bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi penduduk yang berskala ekonomi menengah ke bawah.

Lebih dari 56 persen UMK Sulawesi Selatan adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor. Belum menyebarnya usaha di sektor lainnya juga menjadi tantangan dan peluang bagi masyarakat Sulawesi Selatan untuk bergerak merambah ke sektor-sektor lainnya.

Mengingat pentingnya peran UMK dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia, hendaknya kendala dan keterbatasan tersebut tidak menyurutkan pelaku UMK untuk mengembangkan usaha dan bisnisnya. Peluang untuk mengembangkan bisnis UMK terbuka lebar jika pelaku UMK mampu membaca situasi pasar yang ada. UMK mempunyai peran yang penting khususnya pada usaha-

usaha yang memanfaatkan sumberdaya alam maupun padat tenaga kerja. Usaha tersebut umumnya tercakup pada Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan, serta Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Menurut LPPI dan BI (2015) sumbangan kedua sektor ini dalam nilai tambah UMK sebesar 77,68 persen. Namun demikian, sektor-sektor lainnya juga mampu menyumbang sektor yang tidak sedikit pada perekonomian UMK.

Untuk melihat potensi dan kinerja UMK saat ini, serta untuk melihat prospeknya di masa mendatang, perlu melakukan analisis kinerja UMK. Hal ini juga bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dilakukan melalui pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, kajian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai UMK secara menyeluruh serta prospek pengembangannya. Informasi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pemerintah untuk membantu pengembangan UMK baik melalui pembinaan maupun penyusunan regulasi yang melindungi dan meningkatkan kinerja UMK. Dengan demikian, peran UMK dalam kegiatan ekonomi lokal semakin kuat, lapangan pekerjaan pun makin meningkat.

Untuk meningkatkan kinerja UMK, diperlukan kajian yang bisa diperoleh dari hasil pendataan SE2016-Lanjutan yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran mengenai karakteristik/kualitas sumber daya manusia pada UMK.
2. Memberikan gambaran mengenai kondisi aksesibilitas permodalan dan

- faktor yang mempengaruhi kemudahan dalam mengakses permodalan.
3. Memberikan gambaran kondisi UMK kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
 4. Memberikan gambaran mengenai kinerja usaha dan determinannya yang ditinjau dari profitabilitas;
 5. Menganalisis prospek usaha berdasarkan pengakuan responden dan faktor-faktor yang memengaruhinya.
 6. Menganalisis potensi yang masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja UMK.

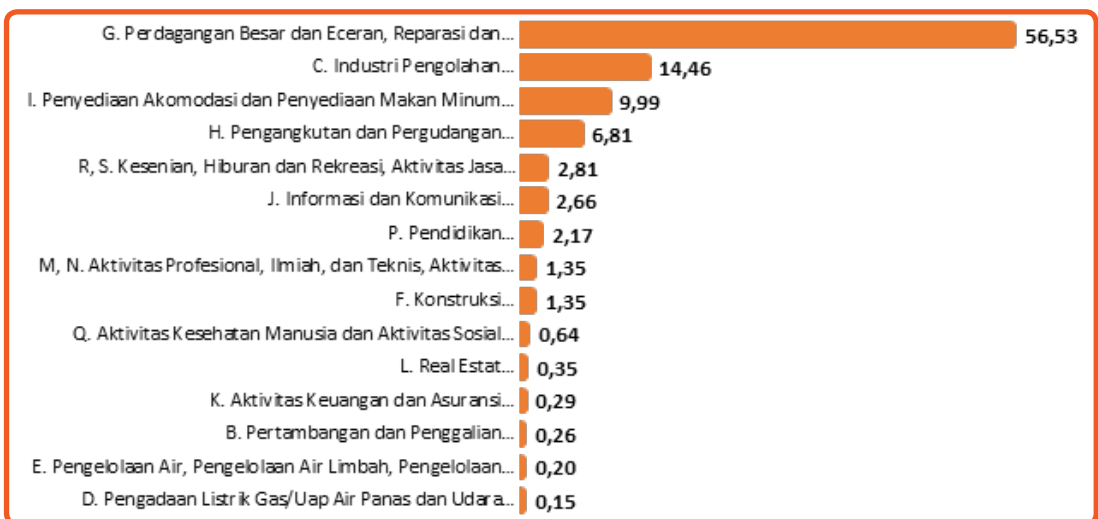
B. Dominasi UMK sebagai Penggerak Perekonomian Sulawesi Selatan

Potensi UMK yang besar patut diperhitungkan. Jumlah UMK tersebar pada semua kategori nonpertanian. Pelaku UMK paling banyak berusaha pada Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G). Jumlah usaha pada sektor ini mendominasi jumlah UMK dengan capaian diatas 56 persen. Diikuti dengan Industri Pengolahan (Kategori C) dan usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) dengan kontribusi masing-masing 14,46 persen dan 9,99 persen (Gambar 1.1).

Sebagai ibukota provinsi, Kota Makassar

menjadi pusat pergerakan ekonomi di Sulawesi Selatan. Lebih dari 34 persen perekonomian Sulawesi Selatan tergantung pada ekonomi Kota Makassar (PDRB 2017) Sebagai usaha yang sebagian besar digerakkan oleh penduduk kelas menengah ke bawah, sebaran jumlah UMK juga mengikuti sebaran jumlah penduduk. Dengan jumlah penduduk lebih dari 17 persen dari total penduduk Sulawesi Selatan di tahun 2017, Kota Makassar masih menjadi dominasi UMK, sebanyak 13,71 persen UMK berada di Kota Makassar. Berikutnya pada posisi kedua dan ketiga adalah Kabupaten Bone dan Kabupaten Gowa dengan jumlah UMK masing-masing

Gambar 1.1 Persentase Jumlah UMK Menurut Kategori Di Sulawesi Selatan 2017



Sumber : BPS, SE2016 Lanjutan

9,81 persen dan 8,55 persen.

Menurut Tambunan (2011) distribusi ini menunjukkan peran keberadaan UMK untuk menyebarkan kegiatan usaha di semua wilayah. Bahkan Urata (2000) menyatakan jika UMK memegang peranan penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi masyarakat. Dengan demikian diharapkan mampu mengangkat perekonomian wilayah sekaligus mengurangi ketimpangan perekonomian antarwilayah di Indonesia.

Banyaknya UMK yang bergerak pada kategori G, diikuti dengan besarnya omset pada sektor tersebut. Hampir 60 persen omset sektor UMK nonpertanian berasal dari sektor perdagangan, reparasi dan perawatan kendaraan bermotor. Meskipun secara keseluruhan, usaha UMK pada kategori G merupakan sektor dengan jumlah usaha dan omset terbesar, namun

secara rata-rata, omset tertinggi diperoleh dari sektor konstruksi (Kategori F) yang diikuti oleh sektor pendidikan (Kategori P).

Tabel 1.2 Persentase UMK Menurut Wilayah di Sulawesi Selatan 2017

Wilayah	Persentase (%)
Selatan-Selatan (Kep. Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, dan Sinjai)	16,66
Mamminasata (Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar)	30,75
Pangkep-Ajatappareng (Pangkep, Barru, Parepare, Pinrang, dan Enrekang)	13,82
Bosowasi (Bone, Soppeng, Wajo, dan Sidrap)	23,43
Luwu dan sekitarnya (Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Palopo, Tana Toraja, dan Toraja Utara)	15,34
Total	100

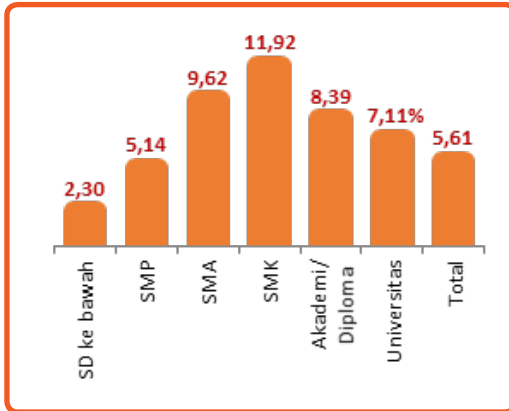
Sumber : BPS, SE2016 Lanjutan

C. Dominasi UMK sebagai Penggerak Perekonomian Sulawesi Selatan

Dalam perekonomian Sulsel, keunggulan UMK yang tidak kalah penting adalah perannya dalam penyerapan tenaga kerja. Jumlah UMK yang sangat besar di Sulawesi Selatan tentunya sangat berperan untuk menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi pengangguran. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Sulawesi Selatan Agustus 2017, pengangguran di Sulawesi Selatan mencapai 5,61 persen. Lebih dari 47 persen pengangguran di Sulawesi Selatan adalah lulusan pendidikan menengah (SMU dan SMK), dengan tingkat pengangguran 10,22 persen. Tingginya kontribusi lulusan menengah terhadap jumlah pengangguran

di Sulawesi Selatan salah satu disebabkan rendahnya keahlian *soft skill* khususnya di SMK yang kualitas pendidikannya belum teruji (Worldbank, 2014). Pada dasarnya pendidikan kejuruan mempersiapkan individu untuk bekerja dalam bidang tertentu (Sudira, 2012) serta mampu dan mau bekerja sesuai dengan bidang keahliannya (Usman, 2016). Di samping itu, pendidikan kejuruan juga diarahkan untuk meningkatkan kemandirian individu dalam berwirausaha sesuai dengan kompetensi yang dimiliki (Kennedy, 2011). Dengan demikian, lulusan SMK seharusnya tidak hanya siap menjadi pekerja, namun juga siap untuk memulai usaha.

Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Indonesia Menurut Pendidikan (%) 2017



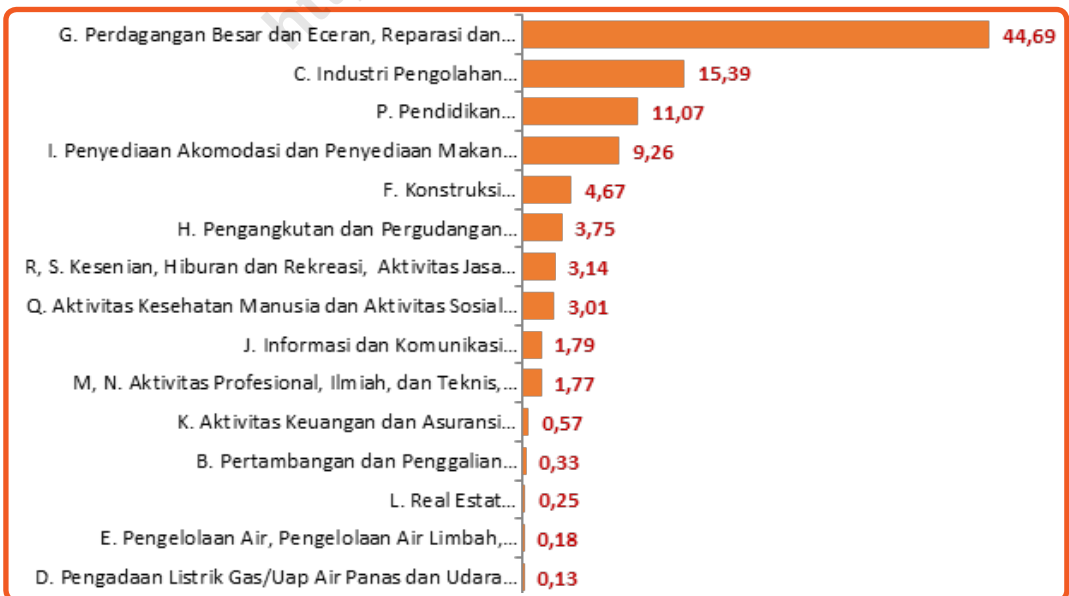
Sumber : BPS, Keadaan Angkatan kerja, Agustus 2017

Pembekalan keterampilan bagi angkatan kerja dengan tingkat pendidikan ini akan menjadi aksi yang sangat strategis agar mereka mampu menciptakan usaha sendiri. UMK merupakan salah satu wadah yang paling tepat untuk menampung para tenaga kerja yang tidak memiliki skill tinggi. Data SE2016-Lanjutan memberikan informasi

bahwa UMK telah menyerap lebih dari 2,1 juta orang atau sekitar 85,29 persen tenaga kerja non pertanian di Sulawesi Selatan. Sementara untuk Indonesia, penyerapan untuk UMK telah menyerap hampir 60 juta tenaga kerja, atau sekitar tiga perempat tenaga kerja di Indonesia. Pada umumnya, penyerapan tenaga kerja dari UMK pada negara-negara berkembang di Asia cukup besar mencapai sekitar 50 hingga 80 persen (Tambunan, 2011).

Penyerapan tenaga kerja UMK di Indonesia paling banyak terjadi pada usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G), mencapai lebih dari 40 persen dari tenaga kerja pada UMK secara keseluruhan (Gambar 1.6). Sektor ini akan berkembang seiring peningkatan pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk. Peningkatan daya beli masyarakat akan mendorong pertumbuhan

Gambar 1.3 Persentase (%) Penyerapan Tenaga Kerja UMK Menurut kategori 2017



Sumber : BPS, SE2016 Lanjutan

Tabel 1.2 Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja UMK Nonpertanian di Sulawesi Selatan Menurut Kategori 2017

Kategori	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja
B. Pertambangan dan Penggalian	2.334	6.807	3
C. Industri Pengolahan	132.277	321.951	2
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	1.405	2.803	2
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	1.823	3.791	2
F. Konstruksi	12.362	97.793	8
G. Perdagangan Besar dan Eceran. Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	517.159	934.989	2
H. Pengangkutan dan Pergudangan	62.258	78.447	1
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	91.393	193.686	2
J. Informasi dan Komunikasi	24.327	37.454	2
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	2.619	11.970	5
L. Real Estat	3.231	5.309	2
M, N. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis & Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	12.363	37.065	3
P. Pendidikan	19.813	231.596	12
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	5.821	63.038	11
R, S. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi & Aktivitas Jasa Lainnya	25.686	65.652	7
Total	914.871	2.092.351	2

Sumber : BPS, SE2016 Lanjutan

konsumsi dan permintaan akan barang, sehingga sektor ini yang pertama kali akan tumbuh. Selain itu, Sektor Perdagangan termasuk sektor yang mudah diusahakan karena dapat dilakukan dengan modal yang relatif kecil, sederhana, tidak memerlukan keahlian khusus dan dapat dilakukan dalam skala usaha rumahan. Berpijak dari pendapat tersebut, usaha pada Sektor Perdagangan paling banyak dilakukan oleh pelaku usaha yang baru memulai usaha.

Sementara itu usaha pada Sektor Industri Pengolahan (Kategori C) dan Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) menempati urutan kedua dan ketiga dalam penyerapan tenaga kerja pada UMK.

Secara-rata-rata per usaha, UMK kategori Pendidikan (kategori P) memiliki penyerapan tenaga kerja tertinggi yaitu sekitar 12 pekerja per usaha/perusahaan.

Namun secara umum, rata-rata penyerapan tenaga kerja UMK di Sulawesi Selatan hanya sebesar 2 pekerja.

Aktivitas Pendidikan (Kategori P) memiliki penyerapan tenaga kerja tertinggi yaitu sekitar 12 pekerja per usaha. Jenis aktivitas tersebut dapat dikatakan sebagai usaha yang padat tenaga kerja karena

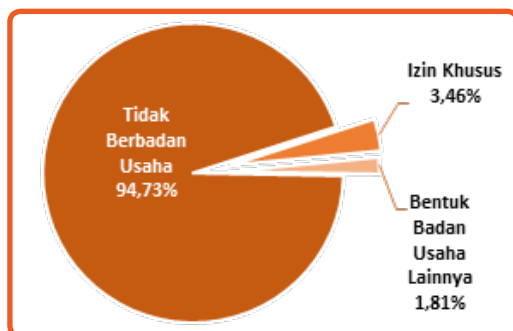
membutuhkan SDM yang banyak. Jasa pendidikan mencakup penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah (negeri) maupun swasta. Sedangkan Sektor Pengangkutan dan Pergudangan (Kategori H) merupakan sektor dengan serapan tenaga kerja terendah, hanya sekitar 1 pekerja per usaha.

D. Bentuk Aktivitas UMK di Sulawesi Selatan

Penyerapan tenaga kerja yang besar UMK di Sulawesi Selatan memiliki karakteristik informal, yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Pengelolaan yang sederhana ini tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh UMK. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja dari UMK adalah menjalin kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar untuk mendapatkan pembinaan, bantuan modal, maupun lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan UMK sekaligus akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

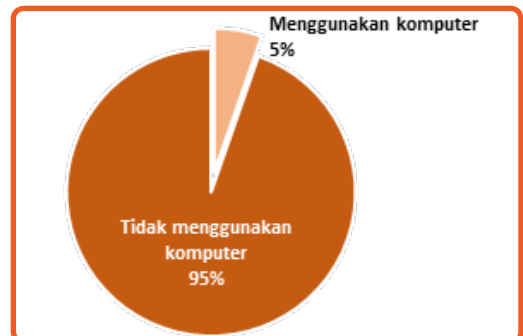
Dari data SE2016 menunjukkan bahwa pengelolaan UMK dilakukan secara sederhana tercermin dari status badan hukumnya, pencatatan keuangan, dan penggunaan komputer. Di Sulawesi Selatan, jumlah UMK yang tidak berbadan hukum masih sangat mendominasi yaitu mencapai 94,73 persen. Mayoritas UMK juga belum menggunakan komputer dan memanfaatkan internet. Komputer dan internet tidak hanya bermanfaat untuk melakukan laporan keuangan, juga bermanfaat untuk mendesain produk, pemasaran dan lain-lain. Sayangnya, hanya kurang dari 10 persen UMK yang menggunakan komputer dan memanfaatkan internet.

Gambar 1.5 Persentase UMK Nonpertanian Menurut Status Badan Usaha di Sulawesi Selatan 2016



Sumber : BPS, SE2016 Lanjutan

Gambar 1.6 Persentase UMK Nonpertanian Menurut Penggunaan Komputer dalam Usaha di Sulawesi Selatan 2016

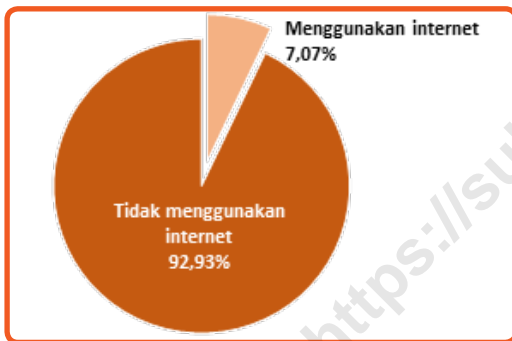


Sumber : BPS, SE2016 Lanjutan

Untuk meningkatkan pendapatan UMK sekaligus meningkatkan daya saing produknya, kemitraan menjadi salah satu cara yang tepat. Namun demikian, usaha ini masih belum menjadi pilihan bagi UMK. Keterbatasan informasi menjadi salah satu kendala untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan besar. Hanya sekitar 9 persen UMK yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain.

Di antara sektor nonpertanian di Sulawesi Selatan, UMK pada Kategori K (Aktivitas Keuangan dan Asuransi), Kategori M (Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis), dan Kategori P (Pendidikan) yang pengelolaannya paling baik. Hal ini tercermin dari variabel-variabel status badan hukum, penggunaan komputer dan pemanfaatan internet. Sementara dari aspek menjalin kemitraan, hampir semua kategori belum menjalin kemitraan secara optimal.

Gambar 1.7 Persentase UMK Nonpertanian Menurut Penggunaan Internet dalam Usaha di Sulawesi Selatan 2016



Sumber : BPS, SE2016 Lanjutan

Gambar 1.8 Persentase UMK Nonpertanian Menurut Keikutsertaan dalam Kemitraan di Sulawesi Selatan 2016



Sumber : BPS, SE2016 Lanjutan

Tabel 1.3 Persentase UMK yang Berbadan Usaha, Menggunakan Komputer, Menggunakan Internet, dan Menjalinkan Kemitraan di Sulawesi Selatan 2016

Kategori	Berbadan Usaha	Menggunakan Komputer	Menggunakan Internet	Menjalinkan Kemitraan
B. Pertambangan dan Penggalian	8,10	0,51	1,16	3,90
C. Industri Pengolahan	4,39	3,06	5,13	9,36
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	12,38	58,01	58,36	30,68
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	4,33	3,84	3,35	9,54
F. Konstruksi	16,15	13,10	13,61	8,74
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	3,28	2,15	4,19	9,37
H. Pengangkutan dan Pergudangan	2,31	0,69	2,53	3,71
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	3,12	2,17	4,49	2,93
J. Informasi dan Komunikasi	2,37	14,93	22,87	15,68
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	55,40	47,84	28,18	15,92
L. Real Estat	2,85	3,10	3,31	1,86
M, N. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis & Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	11,50	38,26	32,84	12,62
P. Pendidikan	56,25	71,85	60,23	12,04
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	46,38	31,27	31,90	18,11
R, S. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi & Aktivitas Jasa Lainnya	5,19	10,98	14,50	5,98
Total	5,27	5,32	7,07	8,57

Sumber : BPS, SE2016 Lanjutan



BAB

2

**BAGAIMANA DAN
SIAPA PELAKU UMK
DI SULAWESI SELATAN**

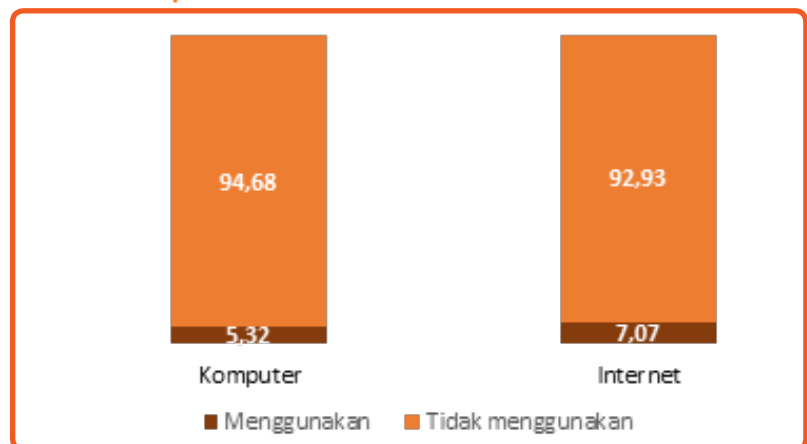
Bagaimana dan Siapa Pelaku UMK di Sulawesi Selatan

A. Penggunaan Teknologi pada Pengelolaan UMK

Salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan kinerja UMK adalah penggunaan teknologi informasi. Tercapainya kinerja yang positif tentunya dengan meningkatkan daya saing UMK. Penggunaan teknologi informasi akan mampu meningkatkan transformasi bisnis, ketepatan, dan efisiensi pertukaran informasi (Rahmana, 2009). Khristianto (2012) menambahkan jika teknologi informasi pada saat ini akan memperluas jaringan pemasaran dan memperluas market share.

Pada era digital ini, teknologi informasi menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan UMK di Indonesia apalagi dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Teknologi informasi meliputi penggunaan komputer dan internet. Namun dari hasil SE2016 lanjutan menunjukkan jika mayoritas UMK belum menggunakan komputer dan memanfaatkan internet. Menurut Wahid dan Iswari (2017) bagi UMKM, komputer tidak hanya bermanfaat untuk melakukan laporan keuangan dan melakukan kalkulasi, juga bermanfaat untuk mendesain produk, menyimpan data/informasi,

Gambar 2.1 Persentase UMK Nonpertanian Menurut Penggunaan Komputer dan Internet di Sulawesi Selatan 2017



Sumber : BPS, SE2016 Lanjutan

Kota Makassar menjadi daerah dengan penggunaan akses internet untuk UMK yang terbesar dengan persentase hampir 12 persen, sementara Kabupaten Luwu Utara menjadi kabupaten dengan akses internet paling sedikit dalam kegiatan UMK nya, hanya sekitar 3 persen. Penggunaan internet pada UMK dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan UMK. Hampir 39 persen UMK pengguna internet telah memanfaatkannya untuk sarana penjualan.

mengakses internet, dan lain-lain. Sayangnya, hanya sekitar 5 persen UMK yang menggunakan komputer (Gambar 2.1).

Kesenjangan dalam penggunaan komputer untuk UMK di wilayah Sulsel cukup tinggi. Penggunaan komputer dalam UMK masih di dominasi wilayah kota, yaitu Kota Makassar, hampir 10 persen UMK menggunakan komputer. Selebihnya untuk kabupaten/kota lainnya hanya berkisar 4 hingga 6 persen.

Sejalan dengan penggunaan komputer, hasil SE2016 Lanjutan menunjukkan jika jumlah UMK pengguna internet belum mencapai 8 persen (Gambar 2.1). Sebagai teknologi informasi, bagi UMKM internet tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi mengirim pesan atau email, tetapi juga untuk keperluan lain terkait bisnis seperti mencari informasi pasar, mencari informasi desain, memasarkan produk, komunikasi dengan mitra, pemasok dan konsumen, memfasilitasi pemesanan online, serta transaksi online (Wahid dan Iswari, 2017).

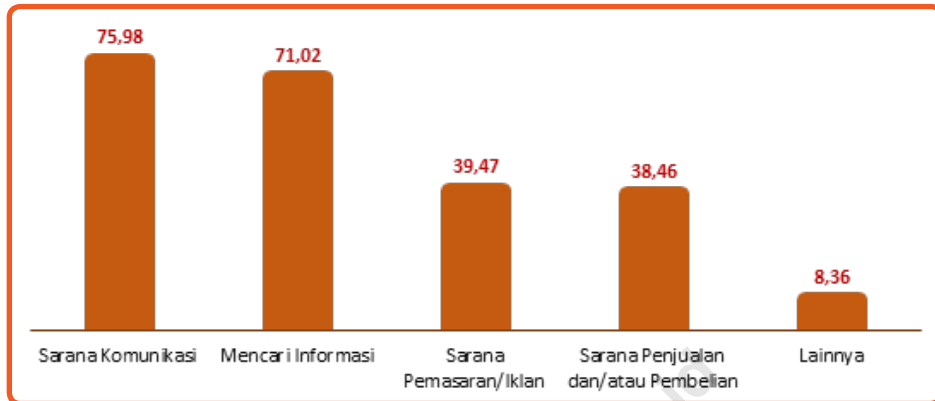
Minimnya akses internet yang masih sangat sedikit merupakan sinyal bagi pemerintah, apalagi pada saat ini di era revolusi industri 4.0. Faktor dukungan teknologi, salah satunya teknologi informasi sangat diperlukan oleh UMK untuk mampu bertahan dan mengikuti perubahan pada dunia usaha (Handoko dll, 2016). Hal ini akan mendorong UMK untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Namun demikian, UMK di negara-negara Asia termasuk Indonesia masih mempunyai kelemahan dalam aksesibilitas dan pembaruan teknologi informasinya (Das & Komal, 2012).

Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, UMK dihadapkan kepada tantangan bahwa harus melek teknologi jika ingin beradaptasi dan berkembang di era *digital technology* ini. Saat ini setiap bisnis tidak hanya *product oriented*, tetapi harus *market oriented* jika ingin tetap tumbuh dan berkembang. Dengan kata lain harus mampu menghasilkan apa yang dibutuhkan pasar saat ini maupun yang akan datang. Para pelaku UMK di era 4.0 harus dapat melihat peluang digital dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga mampu menyasar pasar yang lebih luas. Jika pada saat ini Indonesia tidak memanfaatkan teknologi digital dalam usaha, maka kedepannya akan diserang oleh produk dari luar negeri khususnya di Sulawesi Selatan dan UMK Indonesia akan terus tertinggal dan sulit untuk mengembangkan usahanya.

Pemanfaatan internet yang masih sangat rendah oleh UMK untuk usaha saat ini, menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sampai wilayah pelosok tanah air. Pembangunan infrastruktur tidak hanya infrastruktur fisik saja seperti jalan, waduk, pelabuhan, dan lain-lain. Pembangunan infrastruktur non fisik yang berkaitan dengan komunikasi khususnya internet saat ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat.

Dalam penerapannya terdapat tiga elemen *cloud computing*, yaitu *network*, *device*, dan *application* (DNA). *Network* atau jaringan meliputi pembangunan sistem komunikasi kabel laut dan serat optik (SKKL dan SKSO) melalui melalui proyek Palapa Ring untuk menyebarkan layanan *broadband* di seluruh wilayah Indonesia. *Device* merupakan perangkat telekomunikasi

Gambar 2.2 Persentase UMK Nonpertanian Menurut Penggunaan Komputer dan Internet di Sulawesi Selatan 2017



Sumber : BPS, SE2016 Lanjutan

dan informasi. Pengembangannya melalui penambahan sekaligus sertifikasi terhadap perangkat komunikasi dan informasi yang berada di Indonesia. Selanjutnya *Application* merupakan penerapan broadband menggunakan aplikasi yang *berguna* bagi dunia usaha. Melalui aplikasi tersebut telah mendorong adanya ekonomi baru, salah satunya *e-commerce*. Bagi UMK, manfaat *e-commerce* sangat signifikan, di antaranya adalah mampu memperluas jangkauan pasar, meningkatkan penjualan, meningkatkan komunikasi eksternal, meningkatkan kecepatan proses usaha sekaligus meningkatkan produktifitas karyawan (Dirgahayu, 2016).

Penggunaan internet dalam penyebarannya di kabupaten/kota masih belum merata, Kota Makassar menjadi daerah dengan penggunaan akses internet untuk UMK yang terbesar dengan persentase hampir 12 persen, sementara Kabupaten Luwu

Utara menjadi kabupaten dengan akses internet paling sedikit dalam kegiatan UMK nya, hanya sekitar 3 persen.

Penggunaan internet pada UMK dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan UMK. Hampir 39 persen UMK pengguna internet telah memanfaatkannya untuk sarana penjualan. Bahkan internet juga telah dimanfaatkan untuk pemasaran/iklan, yaitu untuk memperkenalkan produk/jasa dan menggambarkan spesifikasi produk/jasa. Dalam perkembangan industri digital dewasa ini, diharapkan lebih banyak lagi UMK yang dapat memanfaatkan internet terutama untuk pemasaran agar dapat meningkatkan daya saingnya. Jika perusahaan-perusahaan *startup* lokal mampu membuat aplikasi yang berguna dalam penerapan *broadband* diharapkan akan mempermudah dan mendorong perkembangan UMK di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

B. Kualitas Pelaku UMK

Salah satu faktor keberhasilan suatu usaha adalah sumber daya manusia yaitu pelaku usaha yang merupakan tenaga

kerja. Sebagian besar usaha dilakukan secara perorangan. Karena skala usaha yang kecil dan pengelolaannya dilakukan

secara sederhana, seluruh proses usaha atau produksi sampai pemasaran dilakukan sendiri oleh pengelola atau pengusaha. Dari data SE lanjutan, diketahui beberapa usaha secara rata-rata merupakan usaha perorangan, diantaranya adalah pengangkutan dan pergudangan. Untuk meningkatkan pendapatan UMK, pengelola harus mempunyai bekal dan pengetahuan mengenai bisnis usaha.

Peranan UMK dalam menggerakkan perekonomian tidak terlepas dari peran perempuan baik sebagai pengusaha maupun tenaga kerja. Persentase pengusaha UMK yang berjenis kelamin perempuan hampir sama dengan laki-laki, meskipun sedikit lebih banyak (50,91 persen). Persentase ini cukup tinggi

mengingat masih berlakunya norma jika laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah. Berpijak dengan hal tersebut dapat diduga jika UMK juga dijalankan sebagai penunjang perekonomian keluarga.

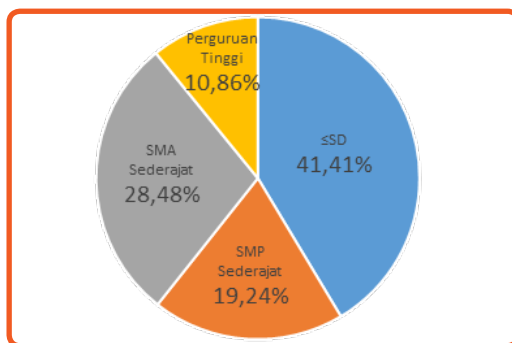
Dari segi kualitas pendidikan, secara umum kualitas pendidikan pengelola UMK masih berstatus pendidikan rendah. Lebih dari 40 persen pengelola berpendidikan SD ke bawah, paling besar diantara jenjang pendidikan lainnya. Pengelola dengan pendidikan SMA juga cukup besar, hampir mencapai sekitar 30 persen. Masih rendahnya pendidikan pengelola UMK menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan bagi pelaku usaha ini seperti pelatihan-pelatihan.

Gambar 2.3 Persentase pengusaha UMK Nonpertanian Menurut Jenis Kelamin di Sulawesi Selatan 2017



Sumber : BPS, SE2016 Lanjutan

Gambar 2.4 Persentase pengusaha UMK Nonpertanian Menurut Pendidikan di Sulawesi Selatan 2017



Sumber : BPS, SE2016 Lanjutan

C. Pembinaan UMK Harus Menjadi Prioritas

Kemitraan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan sekaligus meningkatkan daya saing produk-produk. Kemitraan tidak hanya aksi pembinaan tetapi juga memberikan bantuan untuk meningkatkan pendapatan UMK. Kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar meliputi pembinaan, bantuan modal,

bantuan pemasaran, pengadaan bahan baku, dan lainnya.

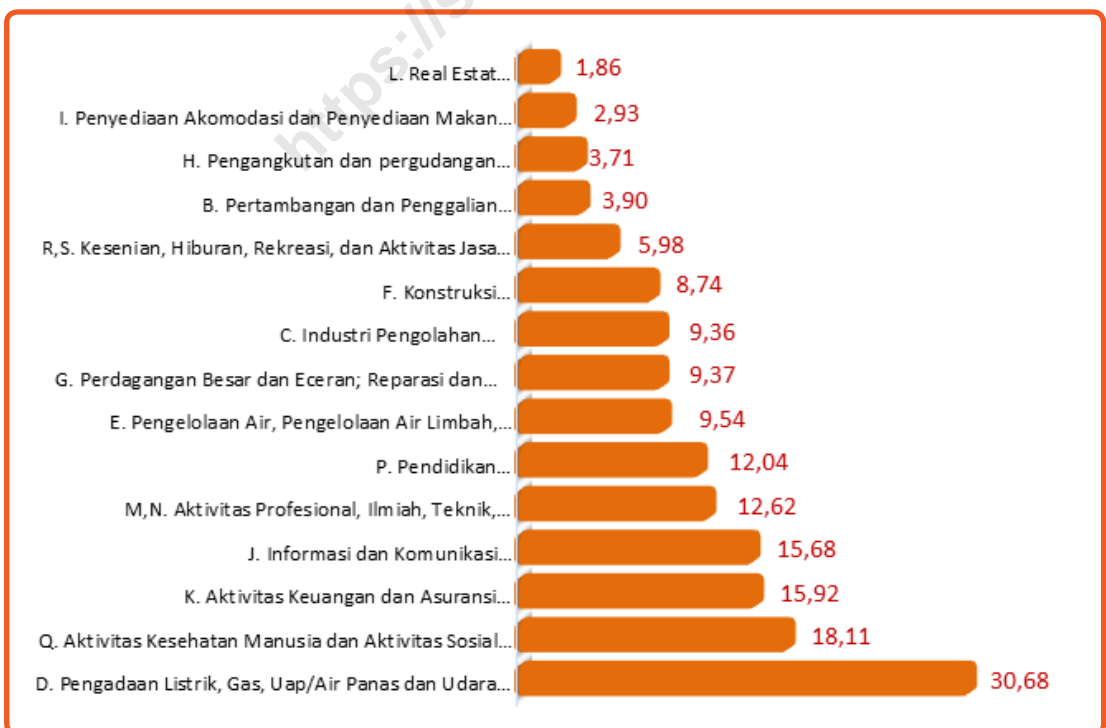
Kemitraan adalah kerjasama atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Konsep kemitraan tersebut selaras dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang kemitraan Usaha Mikro Kecil Menengah. Bagi perusahaan-perusahaan besar, program kemitraan berdasarkan UU tersebut mengandung makna sebagai tanggung jawab moral perusahaan besar untuk membina perusahaan-perusahaan yang lebih kecil. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendorong kesejahteraan dan perbaikan lingkungannya, yang umum disebut sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Prasetyantono, 2006).

Selanjutnya, bagi perusahaan, CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang merupakan perwujudan *good corporate governance* (Tunggal, 2008). Pembinaan ini

sebenarnya merupakan perintah hukum bagi perusahaan-perusahaan besar, namun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan BUMN-lah yang paling banyak memberikan pembinaan melalui kemitraan kepada usaha-usaha kecil (Prasetyantono, 2006). Kewajiban pembinaan BUMN bagi UMKM merupakan peraturan pemerintah mengenai Program Kemitraan dan Bantuan Lingkungan (PKBL) yang mengharuskan BUMN untuk menyisihkan laba bersihnya sebanyak 2 persen untuk membantu UMKM di Indonesia. Selain BUMN beberapa Pemerintah Daerah juga aktif menjalin kemitraan dengan UMK di wilayahnya masing-masing. Melalui kemitraan ini, diharapkan dapat meminimalisasi ketimpangan ekonomi regional, sehingga tercipta perekonomian regional yang

Gambar 2.5 Persentase UMK yang Menjalinkan Kemitraan Menurut Kategori 2017



Sumber : BPS, SE2016 Lanjutan

berkeadilan.

Meskipun kemitraan akan sangat berdampak positif bagi UMK, perwujudannya masih sangat minim. Masih kurang dari 9 persen UMK yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain, khususnya dengan BUMN.

Keterbatasan informasi menjadi salah satu kendala untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan besar. UMK Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas mempunyai persentase paling tinggi dalam menjalin kemitraan dengan pihak lain (Gambar 2.7).

D. Pelaku UMK Masih Memerlukan Peningkatan Kapabilitas

Kepemilikan sertifikat pada UMK, sebagai salah satu bentuk legitimasi kapabilitas suatu UMK. Keabsahan kualitas produk dari suatu UKM lebih teruji dan dipercaya dengan adanya sertifikasi. Kepercayaan konsumen pun akan semakin meningkat. Berbagai bentuk sertifikasi telah disediakan oleh pemerintah, baik skala nasional maupun internasional. Pada level internasional, di tengah perdagangan bebas yang sudah dimulai, dengan adanya sertifikat skala internasional, UMK dapat mendukung produk domestik agar tembus ke luar negeri. Dari data SE2016, hanya sekitar 1 persen UMK di Sulsel yang bersertifikasi. Dari 1 persen tersebut, hanya sekitar 4 persen yang berstatus sertifikat internasional.

Salah satu faktor keberhasilan suatu usaha adalah sumber daya manusia yang berkualitas dengan sistem manajemen pembagian tugas yang baik. Namun, dengan ciri khas UMK di Sulawesi Selatan yang mayoritas masih dikelola dengan sederhana, umumnya usaha dilakukan secara perorangan. Karena skala usaha yang kecil dan sederhana, maka seluruh proses usaha atau produksi sampai pemasaran dilakukan sendiri oleh pengelola atau pengusaha.

Hasil data SE2016-Lanjutan menunjukkan

hampir sekitar 9,5 persen UMK di Sulawesi Selatan dilakukan secara perorangan. Kategori yang paling banyak dilakukan secara perorangan adalah Real Estate (kategori L). Sementara aktivitas Pendidikan (Kategori P) merupakan kategori yang menggunakan tenaga kerja terbanyak diantara kategori UMK lainnya.

Meskipun UMK merupakan salah satu solusi perekonomian masyarakat menengah ke bawah, yang dapat memiliki latar belakang pendidikan kurang. Namun pada era perdagangan bebas yang semakin maju, faktor pendidikan tak dapat lagi di kesampingkan. Beberapa kajian ilmiah dilakukan untuk melihat kaitan faktor pendidikan terhadap pengembangan UKM, hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi yang cukup signifikan antara tingkat pendidikan terhadap produktivitas UKM. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Nalukenge, et al (2012), Mandala (2012), dan masih banyak penelitian lainnya. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap kemampuan mengadopsi teknologi informasi dalam mendukung usaha (Saleh dan Hadiyat, 2016). Pendidikan juga mempengaruhi inovasi pelaku usaha (1987). Inovasi dan teknologi informasi sangat menentukan daya saing perusahaan di era perdagangan bebas saat ini.

Tabel 2.1 Persentase UMK Nonpertanian Menurut Kategori dan Status Pekerja

Kategori	Tetap dan Kontrak	Tidak Tetap/Harian/Outsourcing	Tidak Dibayar
B. Pertambangan dan Penggalian	51,04	26,25	22,71
C. Industri Pengolahan	54,73	22,57	22,70
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	72,24	4,82	22,94
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	62,23	13,45	24,32
F. Konstruksi	39,48	60,47	0,00
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	62,61	5,81	31,56
H. Pengangkutan dan Pergudangan	85,76	8,46	5,76
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	64,42	6,74	28,82
J. Informasi dan Komunikasi	69,37	1,82	28,81
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	82,94	3,74	13,32
L. Real Estat	69,30	6,88	20,44
M, N. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis & Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	57,32	28,60	14,07
P. Pendidikan	87,48	10,11	2,20
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	70,52	10,51	18,83
R, S. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi & Aktivitas Jasa Lainnya	82,00	4,70	3,11
Total	64,67	12,55	22,72

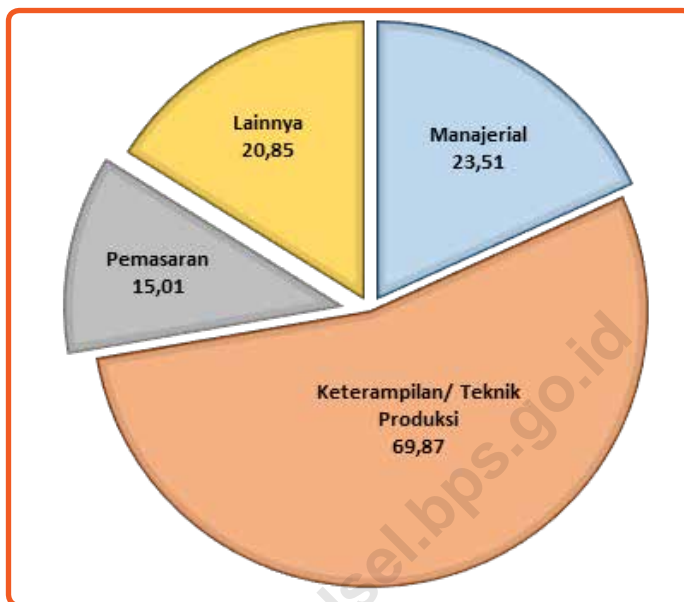
Sumber : BPS, SE2016 Lanjutan

Dengan tingkat pendidikan yang rendah maka kemampuan inovasi pelaku UMK menjadi rendah. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk meningkatkan skill pelaku UMK. Salah satunya adalah melakukan pelatihan-pelatihan bagi pelaku UMK untuk meningkatkan inovasinya, meskipun dengan pendidikan yang terbatas.

Menurut PP No.31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Pelatihan kerja adalah seluruh kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan,

serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Pelatihan kerja merupakan proses mengajarkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan kerja. Sayangnya, hanya sedikit UMK yang pernah mengikutsertakan SDM nya dalam pelatihan, yaitu sekitar 4 persen. Dari sejumlah UMK tersebut, jenis pelatihan terbanyak yang dilakukan adalah keterampilan teknik produksi.

Gambar 2.6 Persentase UMK Nonpertanian yang Pernah Mengikutsertakan Pekerja dalam Pelatihan Menurut Jenis Pelatihan 2017



Sumber : BPS, SE2016 Lanjutan



BAB

3

AKSESIBILITAS PERMODALAN UMK

Aksesibilitas Permodalan UMK

Dalam RPJMN 2015-2019, peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan bagi UMKM adalah salah satu arah pembangunan untuk meningkatkan daya saing usaha. Dengan demikian, analisis aksesibilitas permodalan menjadi sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk mengidentifikasi apakah program dan kebijakan pemerintah telah memberikan hasil positif bagi UMK.

Modal dapat diartikan sebagai aset, dalam bentuk uang maupun non uang. Permodalan merupakan faktor utama pada setiap proses produksi atau usaha. Masalah permodalan merupakan masalah klasik bagi setiap usaha, tidak terkecuali bagi UMK. Dengan kapasitas usaha yang relatif kecil, permodalan pada UMK ini masih banyak menggunakan modal sendiri. Sekitar 66,62 persen UMK di Sulawesi Selatan menyatakan permodalan sebagai kendala dalam menjalankan bisnis. Oleh sebab itu, akses kredit dari lembaga keuangan merupakan hal yang penting. Hanya sekitar 14,44 persen usaha yang memperoleh/mengajukan kredit ke lembaga keuangan. Alasan UMK tidak menjadikan bank dan lembaga keuangan nonbank sebagai sumber pemberi modal/usaha utamanya adalah karena alasan bunga tinggi, tidak memiliki agunan, dan tidak tahu prosedur. Bagi usaha mikro dan kecil, sumber pembiayaan konvensional seperti perbankan dinilai memiliki syarat administrasi yang sulit dengan nilai pinjaman yang terbatas. Hal ini tentunya merupakan kendala tersendiri mengingat untuk mengembangkan usaha, UMK harus meningkatkan kapasitas produksinya yang tentunya memerlukan modal yang tidak sedikit.

Penggunaan kredit bagi pengusaha UMK yang sebagian besar berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah mempunyai ciri yang khas, yaitu tidak adanya garis yang tegas antara pembiayaan untuk usaha dan konsumsi rumah tangga (Ashar, 2011). Dengan kata lain, pengeluaran untuk usaha dan rumah tangga tercampur dan sulit dibedakan. Tercampurnya penggunaan kredit dalam pengelolaan usaha akan menjadi kendala bagi UMK untuk pengembangan. Hal ini berisiko terjadinya kredit macet karena penanganan keuangan yang tidak profesional. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan yang kurang profesional juga menjadi kendala permodalan pada UMK, selain akses ke lembaga keuangan.

Dalam RPJMN 2015-2019, peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan bagi UMKM adalah salah satu arah pembangunan untuk meningkatkan daya saing usaha. Dengan demikian, analisis aksesibilitas permodalan menjadi sangat penting

untuk dilakukan sebagai upaya untuk mengidentifikasi apakah program dan kebijakan pemerintah telah memberikan hasil positif bagi UMK. Selain itu juga

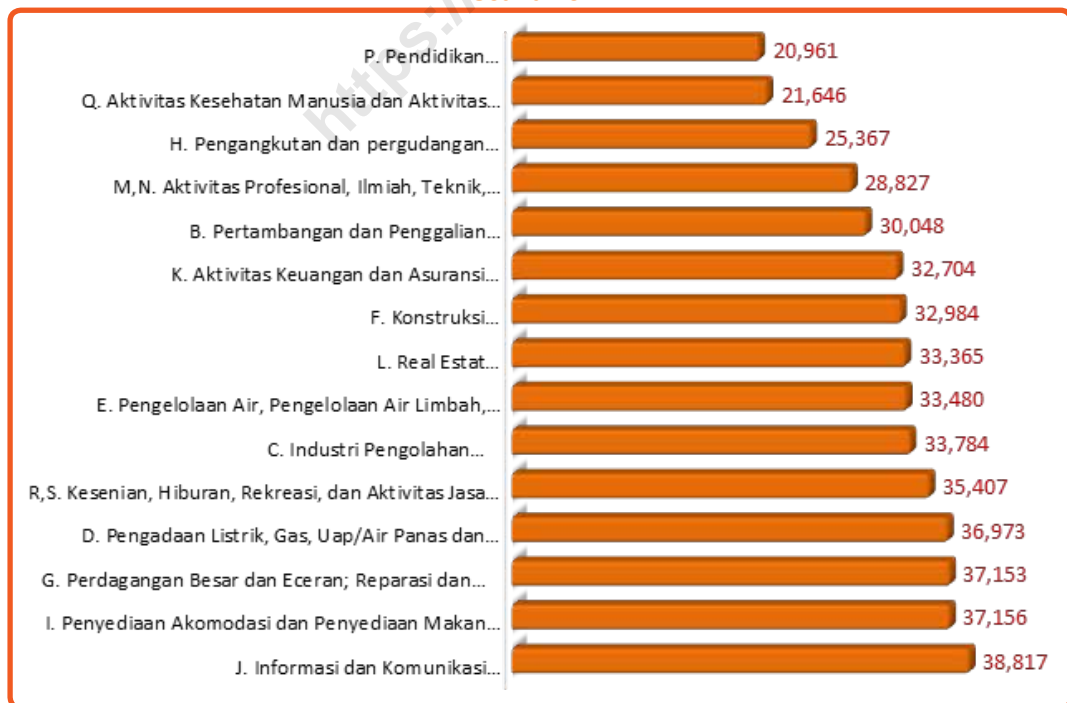
perlu diidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya akses terhadap sumber daya modal.

A. Permodalan Merupakan Kendala Utama UMK di Sulawesi Selatan

Sebagai sumber pembiayaan bagi UMK permodalan merupakan kendala utama selain persaingan usaha. Berdasarkan hasil SE2016 Lanjutan, dari banyaknya kendala yang dihadapi UMK, lebih dari 35 persennya adalah kendala permodalannya. Permasalahan modal tentunya akan menghambat pelaku UMK untuk melakukan ekspansi usaha dan naik kelas. Permasalahan yang utama dari permodalan adalah akses pembiayaannya. Kategori G (Perdagangan) paling banyak yang mengeluhkan persoalan permodalan.

Membangun sebuah usaha tentu memerlukan modal yang relatif tidak sedikit. Investasi awal diperlukan untuk membuka usaha saat pertama kalinya. Hal ini dapat berupa penyediaan tempat dan peralatan. Selanjutnya diperlukan modal kerja dan modal operasional yang diperlukan untuk membayar listrik, telepon, air, sewa ruangan, gaji pegawai, dan pengeluaran lain yang harus dibiayai. Biaya ini tetap harus dikeluarkan tanpa memandang barang/jasa yang produksi atau diperjualbelikan sudah memberikan keuntungan atau belum. Bagi UMK, sumber

Gambar 3.1 Persentase Kendala Permodalan pada UMK Menurut Kategori Lapangan Usaha 2017

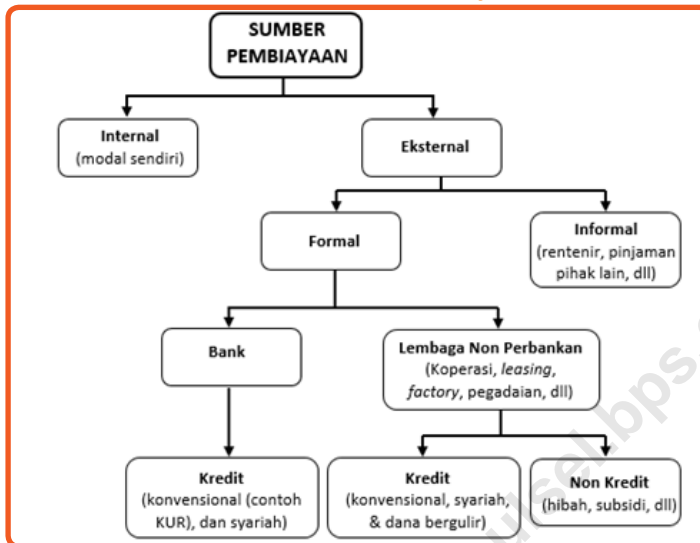


Sumber : BPS, SE2016 Lanjutan

pembiayaan modal terbagi menjadi yang konvensional maupun non konvensional. Pada Gambar 3.2 berikut disajikan skema sumber pembiayaan modal UMK.

yang lebih luas. Salah satunya adalah melalui lembaga non-perbankan seperti koperasi, *leasing*, *factory*, gadai, dan lain-lain.

Gambar 3.2 Skema Sumber Pembiayaan UMK 2017



Catatan : dikutip dari berbagai sumber

Dari hasil SE2016 Lanjutan diperoleh informasi bahwa mayoritas UMK mengeluarkan modal awal lebih dari separuhnya berasal dari dompet sendiri. Hal ini merata di semua jenis aktivitas usaha dengan persentase lebih dari 90 persen. Sementara UMK yang mengandalkan modal awal dari bank hanya mencapai 3 persen (Tabel 3.1). Kecilnya persentase tersebut disebabkan karena akses pada bank dinilai tidak mudah. Bagi pihak perbankan, kebijakan *prudent* yang lebih ketat sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan. Selain itu pelaku UMK juga minim informasi terkait kredit pembiayaan usaha. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab kecilnya akses UMK terhadap kredit dari bank.

Potensi pembiayaan selain bank masih sangat terbuka dengan jangkauan akses

Menurut keputusan menteri keuangan No. KEP-38/MK/IV/1972, lembaga keuangan bukan bank atau yang disingkat menjadi LKBB adalah sebuah badan yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga, selanjutnya menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Jenis-jenis LKBB antara lain pegadaian, koperasi simpan pinjam, perusahaan multifinance, pasar modal, perusahaan modal ventura, dana pensiun dan perusahaan asuransi.

Perkembangan dunia digital saat ini memberikan stimulus pada pembentukan lembaga keuangan non bank yang dapat memberikan layanan pinjaman secara online dengan iming-iming proses yang lebih cepat dibandingkan perbankan dan tanpa agunan. Namun kendala yang dihadapi oleh pelaku UMK untuk mengakses kredit tersebut adalah bunga yang sangat tinggi. Selain itu, sistem pembiayaan saat ini mulai mengarah ke sistem *financial technology (fintech)*. Dalam penyaluran pembiayaannya, *fintech* tidak lagi melalui perantara, namun langsung ke pihak peminjam. Ke depan, sistem ini akan

terus menjadi tren karena penyalurannya dianggap lebih mudah.

memperoleh kredit dari lembaga keuangan (Gambar 3.3).

Meskipun terdapat berbagai jenis sumber pembiayaan formal di luar bank, akses UMK terhadap kredit cukup rendah. Hanya sekitar 14 persen saja UMK yang

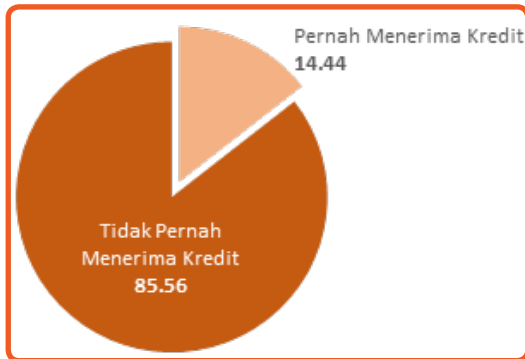
Dari segi akses wilayah, Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai persentase paling rendah (sekitar 7 persen) untuk UMK yang pernah menerima kredit. Sementara

Tabel 3.1 Persentase UMK yang Memiliki Kendala Permodalan Menurut Kategori Lapangan Usaha 2017

Kategori	Modal Sendiri ≥ 50%	Pinjaman Bank ≥ 50%	Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank ≥ 50 %	Pinjaman Perorangan, Keluarga, dan Lainnya 10-50%
B. Pertambangan dan Penggalian	90,87	3,13	0,56	3,56
C. Industri Pengolahan	88,52	2,22	0,26	4,52
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	83,56	5,12	2,85	1,49
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	90,84	2,91	0,93	1,04
F. Konstruksi	91,98	2,12	0,15	3,37
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	88,66	3,39	0,63	3,34
H. Pengangkutan dan Pergudangan	84,52	2,01	2,27	4,47
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	90,46	2,57	0,48	3,14
J. Informasi dan Komunikasi	93,92	1,56	0,30	2,09
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	71,78	6,72	6,57	0,65
L. Real Estat	92,39	2,72	0,00	2,04
M, N. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis & Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	86,32	4,07	0,66	3,29
P. Pendidikan	71,25	0,26	0,97	0,71
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	87,91	1,61	0,36	1,29
R, S. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi & Aktivitas Jasa Lainnya	89,31	2,81	0,33	2,97
Total	88,29	2,90	0,67	3,43

Sumber : BPS, SE2016 Lanjutan

Gambar 3.3 Persentase UMK Menurut Akses Permodalan dari Lembaga Keuangan di Sulawesi Selatan 2017



Sumber : BPS, SE2016 Lanjutan

UMK di Kabupaten Sidenreng Rappang, ternyata cukup baik dalam memanfaatkan bantuan kredit dari lembaga keuangan untuk kegiatan UMK-nya. Dengan persentase hampir 30 persen, masih lebih baik dibanding Kota Makassar yang hanya sekitar 12 persen. Padahal Kota Makassar merupakan ibukota provinsi, berbagai variasi lembaga keuangan ada di Kota Makassar. Hal ini menarik sebagai bahan kajian bagi pemerintah tentang optimalisasi bantuan kredit UMK melalui lembaga keuangan.

Mayoritas UMK mengandalkan modal dari kantong sendiri, atau dari sumber informal, salah satunya rentenir. Bagi UMK yang tidak memperoleh kredit dari lembaga keuangan sebagian merasa belum perlu untuk mengajukan kredit. Setengah pelaku UMK lainnya membutuhkan kredit namun beralasan bunganya tinggi, tidak memiliki agunan, tidak tahu prosedur, prosedur sulit, dan usulan ditolak (Gambar 3.4), Berdasarkan kajian Kementerian Perdagangan (2013), kecilnya persentase UMK yang tidak memperoleh kredit karena terdapat tiga kendala utama dari

Tabel 3.2 Persentase UMK Menurut Wilayah dalam Status Penerimaan Kredit dari Lembaga Keuangan 2017

Kabupaten/Kota	Pernah Menerima Kredit	Pernah Menerima Kredit
[01] KEPULAUAN SELAYAR	7,46	92,54
[02] BULUKUMBA	9,49	90,51
[03] BANTAENG	15,93	84,07
[04] JENEPONTO	17,81	82,19
[05] TAKALAR	22,21	77,79
[06] GOWA	10,91	89,09
[07] SINJAI	18,21	81,79
[08] MAROS	16,56	83,44
[09] PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	12,75	87,25
[10] BARRU	22,44	77,56
[11] BONE	11,66	88,34
[12] SOPPENG	17,59	82,41
[13] WAJO	8,65	91,35
[14] SIDENRENG RAPPANG	29,58	70,42
[15] PINRANG	18,67	81,33
[16] ENREKANG	15,05	84,95
[17] LUWU	14,32	85,68
[18] TANA TORAJA	13,77	86,23
[22] LUWU UTARA	12,67	87,33
[25] LUWU TIMUR	18,30	81,70
[26] TORAJA UTARA	12,57	87,43
[71] MAKASSAR	12,23	87,77
[72] PAREPARE	16,69	83,31
[73] PALOPO	11,05	88,95
SULAWESI SELATAN	14,44	85,56

Sumber : BPS, SE2016 Lanjutan

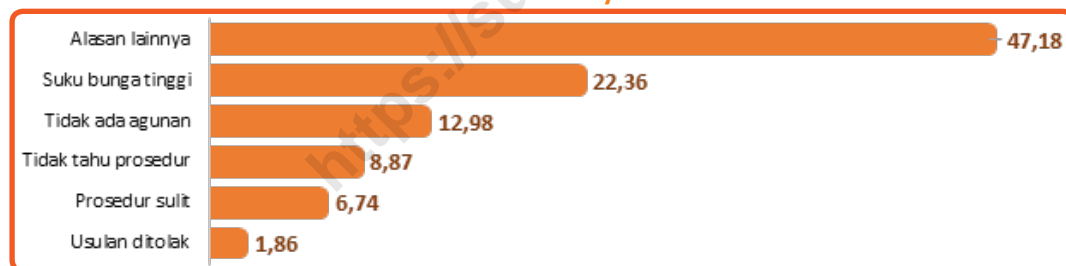
aspek lembaga pembiayaan, yaitu sulitnya menilai UMK yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pemberian kredit; animo UMK yang rendah terhadap upaya pembinaan oleh lembaga pembiayaan, sebagian besar pengelolaan keuangan UMK masih belum memisahkan antara keuangan pribadi dengan usaha.

Di sisi lain, akses kredit dari perbankan masih menjadi prioritas utama dalam dalam penyaluran kredit. Kebijakan pemerintah dalam pemberian akses kredit untuk UMKM sebetulnya sudah sangat terbuka. Melalui beberapa peraturan, pembiayaan bagi UMKM semakin dipermudah. Bank Indonesia telah mewajibkan Bank Umum untuk memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM (Peraturan Bank Indonesia

keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan, Secara umum lembaga keuangan mikro antara lain BRI Unit Desa, Bank Perkreditan Rakyat, Badan Kredit Desa, Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam, Lembaga Dana Kredit Perdesaan, Baitul Mal wat-Tamwil, Kelompok Swadaya Masyarakat dan Credit Union (Zubair, 2016).

Dalam prakteknya, koperasi simpan pinjam yang sangat berperan dalam penyaluran kredit bagi pelaku usaha, khususnya

Gambar 3.4 Persentase UMK yang Tidak Memperoleh Kredit dari Lembaga Keuangan Menurut Alasannya 2017



Sumber : BPS, SE2016 Lanjutan

Nomor 17/12/PBI/2015). Melalui Peraturan tersebut pemerintah mewajibkan Bank Umum untuk mengalokasikan kredit bagi UMKM paling rendah sebesar 10 persen dari total kredit yang disalurkan mulai tahun 2016.

Selain bank, lembaga keuangan lain yang sangat membantu pembiayaan UMK adalah koperasi. Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan mikro. Dalam UU No.1 tahun 2013 disebutkan bahwa lembaga keuangan mikro merupakan lembaga

usaha mikro. Menurut Sumodiningrat (2004), koperasi simpan pinjam mampu menyesuaikan ritme dan karakter yang melekat pada usaha mikro dan kecil. Dari sisi jumlah koperasi simpan pinjam paling banyak diantara lembaga keuangan mikro lainnya dan keberadaannya tersebar ke seluruh pelosok. Koperasi simpan pinjam dapat menjadi lembaga keuangan mikro yang berkelanjutan jika adanya peningkatan efektivitas regulasi dan supervisi, kapasitas kelembagaan, serta permodalan. Namun demikian, potensi yang cukup besar

tersebut masih menemui kendala antara lain keterbatasan kelembagaan, keterbatasan sumberdaya manusia dalam pengelolaan LKM dan permodalan (Wijono, 2005). Sementara Subandi (2007) menambahkan jika sebagian pengelola koperasi belum memiliki kepekaan bisnis (*sense of bisnis*). Hal ini akan berdampak pada pengembangan usaha koperasi itu sendiri yang selanjutnya dapat menghambat penyaluran kredit UMK.

Belum optimalnya peran koperasi termasuk lembaga keuangan lainnya, menyebabkan pelaku UMK menggantungkan sumber

dana dari rentenir. Praktek rentenir banyak terjadi pada pasar-pasar yang menysasar para pedagang. Dibanding jenis usaha lain, UMK di Sektor Perdagangan memang paling dekat dengan praktek rentenir. Keuntungan pedagang yang harian, menyebabkan likuiditas keuangannya lebih lancar, sehingga cicilan dan bunga rentenir yang harian bisa langsung dibayarkan. Eksistensi rentenir di pasar-pasar tradisional ini tidak lepas dari paradigma yang berkembang di kalangan para pedagang, bahwa proses pengajuan pinjaman di bank cukup rumit (Kompas, 2017).

B. Probabilitas UMK Mendapatkan Akses Permodalan dari Lembaga Keuangan

Pentingnya permodalan sebagai sumber utama UMK serta besarnya persentase pengaruh kendala pada permodalan menyebabkan perlunya melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas terhadap sumber permodalan. Mengingat data SE2016 Lanjutan hanya melihat dari sisi internal UMK, maka hanya melibatkan variabel-variabel internal. Diharapkan dari faktor internal tersebut mampu menjelaskan faktor eksternal.

Analisis aksesibilitas permodalan ini menjadi sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk mengidentifikasi apakah program dan kebijakan pemerintah telah memberikan hasil yang menggembirakan. Jika belum, faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya akses terhadap sumber daya modal perlu diidentifikasi dan dijadikan bahan masukan bagi penyusunan kebijakan pemerintah ke depannya.

1. Faktor-faktor yang Mendukung Pembiayaan Usaha Mikro Kecil

Beberapa penelitian pernah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas permodalan suatu UMK. Secara umum, karakteristik usaha menjadi faktor yang dominan yang menentukan aksesibilitas permodalan suatu usaha. Pada penelitian yang dilakukan oleh Haryani dan Mulyaqin (2013) yang berjudul "Aksesibilitas Petani Padi Sawah Terhadap Sumber Permodalan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Provinsi Banten", menunjukkan bahwa sebagian besar petani padi sawah di Provinsi Banten menggunakan modal usaha yang bersumber dari modal sendiri atau dengan pinjaman dari lembaga keuangan informal. Kepemilikan sertifikat bagi suatu UMK diperlukan dalam menjaga standar produknya. Kualitas produk bisa dipastikan terpercaya. Selain itu keamanan merek produk dapat tercatat dan terjaga dengan

baik. Bahkan bisa menjadi jaminan untuk bersaing dengan produk luar negeri. Dengan adanya sertifikasi, suatu perusahaan akan semakin kredibel. Dengan adanya pengakuan dari sertifikasi, kemudahan dalam aksesibilitas permodalan tentu akan diperoleh pula.

Track record atau karakter pengusaha, merupakan faktor penting. Pengusaha yang sudah sering berhubungan dengan bank umumnya memiliki akses yang lebih baik untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga pembiayaan, terutama mereka yang memiliki kelancaran dalam pembayarannya. Berbeda dengan pengusaha yang memiliki *track record* yang buruk, tidak akan pernah mendapatkan kepercayaan atau pinjaman dari lembaga pembiayaan yang ada.

Salah satu komponen dari sumber daya manusia pada suatu perusahaan adalah tenaga kerja atau pegawai. Tingkat keahlian tenaga kerja di suatu perusahaan, menjadi ukuran bagi usaha tersebut dalam kemajuannya. Semakin banyak tenaga ahli di suatu perusahaan, memungkinkan perusahaan akan maju, disamping itu, keahlian tenaga kerja di suatu perusahaan juga menjadi tolak ukur kredibilitas perusahaan tersebut.

Tenaga kerja tak lepas dari upah. Semakin maju suatu perusahaan, semakin tinggi pula standard upahnya. Dengan melihat kemampuan suatu perusahaan dalam memberikan upah bagi tenaga kerjanya, dapat diketahui seberapa besar kemampuan perusahaan tersebut.

Hal lain yang penting adalah kemitraan. Pengusaha yang sudah bergabung dengan kelompok usaha tertentu mempunyai

peluang lebih besar untuk dapat mengakses permodalan terutama kredit program maupun bantuan permodalan pemerintah. Dalam penelitiannya, Adinirekso (2011) menyatakan bahwa faktor nonkeuangan yang mempengaruhi akses modal UMK adalah keberadaan relasi atau mitra kerja, seperti supplier barang input. Semakin lama UMKM memiliki relasi ke supplier, maka akses ke perbankan semakin mudah. Implikasinya, upaya-upaya pengembangan UMKM bisa difokuskan pada pengembangan keahlian pengusaha UMKM dalam komunikasi dan informasi untuk mengembangkan *networking* yang kuat.

Sebuah penelitian lain yang berjudul “Analisis Karakteristik Usaha Terhadap Aksesibilitas Pembiayaan Perbankan Kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Provinsi Jawa Timur” menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan atas karakteristik UMK terhadap akses kredit perbankan. Karakteristik tersebut antara lain share market produk usaha, sektor dan skala usaha, lama usaha beroperasi, serta status kepemilikan usaha (Poernamasari, 2015).

Kondisi lain yang mendukung kemudahan akses kredit perbankan diantaranya skala usaha. Usaha skala menengah memiliki peluang yang paling besar untuk mengakses pembiayaan ke perbankan. Usaha skala menengah memiliki kepercayaan yang lebih besar dibandingkan usaha skala mikro dan kecil, karena telah memiliki jumlah aset dan omset lebih besar yang dapat dijadikan sebagai *collateral* bagi pihak perbankan.

Probabilitas UMKM yang memiliki jangkauan bisnis hingga ke luar negeri

lebih besar untuk mendapatkan kredit perbankan dibandingkan UMKM yang hanya memiliki *market share* di lingkup lokal daerah ataupun nasional. Hal ini disebabkan perbankan memiliki pendapat bahwa usaha yang telah melakukan ekspor pasti memiliki *cash flow* keuangan yang lebih baik dibandingkan usaha yang memiliki *market share* domestik.

Di sisi lain, UMKM dengan umur usaha lebih dari 10 tahun akan lebih mudah mengakses pembiayaan ke perbankan. Hal ini dimungkinkan terjadi karena semakin lama perusahaan beroperasi, maka usaha yang berjalan akan dianggap lebih persisten terhadap perubahan negatif yang memengaruhi operasional perusahaan. UMKM yang memiliki badan hukum memiliki probabilitas lebih besar untuk memperoleh pembiayaan usaha dari perbankan dibandingkan usaha perorangan. Penelitian lain dari Wedelia et. al. (2017) mempertegas penemuan pada penelitian sebelumnya bahwa tingkat pendidikan, kepemilikan aset, serta posisi pengusaha sebagai pengelola memiliki pengaruh yang nyata dan positif terhadap pembiayaan formal di Kabupaten Bogor. Pengusaha industri pangan yang memiliki aset lebih besar dari 50 juta akan memiliki peluang aksesibilitas yang lebih besar pada sumber pembiayaan formal. Ini dapat diartikan bahwa aksesibilitas pengusaha pada sumber pembiayaan formal meningkat dengan meningkatnya kekayaan pengusaha. Posisi sebagai pengelola akan memiliki waktu dan kesempatan yang lebih banyak untuk memperoleh informasi mengenai sumber pembiayaan dan memiliki kesempatan yang lebih luas dalam membuat *networking* yang baik dengan pasar. Sehingga posisi pengusaha sebagai pengelola akan memiliki

peluang akses pada sumber pembiayaan formal yang lebih besar.

Pendidikan akan meningkatkan kemampuan pengusaha dalam memahami prosedur kredit yang dikeluarkan oleh lembaga penyalur kredit. Persyaratan pembiayaan dari lembaga penyalur kredit terkadang sulit dipahami oleh sebagian pengusaha kecil sehingga menjadikan mereka sulit mengakses skema kredit yang diinginkan. Hal ini terbukti dari hasil SE2016-Lanjutan, 8,87 persen pengusaha UMK tidak mengajukan kredit karena tidak tahu prosedur (Gambar 3.4). Tingkat pendidikan yang lebih baik menyebabkan mereka lebih aktif dalam mengakses sendiri berbagai sumber informasi mengenai permodalan melalui berbagai macam media sosialisasi, termasuk tatacara dan persyaratan dalam memperoleh kredit perbankan. Salah satu persyaratan kredit diantaranya agunan. Pengusaha yang memiliki agunan berupa sertifikat tanah akan memudahkan akses ke lembaga keuangan formal seperti bank.

Keberpihakan pemerintah dalam mendorong usaha mikro dan kecil untuk tergabung dalam sebuah media komunitas seperti asosiasi dan koperasi akan sangat mendukung kelancaran kinerja, kemudahan akses informasi, perluasan jaringan usaha serta memberikan dampak yang positif terhadap akses permodalan dari lembaga keuangan formal. Selain itu pemerintah juga dapat memberikan sebuah skema khusus yang memberikan peluang bagi UMK untuk dapat memperluas jaringan penjualan hingga ke pasar luar negeri. Harapannya, dengan jaminan area penjualan yang memasok hingga ke mancanegara, skema permodalan dari lembaga keuangan akan lebih tertarik untuk menuangkan

investasinya.

Berikutnya, dengan aksesibilitas internet yang lebih luas tentunya akan memberikan para pengusaha UMK informasi yang lebih banyak dan terkini terkait kebijakan pemerintah yang menyangkut permodalan. Selain itu, dengan meningkatnya skema penjualan berbasis internet atau *e-commerce*, membuat UMK menjadi lahan bisnis yang sangat potensial untuk dapat dikembangkan dan menjadi sasaran skema-skema investasi permodalan dari lembaga keuangan.

Lokasi usaha juga tak kalah penting, UMK yang berada di wilayah perkotaan tentu lebih banyak kemudahan dalam akses ke lembaga keuangan. Majemuknya lembaga keuangan di wilayah kota, merupakan salah satu alasan bagi UMK untuk mendapat kemudahan akses permodalan.

Dari beberapa hasil kajian penelitian, dapat ditarik garis besar, bahwa aksesibilitas permodalan dipengaruhi oleh karakteristik usaha. Karakteristik usaha secara detil dapat didekati dari beberapa variabel yaitu lokasi usaha, status badan usaha, keanggotaan dalam suatu asosiasi, kepemilikan sertifikat usaha, kemitraan, keahlian tenaga kerja, lama usaha, penggunaan internet, laporan keuangan, sistem usaha, keanggotaan koperasi, rata-rata upah UMK, dan skala usaha.

2. Probabilitas Peningkatan Aksesibilitas UMK di Sulawesi Selatan terhadap Lembaga Keuangan

Berdasarkan latar belakang permasalahan

yang didukung oleh temuan hasil pengolahan SE2016-Lanjutan, dapat terlihat bahwa permodalan yang berasal dari lembaga keuangan formal (bank, koperasi, modal ventura) masih kurang dapat diakses oleh usaha mikro kecil di Sulawesi Selatan. Jika sebelumnya disebutkan bahwa permodalan sangat penting bagi kelangsungan kinerja UMK, lantas apa yang menjadi alasan rendahnya aksesibilitas permodalan UMK tersebut? Penyebabnya sangat beragam.

Jika dirangkum dari pengakuan para pelaku UMK lewat hasil SE2016-Lanjutan, tingginya tingkat suku bunga pinjaman hingga kurangnya pengetahuan akan prosedur pengajuan pinjaman usaha adalah dua dari sekian banyak alasan utama mengapa para pengusaha kecil di Sulawesi Selatan tidak menerima kredit dari lembaga keuangan. Sudah menjadi fakta bahwa sebagian besar pelaku UMK adalah masyarakat golongan kelas bawah yang bisa jadi sangat kurang pengetahuannya akan sumber informasi mengenai program-program pemerintah terkait pembiayaan usaha mikro kecil atau pun segala informasi dari lembaga keuangan terkait pinjaman usaha. Sehingga apa yang selama ini diusahakan oleh pemerintah baik melalui kementerian terkait atau pun yang bekerjasama dengan lembaga keuangan terasa masih kurang mampu mengangkat performa UMK.

Untuk lebih mengelaborasi hasil temuan awal di atas, dengan menggunakan data Sensus Ekonomi 2016 Lanjutan, publikasi ini mengestimasi beberapa faktor yang diyakini mempengaruhi peluang suatu usaha mikro kecil dalam usahanya mendapatkan akses ke permodalan dari lembaga keuangan. Tiga hipotesis yang akan dibuktikan dari

estimasi model ini adalah sebagai berikut:

Pengembangan jaringan usaha yang baik lewat keikutsertaan dalam koperasi dan pengalaman menjalin kemitraan berpengaruh positif terhadap peluang suatu UMK mendapatkan modal dari lembaga keuangan.

Kredibilitas usaha yang dapat dilihat dari status badan usaha, Sistem usaha, dan kepemilikan sertifikasi yang baik memperbesar nilai kelayakan suatu UMK untuk mendapatkan kucuran dana segar dari lembaga keuangan.

Administrasi usaha yang baik dengan dicerminkan melalui keberadaan laporan keuangan dan perencanaan pengembangan usaha juga berdampak positif terhadap kemungkinan usaha mikro kecil mendapatkan pinjaman modal usaha dari lembaga keuangan.

Dengan menggunakan teknik estimasi regresi logistik terhadap lebih kurang 68 ribu UMK terpilih, dihasilkan model aksesibilitas permodalan UMK dengan tabel odds ratio seperti pada tabel 3.3.

Hasil estimasi model menunjukkan bahwa aksesibilitas permodalan dari lembaga keuangan formal dipengaruhi oleh karakteristik UMK yang lebih bersifat sebagai faktor eksternal seperti status lokasi, kemitraan dengan perusahaan lain, dan keanggotaan koperasi. Suatu usaha mikro kecil yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain memiliki peluang hampir 2,5 kali lebih besar untuk mendapatkan akses yang lebih besar ke permodalan dari lembaga keuangan ketimbang usaha lain yang tidak menjalin

Tabel 3.3 Tabel Odds Ratio Hasil Estimasi Model Aksesibilitas Permodalan UMK

Variabel	Odds Ratio
Status lokasi (perkotaan/ pedesaan)	1,665
Status badan usaha	1,195
Keanggotaan dalam asosiasi	0,431
Kepemilikan Sertifikat Usaha	0,922
Kemitraan dengan perusahaan lain	2,498
Kepemilikan tenaga kerja ahli (bersertifikat ahli)	0,991
Lama usaha berdiri	1,000
Penggunaan internet	0,987
Keberadaan laporan keuangan	0,700
Sistem Usaha	1,615
Keanggotaan koperasi	1,374
Rata-rata upah UMK	1,000

Sumber : Hasil Pengolahan Data

kemitraan dengan perusahaan lain. Hal ini sangat memungkinkan karena umumnya usaha-usaha yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain memiliki cakupan usaha yang lebih luas, kemampuan meminimalisasi resiko sosial karena adanya *risk sharing*, kemampuan manajemen yang lebih baik karena adanya kerjasama, serta kekuatan perusahaan yang lebih baik dibanding usaha yang berdiri sendiri. Kondisi seperti ini membuat lembaga keuangan melihat ini sebagai sebuah kelebihan yang menjadikannya layak untuk mendapatkan suntikan modal.

Dari hasil olah diketahui bahwa lokasi usaha UMK berpengaruh hampir dua kali lipat terhadap akses permodalan dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan di perkotaan lebih tinggi peluangnya dari akses kredit di pedesaan. Hal ini dapat dimaklumi, karena akses perkotaan dengan segala kemudahan

tentu mempengaruhi kemudahan akses permodalan.

Berikutnya adalah keanggotaan koperasi. Suatu usaha mikro kecil yang tergabung dalam wadah koperasi usaha memiliki peluang sekitar 1,3 kali lebih besar untuk mendapatkan akses yang lebih besar ke permodalan dari lembaga keuangan ketimbang usaha lain yang tidak tergabung ke dalam wadah koperasi. Hal ini sangat memungkinkan karena umumnya usaha-usaha yang menjadi anggota koperasi memiliki cakupan usaha yang lebih luas, manajemen usaha yang lebih baik karena dipantau oleh koperasi yang menaunginya, sehingga lembaga keuangan melihat ini sebagai sebuah kelebihan yang menjadikannya layak untuk mendapatkan suntikan modal. Selain itu, koperasi usaha juga umumnya memberikan layanan simpan pinjam kepada para anggotanya sehingga menjamin akses langsung terhadap permodalan dari lembaga keuangan.

Melihat kemanfaatan koperasi, perhatian pemerintah menjadi penting untuk terus mendorong peran serta dan kemajuan koperasi usaha di Indonesia terutama yang mampu memberikan pelayanan simpan pinjam bagi anggotanya. Berikutnya, pembinaan bagi UMK agar mereka memiliki rencana pengembangan usaha yang terpadu perlu dikembangkan program inkubasi bisnis yang berfungsi untuk menampung aspirasi usaha (*startup business*), memberikan pendampingan, penyuluhan, serta bantuan awal usaha sehingga setiap UMK memiliki perencanaan yang jelas. Harapannya, dengan segala upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan UMK, ke depannya usaha ini akan semakin naik kelas.

Dari hasil estimasi juga diketahui bahwa perusahaan yang berbadan hukum cenderung lebih mudah dalam akses permodalan sekitar 1,19 kali lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak berbadan hukum. Lembaga keuangan cenderung lebih mempercayai perusahaan yang jelas status badan hukumnya. Meskipun UMK merupakan skala kecil dalam omsetnya, namun akan lebih baik menjadikan perusahaan tersebut berada di bawah payung hukum. Keuntungan suatu UMK berbadan hukum, tidak hanya dari segi kemudahan dalam akses mendapatkan modal, namun dalam segala aspek lainnya.

Selanjutnya, semakin lama usia suatu usaha dan semakin besar skala usaha tersebut, maka akan semakin besar pula peluang mendapatkan kucuran modal usaha dari lembaga keuangan. Tentu saja hal-hal tersebut bukanlah sebuah faktor penentu bagi UMK dalam usaha mendapatkan kredit usaha produktif, tapi lebih sebagai profil seperti apa kondisi terkini usaha-usaha mikro dan kecil dalam kaitannya dengan akses terhadap permodalan lembaga keuangan.

Variabel berikutnya adalah sistem pengelolaan usaha, UMK yang mempunyai sistem usaha konvensional, cenderung mudah dalam mendapatkan akses permodalan dibandingkan usaha non konvensional.

Namun ada hal yang menarik untuk diamati lebih lanjut. UMK yang memiliki laporan keuangan justru memiliki peluang untuk menerima kredit usaha lebih kecil dari UMK yang tidak memiliki laporan keuangan (nilai odds ratio kurang dari 1). Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama,

sumber kredit yang dicakup dalam publikasi ini termasuk Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). LKBB seperti koperasi dan pegadaian tidak mengharuskan pengusaha UMK untuk memiliki laporan keuangan. Kedua, UMK yang memiliki laporan keuangan belum tentu diterima pengajuan kreditnya karena bank tetap akan melakukan analisis laporan keuangan usahanya. Bagi usaha yang kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk mendapatkan kredit bisa ditolak pihak bank yang bersangkutan.

Hal menarik lain dalam kajian ini adalah usaha yang tidak memiliki sertifikat ternyata juga memiliki peluang untuk menerima kredit usaha lebih kecil dari UMK yang tidak memiliki laporan keuangan. Meskipun kemanfaatan sertifikat dalam suatu usaha sangat penting.

Berikutnya adalah keikutsertaan UMK dalam asosiasi, ternyata UMK yang tidak masuk dalam asosiasi tidak memiliki masalah dalam akses permodalan. Minimnya tenaga kerja ahli dalam suatu usaha juga tidak mempengaruhi dalam aksesibilitas modal pada lembaga keuangan. Kepemilikan tenaga kerja ahli bukan menjadi hal penting yang disyaratkan pada lembaga keuangan. Akses internet juga tidak begitu berpengaruh dalam aksesibilitas permodalan, terbukti nilai odds rasionya kurang dari 1. Dari semua variabel yang ternyata tidak cukup berpengaruh terhadap akses permodalan, diperlukan kajian lebih dalam lagi, kondisi-kondisi apa yang menyebabkan kecilnya pengaruh variabel-variabel tersebut.



BAB

4

KINERJA USAHA DARI SISI KEUANGAN

Kinerja Usaha dari Sisi Keuangan

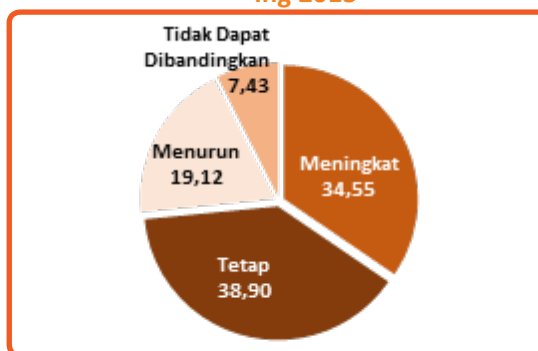
A. Kondisi UMK menurut Laba yang Diperoleh

Besar kecilnya laba suatu perusahaan, dapat menjadi tolak ukur kinerja suatu usaha. Hal ini didasari pada tujuan dari didirikannya suatu perusahaan atau usaha adalah untuk mencapai keuntungan atau laba yang maksimal dengan menggunakan modal yang minimal (Harjito dan Martono, 2011). Variabel lainnya adalah dengan menggunakan Nilai Tambah Ekonomis (*Economic Value Added/EVA*).

Menurut Paul A. Dierks (2000), EVA merupakan ukuran kinerja keuangan yang menggabungkan konsep pendapatan residual dengan prinsip keuangan perusahaan modern. Secara matematis EVA merupakan laba operasi bersih (setelah dikurangi pajak) dikurangi dengan modal yang diinvestasikan dikalikan biaya rata-rata tertimbang modal. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai yang tinggi bagi pemegang saham. Selain dari margin dan EVA kinerja usaha dapat diukur dari menggunakan rasio-rasio keuangan seperti R/C (*Revenue Cost*) rasio yaitu rasio pendapatan terhadap pengeluaran, atau dengan kinerja yang lebih kompleks seperti efisiensi.

Berdasarkan UU no 20 Tahun 2008 tentang UMKM, sebuah aktivitas dinamakan usaha mikro kalau pendapatan setahun kurang dari 300

Gambar 4.1 Persentase UMK menurut Kondisi Laba 2016 dibandingkan 2015



Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan data hasil SE2016-Lanjutan, perolehan laba Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulsel menunjukkan capaian yang positif meskipun ada usaha yang dipandang mengalami penurunan. Sekitar 19 persen pengusaha UMK di Sulsel menyatakan bahwa keuntungan mereka di tahun 2016 menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara lebih dari sepertiga pengusaha mengatakan bahwa peningkatan keuntungan dibanding tahun sebelumnya.

juta rupiah. Sedangkan kategori pendapatan usaha kecil dalam setahun mencapai 300 juta hingga 2,5 miliar rupiah.

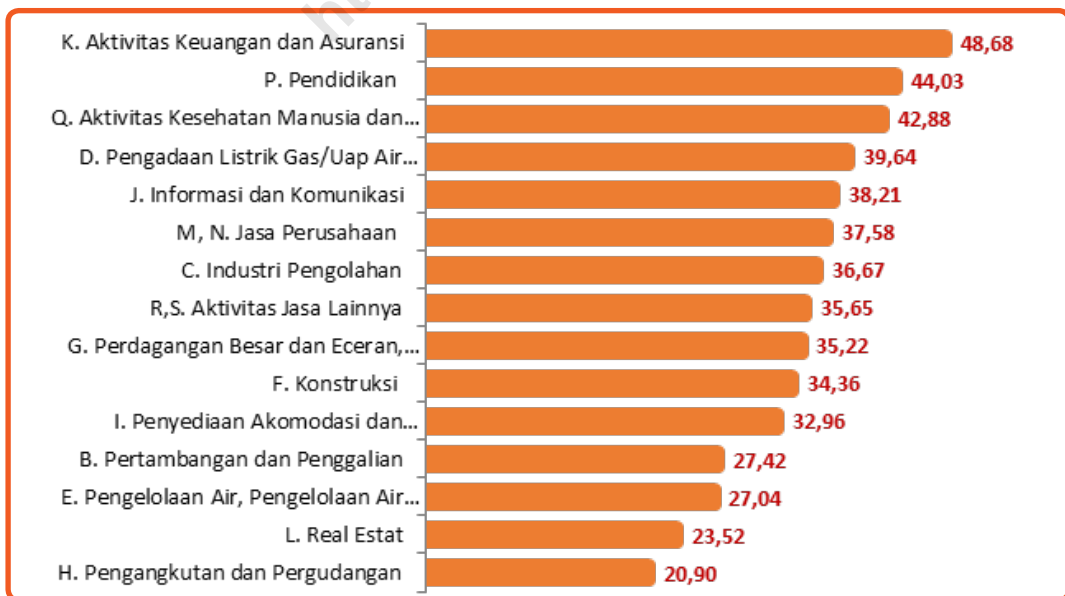
Berdasarkan data hasil SE2016-Lanjutan, perolehan laba Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulsel menunjukkan capaian yang positif meskipun ada usaha yang dipandang mengalami penurunan. Sekitar 19 persen pengusaha UMK di Sulsel menyatakan bahwa keuntungan mereka di tahun 2016 menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara lebih dari sepertiga pengusaha mengatakan bahwa terjadi peningkatan keuntungan dibanding tahun sebelumnya.

Usaha-usaha yang mengalami persentase penurunan laba paling banyak adalah sektor kesenian, hiburan, dan rekreasi diikuti sektor pertambangan dan penggalian. Meskipun di tahun 2016 penurunan laba terjadi di beberapa usaha, peningkatan optimisme usaha tampak semakin membaik dari

tahun ke tahun. Terlihat dari data prospek usaha di tahun 2018, hampir 50 persen pengusaha menganggap prospek usahanya lebih baik di banding tahun sebelumnya, sementara sekitar 30 persen pengusaha menganggap prospek usahanya sama baik. Optimisme ini menjadi angin segar bagi perekonomian Sulsel. Makenya, peluang keberlangsungan usaha di masa depan semakin positif.

Sebaliknya, usaha yang paling banyak mengalami peningkatan laba adalah Aktivitas Keuangan dan Asuransi. Pada dasarnya usaha ini memiliki cara pengelolaan yang relatif paling baik. Hal ini tercermin dari variabel-variabel status badan usaha, penggunaan internet, dan penggunaan komputer. Dengan persentase diatas 60 persen, pengusaha pada sektor ini juga paling banyak yang menyatakan bisnis mereka memiliki prospek yang baik di tahun 2018.

Gambar 4.2 Persentase UMK yang Mengalami Kenaikan Laba Usaha 2016



Sumber : Hasil Pengolahan Data

B. Kinerja UMK Menurut Rasio Pengeluaran terhadap Pendapatan

Selain laba usaha, rasio pengeluaran terhadap pendapatan (*cost to income*) juga digunakan untuk melihat tingkat efisiensi suatu usaha. Semakin rendah rasio suatu usaha maka semakin baik atau semakin menguntungkan usaha tersebut. Secara umum, UMK di Sulsel memiliki rasio pengeluaran terhadap pendapatan sekitar 0,60 artinya tiap 100 rupiah pendapatan, membutuhkan pengeluaran sekitar 60 rupiah.

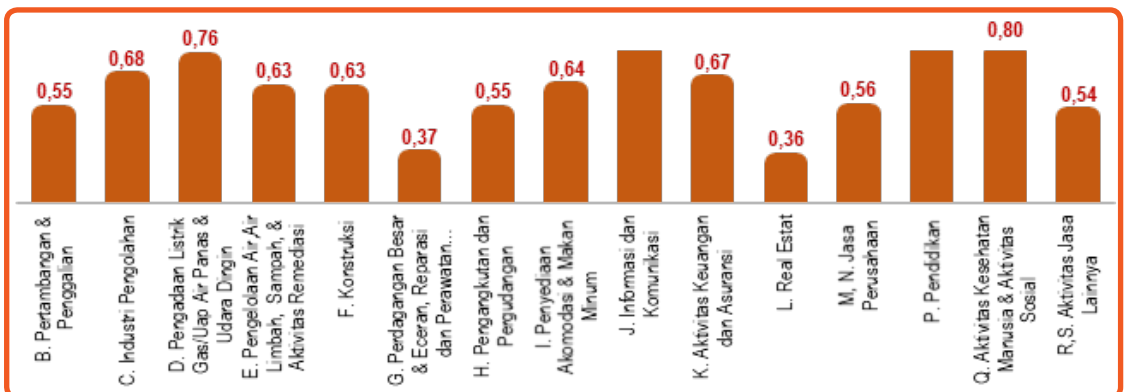
Dari gambar 4.3 diketahui bahwa UMK pada kategori L (Real Estat) merupakan kategori lapangan usaha yang paling menguntungkan dengan rasio sebesar 0,36. Artinya, UMK pada kategori L mampu mendulang pendapatan hingga tiga kali lipat biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, Kategori R,S yang mencakup kategori kesenian, hiburan, rekreasi serta aktivitas jasa lainnya merupakan jenis aktivitas usaha yang rasio pengeluaran terhadap pendapatan terendah berikutnya, mencapai 0,54. Sebaliknya kategori J (Informasi dan Komunikasi) dan kategori

P (Pendidikan) merupakan kategori dengan rasio pengeluaran terhadap pendapatan tertinggi.

Secara wilayah, Palopo merupakan kota dengan rasio pengeluaran terhadap pendapatan terendah di Sulsel (0,34), sementara Pinrang merupakan kabupaten dengan rasio pengeluaran terhadap pendapatan Tertinggi di Sulsel (0,73).

Meskipun tertinggi dalam rasio keuntungan, namun kategori L (*Real Estate*) bukanlah usaha yang memberikan rata-rata balas jasa pekerja yang tertinggi di Sulsel. Aktivitas dengan rata-rata balas jasa tertinggi adalah UMK kategori P. Besarnya keuntungan pada kategori P, berpengaruh terhadap balas jasa pekerjanya. Kategori P memberikan rata-rata balas jasa hampir 29 juta per pekerja pada tahun yang sama. Rasio keuntungan yang cukup rendah pada kategori G ternyata tidak mempengaruhi rata-rata balas jasa pekerjanya, kategori ini hanya mampu memberikan rata-rata balas jasa 12 juta per pekerjanya.

Gambar 4.3 Rasio Pengeluaran terhadap Pendapatan menurut Kategori 2017



Sumber : Hasil Pengolahan Data

Tabel 4.1 Sebaran UMK menurut Kinerja Keuangan di Sulawesi Selatan 2017

Kabupaten/Kota	Banyaknya Usaha	Rasio Pengeluaran Terhadap Pendapatan
[01] KEPULAUAN SELAYAR	15.863	0,62
[02] BULUKUMBA	44.056	0,68
[03] BANTAENG	20.326	0,67
[04] JENEPONTO	41.988	0,59
[05] TAKALAR	409	0,62
[06] GOWA	78.231	0,56
[07] SINJAI	30.222	0,61
[08] MAROS	36.753	0,63
[09] PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	33.154	0,57
[10] BARRU	18.599	0,66
[11] BONE	89.759	0,56
[12] SOPPENG	30.722	0,61
[13] WAJO	62.925	0,62
[14] SIDENRENG RAPPANG	30.967	0,59
[15] PINRANG	39.365	0,73
[16] ENREKANG	19.131	0,60
[17] LUWU	36.768	0,68
[18] TANA TORAJA	18.939	0,71
[22] LUWU UTARA	26.753	0,72
[25] LUWU TIMUR	23.642	0,54
[26] TORAJA UTARA	19.116	0,66
[71] MAKASSAR	125.432	0,56
[72] PAREPARE	16.174	0,66
[73] PALOPO	15.086	0,34
SULAWESI SELATAN	914.871	0,60

Tabel 4.2 Rata-rata Balas Jasa dan Upah Pekerja UMK Nonpertanian Menurut Kategori (Ribu Rupiah) 2017

Kategori	Balas Jasa
B. Pertambangan dan Penggalian	13.006
C. Industri Pengolahan	10.873
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	10.767
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	10.672
F. Konstruksi	19.402
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	12.219
H. Pengangkutan dan Pergudangan	13.994
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	11.381
J. Informasi dan Komunikasi	8.433
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	15.809
L. Real Estat	24.782
M, N. Jasa Perusahaan	11.681
P. Pendidikan	28.993
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	27.394
R,S. Aktivitas Jasa Lainnya	10.548
Total	17.816

Sumber : Hasil Pengolahan Data

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laba UMK

Pada pembahasan bab-bab sebelumnya telah dibahas pentingnya peran UMK bagi perekonomian Indonesia pada umumnya dan Sulsel pada khususnya. Dengan jumlah usaha yang sangat besar, keuntungan yang menjanjikan, serta karakteristik usaha yang pas dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan menjadi tantangan besar para pemegang kebijakan untuk menjadikan UMK sebagai salah satu ujung tombak laju perekonomian regional. Untuk memastikan hal tersebut serta dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban negara berdasarkan Pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, maka penting untuk dapat mengetahui faktor apa saja yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja usaha mikro dan kecil.

Untuk mengukur kinerja UMK, indikator kinerja usaha yang umum digunakan antara lain adalah laba usaha atau omset usaha. Pada publikasi ini, terminologi kinerja yang digunakan adalah laba usaha karena laba atau keuntungan adalah tujuan utama suatu usaha (Putri (2011), Indriyatni (2013), Ilham (2014), Turisbiyanto (2011)). Laba usaha didapatkan dari selisih antara jumlah penjualan/omset dengan biaya yang dikeluarkan. Sementara omset itu sendiri merupakan fungsi dari kuantitas dikalikan dengan tingkat harga. Maka, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kinerja UMK yang diukur dari tingkat laba usaha dipengaruhi oleh tingkat penjualan (omset) serta efisiensi biaya usaha tersebut. Lebih jauh, berdasarkan fungsi produksi *Cobb-Douglas*, maka faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kuantitas produksi dapat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kapital, tenaga kerja, dan produktivitas.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci mengenai kaitan antara variabel-variabel tersebut, maka publikasi ini mengestimasi sebuah model kinerja UMK dengan menggunakan laba usaha sebagai variabel tidak bebas. Variabel utama yang akan diestimasi pengaruhnya terhadap laba usaha adalah variabel yang terkait dengan kapital, tenaga kerja, dan produktivitas. Kapital dapat berupa modal atau aset usaha. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 revisi tahun 2011 pengertian aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan, baik berwujud maupun tidak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut. Dari definisi tersebut, beberapa variabel yang dapat dianggap sebagai aset diantaranya adalah kepemilikan sertifikat usaha, keanggotaan usaha dalam koperasi, bentuk/sistem usaha, serta penjualan secara online.

Sumber daya manusia merupakan elemen yang paling strategis dalam organisasi, harus diakui dan diterima oleh manajemen. Peningkatan produktivitas kerja hanya mungkin dilakukan oleh manusia (Siagian, 2002, p.2). Sehingga faktor tenaga kerja menjadi penting. Tenaga kerja dapat berupa pendidikan pekerja atau jumlah tenaga kerja ahli. Pelatihan dan pembinaan berpengaruh terhadap perkembangan UMKM (Harianto, 2014).

Usaha dengan sistem yang rapi tentu mempengaruhi kinerja usaha. Adanya laporan keuangan menunjukkan kematangan usaha. Variabel laporan

keuangan menjadi variabel berikutnya yang ikut di uji dalam kajian ini. Variabel lain yang akan di uji adalah kemitraan. Usaha yang menjalin kemitraan mempunyai sisi positif terhadap perkembangan usaha, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap laba atau pendapatan usaha.

Semakin lama usaha, semakin bertambah pula pengalaman kerja dalam proses produksinya. Semakin lama pengusaha merintis usahanya, maka akan menambah pendapatan yang diperoleh (Widyastuti, 2015). Lokasi usaha mempunyai berbagai peran dalam mempengaruhi pendapatan. Pemilihan lokasi usaha berarti menghindari sebanyak mungkin seluruh segi-segi negatif yang akan berdampak pada usaha. Tempat yang strategis tentu akan mempengaruhi peningkatan pendapatan suatu usaha.

Untuk mengantisipasi pengaruh dari berbagai faktor lain diluar tiga variabel utama yang akan dikaji, publikasi ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu lama usaha serta lokasi usaha (perdesaan/ perkotaan).

Dengan menggunakan teknik estimasi regresi linear berganda diketahui ada lima variabel uji yang berpengaruh yaitu pendidikan pekerja, akses modal, kepemilikan sertifikasi usaha, lama usaha, dan penjualan online . Dari hasil uji pula didapatkan model kinerja usaha sebagai berikut:

$$\ln(\text{laba}) = 13,944 + 0,006 (\text{sekolah}) + 0,462 (\text{modal}) + 0,889 (\text{sertifikat}) + 0,021 (\text{lama}) + 0,531 (\text{online}) + \text{error}$$

Dari model di atas, kenaikan 1 persen terhadap variabel sekolah akan

meningkatkan laba sebesar 0,006 persen. Variabel sekolah disini adalah persentase pendidikan sekolah menengah dan perguruan tinggi dibanding dengan yang berpendidikan dasar ke bawah. Yang artinya semakin tinggi jenjang pendidikan pekerja, maka akan meningkatkan laba usaha sekira 0,006 persen. Sedangkan kenaikan akses modal sebesar 1 persen akan berkontribusi terhadap peningkatan laba sebesar 0,46 persen. Berikutnya adalah kepemilikan sertifikasi, kenaikan 1 persen dari kepemilikan sertifikasi suatu usaha akan mempengaruhi kenaikan laba nyaris 1 persen. Sementara lama usaha mampu menaikkan peningkatan laba sebesar 0,021 persen, dan terakhir adalah penjualan secara online, setiap kenaikan 1 persen penjualan secara online, mampu meningkatkan laba sekitar 0,53 persen.

Meskipun persentasenya cukup rendah, namun cukup berpengaruh. Dengan demikian, fokus pengembangan UMK dengan menitikberatkan pada pengembangan skil tenaga kerja, skil manajerial, serta berbagai usaha yang meningkatkan produktivitas tetap perlu untuk terus ditumbuh kembangkan. Utamanya variabel dengan persentase yang paling tinggi, seperti kepemilikan sertifikat. Sertifikasi lebih dari sekedar gengsi, sejatinya sertifikasi merupakan bukti resmi kompetensi diri. Usaha yang sudah tersertifikasi resmi akan meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membuka peluang bisnis menjadi lebih lebar, yang tentu saja berujung pada peningkatan laba usaha. Variabel tertinggi berikutnya adalah variabel penjualan secara online. Tak dapat dipungkiri, di era milenial seperti sekarang, perdagangan elektronik (*e-commerce*) menjadi suatu hal yang

biasa dan berperan sangat penting dalam kehidupan masyarakat, tak terkecuali dunia usaha. Berbagai kemudahan yang ditawarkan, mampu menarik konsumen sedemikian rupa untuk lebih memilih melakukan transaksi secara online. Dunia online yang tanpa batas, membuka peluang besar bagi pelaku usaha khususnya UMK untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produknya.

Aset usaha UMK adalah salah satu faktor krusial karena hal ini sangat terkait dengan modal usaha. Kuantitas modal tentu berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha, semakin besar modal usaha, seyogyanya berbanding lurus dengan pendapatan yang diraih. Kemampuan UMK mendapatkan akses modal menjadi penting. Peningkatan volume program-program kemitraan antara UMK dengan

perusahaan-perusahaan besar atau BUMN dapat menjadi salah satu solusi sehingga UMK dapat mengembangkan usaha mereka melalui peningkatan jumlah aset usaha. Solusi lain yang paling penting adalah adanya bantuan kucuran dana modal baik secara langsung dari pemerintah melalui kementerian terkait ataupun melalui lembaga keuangan baik bank maupun non-bank.

Lama usaha menentukan pengalaman, semakin lama usaha maka semakin baik kualitas usaha tersebut (Asmie, 2008). Lama usaha dengan sendirinya juga akan meningkatkan pengetahuan, dan ketrampilan pengusaha, yang memungkinkan peningkatan kreativitas sehingga mampu ekspansi terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan, yang berujung pada peningkatan laba usaha.



BAB

5

PROSPEK DAN KENDALA USAHA

Prospek dan Kendala Usaha

A. Prospek UMK Semakin Baik

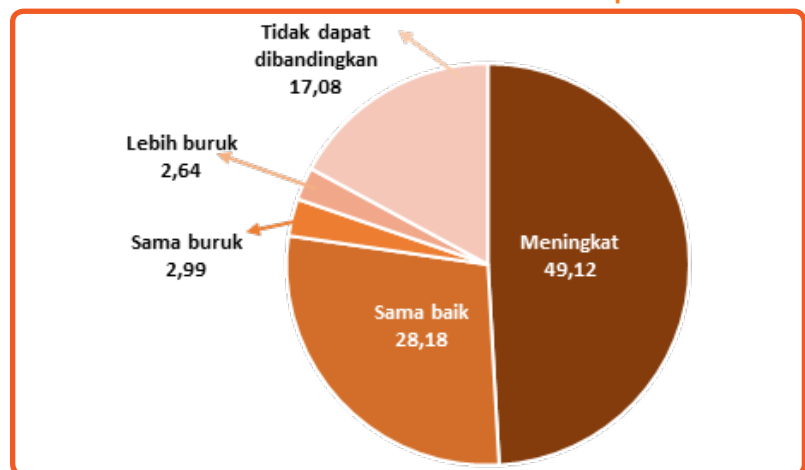
Prospek usaha merupakan gambaran perkembangan usaha dimasa depan. Apabila kinerja ke depan dipandang pesimis oleh pengusaha UMK, maka merupakan *warning* bagi pemerintah untuk lebih memberikan perhatian yang intens terhadap keberadaan usaha-usaha ini di Sulawesi Selatan.

RPJMN 2014-2019 menargetkan adanya peningkatan usaha-usaha yang berpotensi tumbuh dan inovatif, yaitu usaha yang memiliki prospek bagus. Dalam SE2016-Lanjutan, prospek adalah harapan atau kemungkinan, dalam hal ini prospek berkaitan dengan kondisi usaha atau tendensi bisnis di masa mendatang baik dari sisi perolehan keuntungan, atau omset.

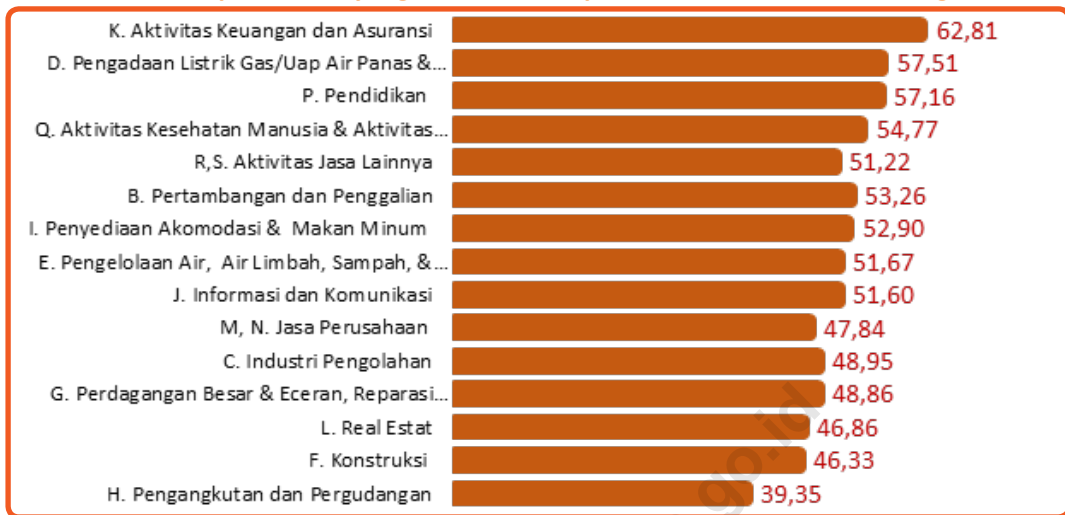
Pengusaha di Sulsel UMK yang menyatakan bahwa usaha mereka akan lebih baik di tahun 2018 ada sekitar 49.12 persen. Sedangkan pengusaha yang mengungkapkan prospek usaha tahun 2018 sama baiknya dengan kondisi tahun 2017 ada sebanyak 28,18 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi UMK pada tahun 2017 (saat

Pengusaha di Sulsel UMK yang menyatakan bahwa usaha mereka akan lebih baik di tahun 2018 ada sekitar 49.12 persen. Sedangkan pengusaha yang mengungkapkan prospek usaha tahun 2018 sama baiknya dengan kondisi tahun 2017 ada sebanyak 28,18 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi UMK pada tahun 2017 (saat pencacahan) berada pada level baik dan optimis akan lebih baik di tahun berikutnya.

Gambar 5.1 Persentase UMK menurut Prospek 2018



Sumber : BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 5.2 Proporsi UMK yang Memiliki Prospek Lebih Baik Menurut Kategori 2017

Sumber : BPS, SE2016-Lanjutan

pencacahan) berada pada level baik dan optimis akan lebih baik di tahun berikutnya.

Jika dilihat dari aktivitas ekonomi, Sektor Pertambangan dan Penggalian, dikatakan sebagai usaha yang paling banyak mengalami penurunan tendensi bisnis di tahun 2018. Sektor ini di tahun 2011, sempat memiliki pertumbuhan PDRB di bawah satu persen. Antara tahun 2016 dan 2017 rata-rata pertumbuhan sektor ini berada di bawah pertumbuhan rata-rata. Pengusaha UMK di kategori Pertambangan dan Penggalian yang menyatakan usaha ini akan memiliki prospek yang lebih buruk di tahun 2018 ada sebanyak 7,16 persen pengusaha. Mayoritas pengusaha pada sektor ini terkendala pada permodalan.

Sektor berikutnya yang paling banyak dinyatakan sebagai usaha yang memiliki kondisi bisnis yang menurun di tahun 2018 adalah kategori Kesenian, Hiburan dan rekreasi. Padahal, pertumbuhan ekonomi yang tercipta dari lapangan usaha ini, selama tahun 2011-2017 selalu di atas rata-

rata. Pada periode tersebut, pertumbuhan PDRB sektor ini di atas 7 persen per tahun. Namun perlu dicatat bahwa PDRB yang tercipta dalam sektor ini adalah akumulasi dari usaha menengah, besar dan UMK. Pertumbuhan ekonomi yang diciptakan bisa saja hanya menggambarkan usaha menengah dan besar karena kontribusinya yang cukup tinggi dalam menghasilkan nilai rupiah jasa yang dihasilkan. UMK aktivitas usaha kesenian, hiburan dan rekreasi dinilai sudah menurun prospeknya karena selain masalah modal, persaingan yang sangat ketat juga menjadi alasan. Hal ini dapat tergambar dari banyaknya pengusaha UMK di sektor ini yang menyatakan bahwa adanya persaingan menjadi kendala utama bisnis di sektor ini.

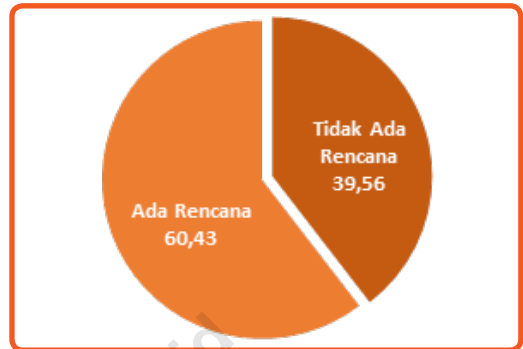
Sebaliknya, aktivitas usaha yang dinilai responden/pengusaha paling prospektif di Sulsel tahun 2018 adalah Kategori K (Aktivitas Keuangan dan Asuransi). Kategori ini mencakup aktivitas keuangan, termasuk asuransi, reasuransi dan kegiatan dana pensiun dan jasa penunjang keuangan.

Selain itu, aktivitas yang tercakup adalah kegiatan dari pemegang aset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis. Pada kategori ini, sebanyak 62,81 persen pengusaha menyatakan bahwa prospek usaha ini akan lebih baik di tahun 2018.

Selain dari prospek usaha, optimisme perbaikan kondisi usaha juga tercermin dalam hal rencana pengembangan usaha. Sekitar 39,5 persen pengusaha berencana untuk mengembangkan bisnisnya. Adapun aspek yang dikembangkan antara lain memperluas tempat usaha, membuka cabang, meningkatkan keahlian, diversifikasi (penganekaragaman) produk, dan lainnya. Dari sejumlah UMK yang akan dikembangkan, mayoritas akan diperluas tempat usaha.

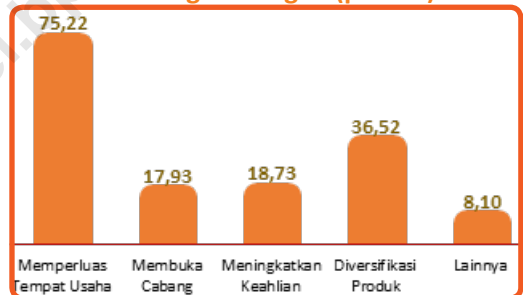
Di sisi lain, sekitar 60,43 persen pengusaha menyatakan tidak ada rencana untuk melakukan pengembangan usaha dengan adanya berbagai alasan. Alasan utama adalah karena kekurangan modal. Alasan utama kedua terbanyak adalah alasan lainnya. Berbagai jawaban responden yang menjawab alasan lainnya antara lain belum merasa perlu untuk mengembangkan usaha, tidak ada tenaga kerja dan sudah memiliki pelanggan tetap yang sudah terbiasa dengan jenis barang/jasa yang ditawarkan, belum siap/mampu, dan adanya pesaing.

Tabel 5.3 Persentase UMK Menurut Ada Tidaknya Rencana Pengembangan Bisnis 2017



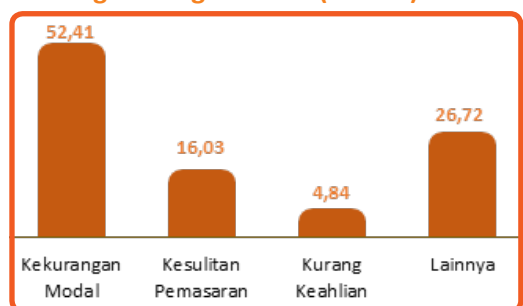
Sumber : BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 5.4 Proporsi UMK yang akan Mengembangkan Bisnis Menurut Jenis Rencana Pengembangan (persen) 2017



Sumber : BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 5.5 Proporsi UMK Menurut Alasan Tidak Berencana Melakukan Pengembangan Bisnis (Persen) 2017



Sumber : BPS, SE2016-Lanjutan

B. Permodalan dan Adanya Pesaing Menjadi Kendala Utama UMK dalam Mengembangkan Bisnis

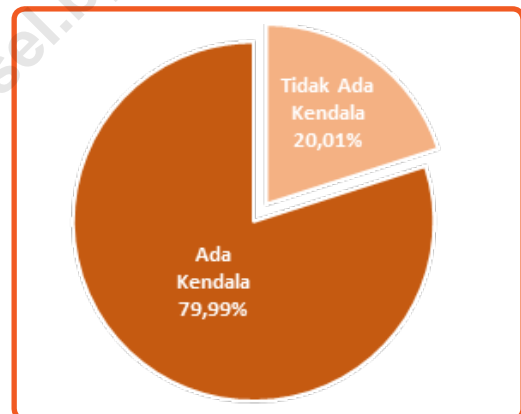
Agar kondisi bisnis ke depan menjadi lebih baik, tentunya diperlukan upaya untuk mengurangi kendala yang dihadapi. Secara umum UMK di Sulawesi Selatan hampir 80 persen memiliki kendala dalam menjalankan usaha. Dari sejumlah UMK yang memiliki kendala, hampir 70 persen di antaranya menyatakan bahwa permodalan merupakan permasalahan utama yang dihadapi.

Selain usaha di bidang pengangkutan dan pergudangan (kategori H), pengusaha di sektor jasa perusahaan yang merupakan gabungan dari kategori M (jasa profesional, ilmiah, dan teknis) dan N (jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya), juga merasakan keberadaan pesaing sebagai kendala utama dalam berusaha. Pada Kategori M membutuhkan suatu tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang tersedia untuk pengguna. Termasuk di dalamnya adalah jasa hukum, akuntansi, konsultasi keuangan, konsultasi lainnya, jasa arsitek,

dan semua bentuk jasa lainnya, yang membutuhkan keahlian dan pengetahuan khusus. Sementara pada kategori N ruang lingkupnya adalah kegiatan yang mendukung operasional usaha atau bisnis secara umum Termasuk didalamnya usaha persewaan kendaraan, mesin, kaset, video, CD, dan semua bentuk persewaan tanpa hak opsi dari pengguna.

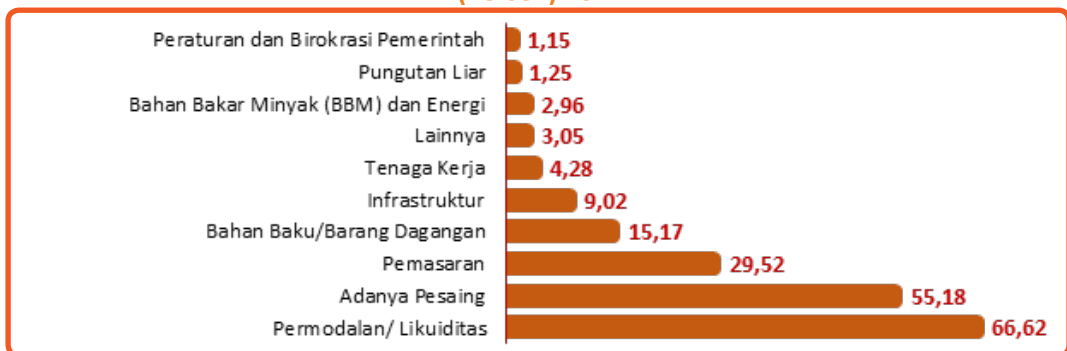
Banyaknya usaha yang tidak berbanding dengan jumlah konsumen mungkin

Tabel 5.6 Persentase UMK Menurut Ada Tidaknya Kendala yang Dihadapi 2017



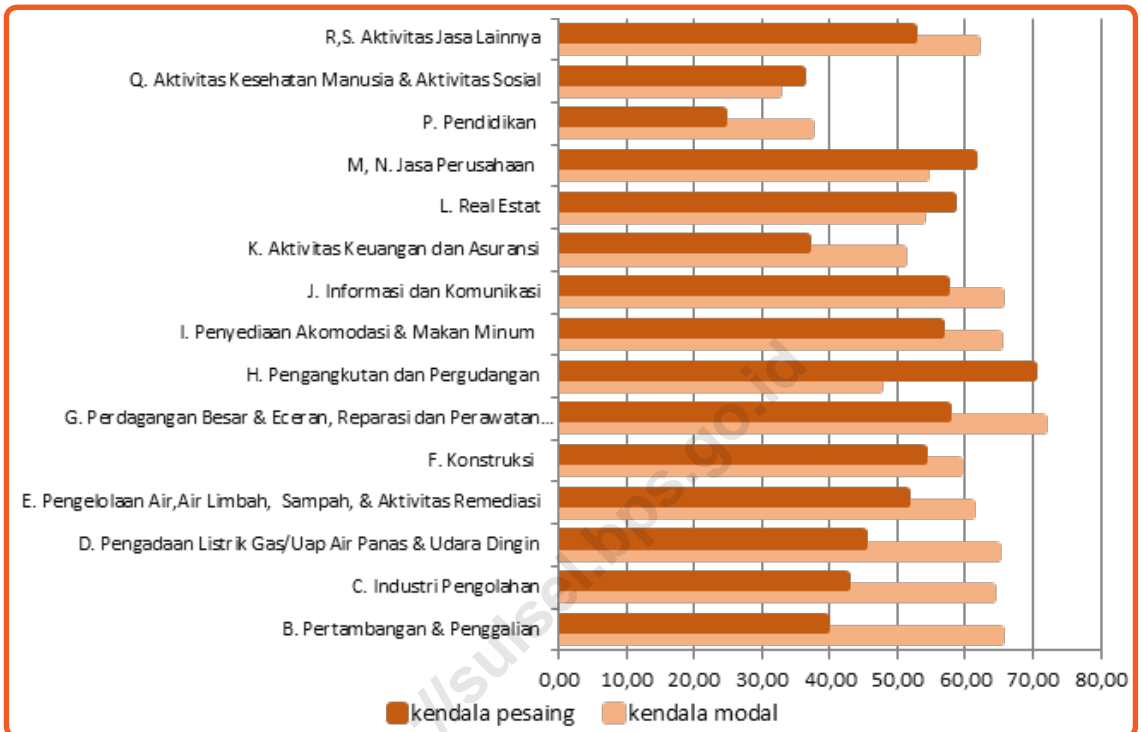
Sumber : BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 5.7 Persentase Kendala Usaha yang Dihadapi UMK Menurut Jenis Kendala (Persen) 2017



Sumber : BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 5.8 Proporsi UMK yang Menyatakan Adanya Kendala Permodalan/Likuiditas dan Adanya Pesaing Menurut Kategori



menyebabkan tingginya persaingan usaha. Di era digital seperti sekarang ini, banyak hal bisa didapatkan secara mudah melalui internet, seperti kaset, video, CD, majalah. Imbasnya berpengaruh besar pada usaha

jasa persewaan. Beberapa jenis usaha yang produksinya dapat diakses dengan mudah melalui internet perlu usaha lebih untuk mengatasi kondisi tersebut.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi UMK Lebih Prospektif

Sulaeman (2010) mengatakan bahwa kemampuan UMKM untuk mampu bersaing terutama di era perdagangan bebas, ditentukan oleh dua kondisi utama. Pertama, lingkungan internal UMKM yang kondusif, mencakup aspek kualitas SDM, penguasaan teknologi dan informasi, struktur organisasi, sistem manajemen, kultur/budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar, dan tingkat kewirausahaan (*entrepreneurship*).

Faktor yang kedua adalah lingkungan eksternal yang kondusif. Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah, aspek hukum, kondisi persaingan pasar, kondisi ekonomi-sosial-kemasyarakatan, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat, dan perubahan ekonomi global. Faktor tersebut dapat menjadi kendala UMK untuk maju.

Hambatan baik eksternal maupun internal di

atas kemudian akan menimbulkan kendala-kendala lain yang sangat berpengaruh dalam perkembangan dan pertumbuhan UMKM, antara lain: pangsa pasar yang lemah, modal yang terbatas, keterbatasan jejaring usaha (Sudoko, 1995). Oleh sebab itu, identifikasi kendala usaha yang dihadapi UMK perlu diidentifikasi dan diselesaikan agar UMK mampu bersaing.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2013 menyebutkan bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dikembangkan dengan berbagai cara, baik yang perlu dilakukan oleh UMK itu sendiri, masyarakat maupun dunia usaha yang lebih besar. Usaha yang perlu dilakukan oleh pelaku UMK antara lain melakukan usaha secara efisien, mengembangkan inovasi dan peluang pasar, memperluas akses pemasaran dan memanfaatkan teknologi. Dari berbagai literatur di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi UMK terhadap prospek usaha dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan internal. Namun, dalam proses pengolahan SE2016-Lanjutan dengan pemodelan statistik, tidak semua faktor signifikan memengaruhi prospek bisnis. Faktor eksternal diwakili oleh

faktor keluhan/kendala usaha, diantaranya berkaitan dengan aturan/birokrasi pemerintah, masalah bahan baku, BBM, infrastruktur, modal, dan pemasaran. Sedangkan faktor internal yang mewakili kondisi kapital, tenaga kerja, dan efisiensi usaha dengan menggunakan variabel aset, jumlah tenaga kerja, dan penggunaan internet untuk pemasaran. Dengan demikian, terdapat hipotesis dalam kajian ini, yaitu:

1. Besarnya aset usaha berpengaruh positif terhadap persepsi prospek UMK.
2. Jumlah tenaga kerja berpendidikan menengah atas berpengaruh positif terhadap persepsi prospek UMK.
3. Penggunaan internet untuk pemasaran berpengaruh positif terhadap persepsi prospek UMK.
4. Kendala/keluhan usaha berpengaruh negatif terhadap persepsi prospek UMK.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa faktor internal seluruhnya berpengaruh positif, misalnya jumlah aset usaha. Pertumbuhan aset sebesar 1 persen akan meningkatkan peluang UMK tersebut untuk memiliki prospek yang lebih baik/sama

Tabel 5.1 Proporsi UMK yang Menyatakan Adanya Kendala Usaha Menurut Jenis Kendala (Persen) 2017

	Variabel	Odds Ratio
Faktor Internal	Aset	1,098
	Jumlah tenaga kerja	1,314
	Akses internet	1,257
Faktor Eksternal (kendala yang dirasakan)	Ada kendala peraturan dan birokrasi pemerintah	0,519
	Ada kendala penyediaan barang baku/barang dagangan	0,957
	Ada kendala perolehan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan energi	0,844
	Ada kendala infrastruktur	0,914
	Ada kendala permodalan	0,917
	Ada kendala pemasaran	0,391

baiknya di tahun 2018. Pertumbuhan tenaga kerja sebesar 1 persen juga meningkatkan persepsi tendensi bisnis yang membaik.

Dalam pengembangan usaha, inovasi dan penggunaan teknologi sangatlah penting. Saat ini teknologi informasi berkembang dengan pesat. Teknologi informasi sudah masuk ke semua bidang, termasuk dalam dunia usaha. Manfaat bagi dunia usaha adalah untuk mendukung proses menjalankan usaha untuk dapat mencapai keunggulan kompetitif. Salah satu penggunaan teknologi adalah penggunaan internet. UMK yang memanfaatkan internet dalam usahanya memberikan peluang UMK untuk memiliki prospek usaha yang positif 1,257 kali. Dengan akses penguasaan teknologi yang mumpuni dan mengikuti perkembangan jaman, prospek UMK akan menjadi lebih baik di masa mendatang.

Lebih lanjut faktor-faktor eksternal seluruhnya berpengaruh negatif terhadap persepsi pengusaha tentang prospek usahanya. Masalah pemasaran menjadi faktor utama pengusaha untuk berpendapat bahwa usahanya tidak memiliki prospek yang bagus. Hal ini terlihat dari nilai odds rasionya yang paling rendah. Kendala pemasaran termasuk di dalamnya adalah

tidak adanya biaya untuk melakukan promosi, tidak ada alat transportasi yang mendukung, persepsi konsumen tentang produk yang dihasilkan/dijual yang kurang dapat diminati konsumen.

Selanjutnya, kendala kedua yang menghambat prospek usaha di masa depan adalah kendala terkait dengan birokrasi pemerintah seperti dalam pengurusan izin usaha dan pengurusan/pelaporan administrasi, termasuk juga waktu yang lama dan prosedur yang cukup banyak dalam pengurusan/pelaporan administrasi. Adanya peraturan tersebut menyulitkan dalam pengembangan usaha.

Kendala ketiga yang paling banyak memengaruhi UMK prospektif atau tidak adalah ketersediaan bahan bakar dan energi. Energi yang dimaksud adalah listrik, batu bara, gas, dsb. Sedangkan kendala yang dimaksud antara lain kelangkaan sumber daya tersebut, harga yang mahal, sulit dijangkau/diperoleh, dll. Sementara itu, kendala lain yang dirasakan oleh pelaku UMK dan berpengaruh pada prospek usaha adalah penyediaan barang baku/barang dagangan, kendala infrastruktur, dan masalah permodalan. Namun jenis kendala tersebut pengaruhnya relatif kecil.

BAB

6

**KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI
KEBIJAKAN**

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

A. Kesimpulan

Dunia usaha di Sulawesi Selatan pada saat ini masih didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK). Dari hasil SE2016-Lanjutan, jumlah usaha ini mencapai hampir 915 ribu usaha atau 98,90 persen dari total usaha nonpertanian di Sulawesi Selatan. Usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja di Sulawesi Selatan sekitar 85,29 persen. Sehingga, UMK merupakan andalan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.

UMK memiliki ciri khas usaha yang fleksibel, yang di satu sisi memberikan keuntungan ditengah badai krisis yang telah menerpa Indonesia pada beberapa tahun yang lalu. Usaha UMK sangat elastis, mudah merubah produk usaha, berinovasi, berimprovisasi menyesuaikan kondisi sesuai situasi usaha, peluang dan lainnya. Pengelolaan usaha ini dilakukan secara sederhana dan memerlukan modal yang relatif kecil. Tempat usaha pun tidak harus selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah, dan dapat dilakukan di dalam rumah.

Namun di sisi lain, UMK mempunyai banyak keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan tersebut diantaranya minimnya akses perbankan; kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah; penggunaan teknologi yang terbatas; dan belum mampu mengimbangi perubahan selera konsumen, khususnya yang berorientasi ekspor.

Jumlah UMK yang tidak berbadan usaha masih sangat mendominasi yaitu mencapai hampir 95 persen. Mayoritas UMK juga belum menggunakan komputer dan memanfaatkan internet. Hanya sekitar 5 persen UMK yang menggunakan komputer dan 7 persen yang memanfaatkan internet. Selain itu, hanya sedikit UMK yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain (sekitar 8 persen).

Secara umum kualitas pendidikan pengelola UMK pun masih rendah. Lebih dari 40 persen pengusaha UMK berpendidikan SD

UMK memiliki ciri khas usaha yang fleksibel, yang di satu sisi memberikan keuntungan ditengah badai krisis yang telah menerpa Indonesia pada beberapa tahun yang lalu. Usaha UMK sangat elastis, mudah merubah produk usaha, berinovasi, berimprovisasi menyesuaikan kondisi sesuai situasi usaha, peluang dan lainnya. Pengelolaan usaha ini dilakukan secara sederhana dan memerlukan modal yang relatif kecil. Tempat usaha pun tidak harus selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah, dan dapat dilakukan di dalam rumah.

atau tidak tamat SD. Pengelola dengan pendidikan SMA dan SMK sekitar 28 persen. Sementara jenjang perguruan tinggi hanya sekitar 11 persen. Di samping itu, UMK yang pernah mengikutsertakan pekerjaanya dalam pelatihan hanya 4 persen.

Permodalan merupakan faktor produksi utama yang harus ada pada setiap proses produksi atau usaha. Oleh sebab itu, akses kredit dari lembaga keuangan merupakan hal yang penting agar UMK dapat meningkatkan kapasitas usahanya. Sayangnya, hanya sedikit usaha yang memperoleh/mengajukan kredit ke lembaga keuangan. Alasan UMK tidak memperoleh kredit melalui lembaga keuangan utamanya karena bunga tinggi, tidak memiliki agunan, tidak tahu prosedur, prosedur sulit, dan usulan ditolak.

Terdapat beberapa faktor pengusaha UMK yang mengajukan kredit dan berhasil memperolehnya. Faktor tersebut utamanya karena faktor profesionalisme dan performa usaha yang tercermin dari keanggotaan koperasi, kemitraan dengan perusahaan lain, keberadaan laporan keuangan, adanya rencana pengembangan, kepemilikan asset, dan nilai omset.

Selain itu, karakteristik pengusaha dan usaha menjadi faktor pembeda antara usaha yang berhasil memperoleh kredit dengan usaha yang tidak memperoleh kredit. Faktor tersebut adalah jenis kelamin dan pendidikan pengusaha, lokasi (perkotaan/pedesaan), skala usaha, lama beroperasi, dan status badan usaha. Usaha yang pengelolanya perempuan dan berpendidikan lebih dari SD, lokasi di pedesaan, sudah lama beroperasi dan sudah memiliki bentuk badan usaha,

memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh kredit.

Selanjutnya, untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMK, selayaknya perlu ada peningkatan kinerja usaha. Hal ini dapat diukur dengan beragam cara, salah satunya adalah dengan melihat laba usaha. Berdasarkan data hasil SE2016-Lanjutan, perolehan laba Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menunjukkan capaian yang positif. Sepertiga pengusaha UMK di Sulawesi Selatan menyatakan bahwa keuntungan mereka di tahun 2016 meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sektor UMK di Sulawesi Selatan juga secara nasional mampu menghasilkan omset/pendapatan mencapai lebih dari Rp 165 triliun.

Hasil SE2016-Lanjutan menunjukkan bahwa perolehan laba usaha dipengaruhi oleh pendidikan pekerja, akses modal, kepemilikan sertifikasi usaha, lama usaha, dan penjualan online. Semakin banyak pekerja dengan pendidikan menengah keatas di suatu perusahaan, laba usaha juga semakin meningkat. Kemampuan suatu usaha memperoleh kredit usaha, menunjukkan kemampuannya dalam akses modal, besar kecilnya modal turut mempengaruhi besar kecilnya pendapatan. Kualifikasi usaha salah satunya melalui sertifikasi usaha. Usaha yang sudah tersertifikasi resmi akan meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membuka peluang bisnis menjadi lebih lebar, yang tentu saja berujung pada peningkatan laba usaha.

Lama usaha turut berperan dalam peningkatan laba usaha. Lama usaha mempengaruhi stabilitas dan kemampuan

suatu usaha. Semakin lama usaha berdiri, semakin solid dan mumpuni suatu usaha memproduksi dan berkembang. Berikutnya adalah penjualan online. Perusahaan yang melakukan penjualan secara online, ternyata mampu menaikkan laba usaha.

Untuk meningkatkan potensi UMK di masa mendatang perlu diidentifikasi prospek yang dirasakan oleh pengusaha dan faktor pendorongnya. Dalam SE2016-Lanjutan, prospek adalah harapan atau kemungkinan,

B. Rekomendasi Kebijakan

Pelaku UMK yang mayoritas berpendidikan rendah dan memiliki jiwa kewirausahaan yang rendah perlu diberikan pelatihan, yaitu terkait dengan motivasi usaha (jiwa kewirausahaan), kemampuan manajerial (pemasaran, produksi, SDM, keuangan), dan kemampuan dalam aspek teknis (fashion, perbengkelan, budi daya pertanian, dsb). Di samping itu, pelaku UMK perlu diperbaiki mindsetnya. Mindset UMK harus diubah untuk selalu mengembangkan usaha, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja. Dengan demikian, usahanya bisa lebih berkembang dan naik kelas. Untuk meningkatkan kapabilitas pelaku UMK, jejaring usaha juga sangat penting karena umumnya masalah UMK disebabkan oleh minimnya pendampingan dan penyuluhan. Pendampingan sangat bermanfaat bagi UMK untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pengembangan usaha. Salah satu bentuk pendampingan adalah membuat laporan keuangan, karena laporan keuangan merupakan syarat untuk mendapatkan modal dari bank.

UMK yang mengakses internet dan menggunakan komputer masih sangat

dalam hal ini prospek berkaitan dengan kondisi usaha atau tendensi bisnis ke depan baik dari sisi perolehan keuntungan, atau omset. Pengusaha UMK yang menyatakan bahwa usaha mereka akan lebih baik di masa mendatang ada sekitar 49 persen. Hal ini menggambarkan kondisi yang cukup menggembirakan. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi prospek usaha, tenaga kerja merupakan faktor tertinggi yang mampu meningkatkan peluang UMK untuk memiliki prospek yang positif.

sedikit. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah, apalagi di era industri 4.0 sekarang ini UMK harus dilatih untuk beradaptasi, sehingga mampu dan tidak kalah bersaing di era dimana semua serba digital. Hal ini bisa menjadi rekomendasi untuk peningkatan penyediaan infrastruktur informasi. Jika pada saat ini teknologi digital dalam usaha belum dimanfaatkan secara optimal, maka ke depannya produk dari luar negeri akan menguasai pasar. Terlebih lagi sistem pemasaran saat ini sudah banyak menggunakan sistem online sehingga wilayah pemasaran menjadi tidak terbatas. Dimana sistem tersebut cukup signifikan dalam mendongkrak laba usaha.

Terkait dengan permasalahan akses UMK terhadap kredit yang sangat rendah, salah satunya dikarenakan karena syarat-syarat untuk mendapatkan kredit UMK tidak mudah. Hal ini yang menyebabkan akses ke lembaga keuangan formal menjadi sangat minim. Sebagai contoh, kredit UMK mensyaratkan adanya ketersediaan laporan keuangan, sementara hanya sekitar 5 persen saja UMK yang membuat laporan keuangan tersebut, akibatnya UMK sulit

mengakses modal dari bank.

Untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit lembaga keuangan formal, penguatan peran lembaga keuangan mikro dan koperasi menjadi sangat penting dan strategis. Peran koperasi dalam pemberian modal terbukti memberikan pengaruh yang paling besar. Koperasi paling banyak membantu UMK karena keberadaannya cukup banyak. Oleh sebab itu, program perluasan koperasi UMKM yang telah dicanangkan oleh pemerintah perlu terus diperkuat.

Selanjutnya, dari sisi kinerja usaha yang tergambar dari laba, faktor yang paling berpengaruh adalah nilai aset. UMK yang memperoleh laba usaha yang minim utamanya dikarenakan pengelolaan keuangan yang menyatu dengan keuangan keluarga. Hal ini didasari atas motivasi berusaha yang umumnya berawal dari keinginan menambah kondisi keuangan rumah tangga. Secara umum UMK tidak akan mengejar kondisi yang lebih baik (laba lebih banyak) jika apa yang didapatkan sudah mampu memenuhi kebutuhan

keluarga. Oleh sebab itu, perubahan mindset dan strategi bisnis dari pelaku UMK perlu memerhatikan orientasi kewirausahaan dan budaya organisasi.

Terakhir, untuk meningkatkan kinerja dan prospek usaha, perlu dilakukan pendekatan aglomerasi. Karena faktor utama yang memengaruhi prospek usaha adalah pemasaran. Misalnya UMK dengan jenis produk yang sama atau bahan input yang sama mengumpul di suatu tempat, sehingga akan memudahkan konsumen untuk membeli produk tertentu. Dengan adanya aglomerasi juga akan menguntungkan pihak UMK, karena akan tercipta sinergi antar mereka. Di sisi lain, dengan aglomerasi, pendampingan maupun bantuan bagi UMK pun akan lebih mudah.

Selain itu, dalam melakukan pemasaran, UMK perlu didorong untuk melakukan sistem online. Dengan perkembangan dunia digital, wilayah pemasaran seharusnya tidak terbatas. Hal ini menjadi kesempatan emas bagi UMK untuk mengembangkan jangkauan distribusi produknya.



L

LAMPIRAN

Lampiran 1
Banyaknya UMK menurut Lapangan Usaha
dan Jenis Kelamin Pengusaha/Penanggungjawab

Lapangan Usaha / <i>Industrial Category</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
B. Pertambangan dan Penggalian	2.206	128	2.334
C. Industri Pengolahan	74.568	57.709	132.277
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	935	470	1.405
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	1.434	389	1.823
F. Konstruksi	11.989	373	12.362
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	211.446	305.713	517.159
H. Pengangkutan dan Pergudangan	61.597	661	62.258
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	36.868	54.525	91.393
J. Informasi dan Komunikasi	8.926	15.401	24.327
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	1.542	1.077	2.619
L. Real Estat	1.813	1.418	3.231
M, N. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis & Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	8.977	3.386	12.363
P. Pendidikan	7.793	12.020	19.813
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	2.264	3.557	5.821
R, S. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi & Aktivitas Jasa Lainnya	16.730	8.956	25.686
Jumlah	449.088	465.783	914.871

Lampiran 2
Banyaknya UMK Menurut Wilayah
dan Jenis Kelamin Pengusaha/Penanggungjawab

Kabupaten/Kota	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Selayar	8.401	7.462	15.863
Bulukumba	20.182	23.874	44.056
Bantaeng	11.070	9.256	20.326
Jeneponto	21.483	20.505	41.988
Takalar	21.816	19.084	40.900
Gowa	44.816	33.415	78.231
Sinjai	13.297	16.925	30.222
Maros	18.180	18.573	36.753
Pangkajene dan Kepulauan	16.357	16.797	33.154
Barru	8.407	10.192	18.599
Bone	36.565	53.194	89.759
Soppeng	14.018	16.704	30.722
Wajo	26.620	36.305	62.925
Sidenreng Rappang	14.770	16.197	30.967
Pinrang	17.342	22.023	39.365
Enrekang	8.860	10.271	19.131
Luwu	16.605	20.163	36.768
Tana Toraja	10.794	8.145	18.939
Luwu Utara	14.581	12.172	26.753
Luwu Timur	12.192	11.450	23.642
Toraja Utara	10.816	8.300	19.116
Makassar	67.011	58.421	125.432
Parepare	7.722	8.452	16.174
Palopo	7.183	7.903	15.086
Sulawesi Selatan	449088	465783	914871

Lampiran 3
Banyaknya UMK Menurut Lapangan Usaha
dan Status Badan Usaha Usaha/Perusahaan

Lapangan Usaha / <i>Industrial Category</i>	PT/PT Persero/Perum	CV	Firma	Koperasi/Dana Pensiun	Yayasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C. Industri Pengolahan	149	955	57	260	47
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	-	67	-	47	-
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	-	1	-	-	-
F. Konstruksi	52	1.910	10	18	6
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	2.092	112	847	139
H. Pengangkutan dan Pergudangan	-	414	23	89	-
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	284	10	62	44
J. Informasi dan Komunikasi	-	106	-	7	-
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	24	-	1.071	71
L. Real Estat	-	22	-	-	26
M, N. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis & Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	-	386	24	16	25
P. Pendidikan	-	44	-	-	6.411
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	6	6	79
R, S. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi & Aktivitas Jasa Lainnya	-	208	3	36	54
Jumlah	201	6.513	245	2.459	6.902

Lampiran 3
Banyaknya UMK Menurut Lapangan Usaha
dan Status Badan Usaha/Perusahaan (Lanjutan)

Lapangan Usaha	Ijin Khusus dari instansi berwenang	Perwakilan perusahaan/ lembaga asing	Tidak berbadan usaha	Jumlah
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)
B. Pertambangan dan Penggalan	189	-	2.145	2.334
C. Industri Pengolahan	4.344	-	126.465	132.277
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	60	-	1.231	1.405
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	78	-	1.744	1.823
F. Konstruksi	-	-	10.366	12.362
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	13.560	215	500.194	517.159
H. Pengangkutan dan Pergudangan	911	-	60.821	62.258
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	2.451	-	88.542	91.393
J. Informasi dan Komunikasi	463	-	23.751	24.327
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	285	-	1.168	2.619
L. Real Estat	44	-	3.139	3.231
M, N. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis & Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	971	-	10.941	12.363
P. Pendidikan	4.657	33	8.668	19.813
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	2.609	-	3.121	5.821
R, S. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi & Aktivitas Jasa Lainnya	1.032	-	24.353	25.686
Jumlah	31.654	248	866.649	914.871

Lampiran 4
Banyaknya UMK Menurut Wilayah
dan Status Badan Usaha/Perusahaan

Kabupaten/Kota	PT/PT Persero/ Perum	CV	Firma	Koperasi/Dana Pensiun	Yayasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Selayar	2	104	-	25	44
Bulukumba	2	333	-	115	455
Bantaeng	-	136	3	55	102
Jeneponto	21	254	-	206	346
Takalar	-	221	-	169	210
Gowa	35	364	38	251	579
Sinjai	7	204	-	54	204
Maros	22	155	-	97	296
Pangkajene dan Kepulauan	-	114	-	69	194
Barru	-	98	-	24	154
Bone	-	585	6	299	598
Soppeng	-	210	-	101	202
Wajo	6	396	-	78	241
Sidenreng Rappang	-	202	-	5	189
Pinrang	14	235	15	40	200
Enrekang	-	159	17	85	276
Luwu	-	76	-	57	377
Tana Toraja	-	86	23	33	230
Luwu Utara	-	106	-	39	180
Luwu Timur	5	179	57	39	220
Toraja Utara	-	81	-	69	121
Makassar	86	1.914	86	427	1.258
Parepare	-	176	-	78	90
Palopo	1	125	-	44	136
Sulawesi Selatan	201	6.513	245	2.459	6.902

Lampiran 4
Banyaknya UMK Menurut Wilayah
dan Status Badan Usaha/Perusahaan (lanjutan)

Kabupaten/Kota	Ijin Khusus dari instansi berwenang	Perwakilan perusahaan/ lembaga asing	Tidak berbadan usaha	Jumlah
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kepulauan Selayar	256	-	15.432	15.863
Bulukumba	1.419	-	41.732	44.056
Bantaeng	310	-	19.720	20.326
Jeneponto	1.649	-	39.512	41.988
Takalar	883	-	39.417	40.900
Gowa	1.945	-	75.019	78.231
Sinjai	1.554	46	28.153	30.222
Maros	2.042	-	34.141	36.753
Pangkajene dan Kepulauan	872	-	31.905	33.154
Barru	413	-	17.910	18.599
Bone	3.055	55	85.161	89.759
Soppeng	1.003	-	29.206	30.722
Wajo	1.334	-	60.870	62.925
Sidenreng Rappang	1.882	46	28.643	30.967
Pinrang	1.058	-	37.803	39.365
Enrekang	522	-	18.072	19.131
Luwu	2.093	-	34.165	36.768
Tana Toraja	863	-	17.704	18.939
Luwu Utara	916	-	25.512	26.753
Luwu Timur	474	-	22.668	23.642
Toraja Utara	989	7	17.849	19.116
Makassar	5.155	94	116.412	125.432
Parepare	565	-	15.265	16.174
Palopo	402	-	14.378	15.086
Sulawesi Selatan	31.654	248	866.649	914.871

Lampiran 5
Banyaknya UMK Menurut Lapangan Usaha dan Jenjang Pendidikan Tinggi
yang Ditamatkan Pengusaha/Penanggungjawab

Lapangan Usaha	Tidak Tamat SD	SD dan Sederajat	SMP dan Sederajat	SMA/ Madrasah Aliyah/ Paket C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B. Pertambangan dan Penggalian	639	735	414	465
C. Industri Pengolahan	28.353	41.447	22.863	27.625
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	35	69	119	618
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	682	527	254	272
F. Konstruksi	1.543	3.600	2.614	2.984
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	76.394	143.053	105.227	139.419
H. Pengangkutan dan Pergudangan	12.569	22.023	13.809	11.336
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	10.930	23.054	19.438	26.469
J. Informasi dan Komunikasi	713	2.724	4.199	10.544
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	73	80	179	829
L. Real Estat	285	379	531	1.018
M, N. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis & Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	371	1.263	1.324	4.465
P. Pendidikan	137	246	225	1.661
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	298	223	260	465
R, S. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi & Aktivitas Jasa Lainnya	1.985	4.449	4.587	9.491
Jumlah	135.007	243.872	176.043	237.661

Lampiran 5
Banyaknya UMK Menurut Lapangan Usaha dan Jenjang Pendidikan Tinggi
yang Ditamatkan Pengusaha/Penanggujawab (Lanjutan)

Lapangan Usaha	SMK	Diploma I/ II/III	Diploma IV/ S1	S2/S3	Jumlah
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
B. Pertambangan dan Penggalian	13	12	42	14	2.334
C. Industri Pengolahan	3.943	1.331	6.143	572	132.277
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	75	28	421	40	1.405
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	15	17	56	-	1.823
F. Konstruksi	472	119	969	61	12.362
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	11.662	7.726	31.315	2.363	517.159
H. Pengangkutan dan Pergudangan	1.149	318	921	133	62.258
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	2.546	1.458	6.507	991	91.393
J. Informasi dan Komunikasi	834	1.012	4.180	121	24.327
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	70	139	999	250	2.619
L. Real Estat	89	108	692	129	3.231
M, N. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis & Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	383	504	3.396	657	12.363
P. Pendidikan	130	709	13.636	3.069	19.813
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	71	940	2.414	1.150	5.821
R, S. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi & Aktivitas Jasa Lainnya	1.469	773	2.635	297	25.686
Jumlah	22.921	15.194	74.326	9.847	914.871

Lampiran 6
Banyaknya UMK menurut Wilayah dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Pengusaha/Penanggungjawab

Kabupaten/ Kota	Tidak Tamat SD <i>Not Completed Elementary School</i>	SD dan Sederajat <i>Elementary School and equivalent</i>	SMP dan Sederajat <i>Junior High School and equivalent</i>	SMA/Madrasah Aliyah/Paket C <i>Senior High School and equivalent</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kepulauan Selayar	2.704	5.387	2.600	3.057
Bulukumba	7.101	11.948	7.557	12.886
Bantaeng	4.844	6.612	3.257	3.577
Jeneponto	10.529	11.358	7.785	7.613
Takalar	7.809	9.509	7.733	11.432
Gowa	11.367	17.908	17.042	22.261
Sinjai	4.814	8.989	5.590	7.516
Maros	8.029	9.586	5.618	9.085
Pangkajene dan Kepulauan	6.467	10.577	4.873	7.129
Barru	2.251	4.886	3.209	5.059
Bone	14.319	33.060	16.474	17.280
Soppeng	3.705	8.371	6.846	7.791
Wajo	13.477	26.129	10.097	8.726
Sidenreng Rappang	3.107	9.269	8.173	7.463
Pinrang	5.179	11.159	8.099	10.419
Enrekang	1.528	3.581	4.019	6.703
Luwu	3.912	9.501	7.456	10.847
Tana Toraja	1.542	3.007	4.481	6.345
Luwu Utara	3.270	8.155	5.830	6.430
Luwu Timur	3.004	6.078	5.047	6.523
Toraja Utara	2.415	3.407	3.593	5.116
Makassar	10.895	20.423	24.031	43.250
Parepare	1.546	2.514	3.695	5.740
Palopo	1.193	2.458	2.938	5.413
Sulawesi Selatan	135.007	243.872	176.043	237.661

Lampiran 6
Banyaknya UMK menurut Wilayah dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Pengusaha/Penanggungjawab (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	(SMK) <i>Vocational High School</i>	Diploma I/II/III <i>Diploma I / II / III degree</i>	Diploma IV/S1 <i>Diploma IV / Bachelor degree</i>	S2/S3 <i>Master / Doctoral degree</i>	Jumlah Total
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kepulauan Selayar	431	415	1.186	83	15863
Bulukumba	485	571	3.234	274	44056
Bantaeng	414	283	1.148	191	20326
Jeneponto	902	613	2.720	468	41988
Takalar	899	569	2.711	238	40900
Gowa	2.254	1.318	5.408	673	78231
Sinjai	271	422	2.269	351	30222
Maros	755	621	2.732	327	36753
Pangkajene dan Kepulauan	888	754	2.245	221	33154
Barru	502	366	1.983	343	18599
Bone	593	1.015	6.210	808	89759
Soppeng	650	499	2.569	291	30722
Wajo	461	430	3.138	467	62925
Sidenreng Rappang	616	182	1.868	289	30967
Pinrang	818	617	2.746	328	39365
Enrekang	592	373	2.074	261	19131
Luwu	809	784	2.970	489	36768
Tana Toraja	1.011	279	2.110	164	18939
Luwu Utara	658	165	2.082	163	26753
Luwu Timur	674	393	1.769	154	23642
Toraja Utara	2.221	426	1.781	157	19116
Makassar	4.794	3.404	16.147	2.488	125432
Parepare	688	240	1.423	328	16174
Palopo	535	455	1.803	291	15086
Sulawesi Selatan	22.921	15.194	74.326	9.847	914.871

Lampiran 7
Banyaknya UMK menurut Lapangan Usaha dan Tahun Mulai Beroperasi
Secara Komersial Usaha/Perusahaan

Lapangan Usaha	< 2001	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
B. Pertambangan dan Penggalian	644	376	430	829	55	2334
C. Industri Pengolahan	39.344	17.100	28.882	44.686	2265	132277
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	114	100	234	842	115	1405
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	305	193	500	771	54	1823
F. Konstruksi	5.115	1.796	3.036	2.318	97	12362
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	108.868	62.994	117.648	212.121	15528	517159
H. Pengangkutan dan Pergudangan	12.310	8.257	14.282	25.786	1623	62258
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	15.867	8.003	18.916	44.636	3971	91393
J. Informasi dan Komunikasi	310	1.030	5.427	16.091	1469	24327
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	735	227	657	857	143	2619
L. Real Estat	374	238	602	1.914	103	3231
M, N. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis & Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	1.687	1.391	2.855	5.864	566	12363
P. Pendidikan	10.692	2.512	3.488	2.976	145	19813
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	1.905	807	1.278	1.639	192	5821
R, S. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi & Aktivitas Jasa Lainnya	5.486	2.559	5.523	11.156	962	25686
Jumlah	203.756	107.583	203.758	372.486	27.288	914.871

Lampiran 8
Banyaknya UMK menurut Wilayah dan Tahun Mulai Beroperasi
Secara Komersial Usaha/Perusahaan

Kabupaten/Kota	< 2001	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepulauan Selayar	3.457	2.444	3.550	6.007	405	15863
Bulukumba	10.036	5.543	9.431	17.651	1395	44056
Bantaeng	4.757	3.041	4.514	7.845	169	20326
Jeneponto	9.091	5.920	10.055	15.915	1007	41988
Takalar	11.615	5.203	8.435	14.873	774	40900
Gowa	18.184	8.988	16.762	32.811	1486	78231
Sinjai	7.907	3.738	6.457	11.183	937	30222
Maros	9.631	4.404	7.256	14.394	1068	36753
Pangkajene dan Kepulauan	7.734	4.313	7.455	12.226	1426	33154
Barru	4.394	1.997	3.935	7.636	637	18599
Bone	20.886	10.656	21.303	35.109	1805	89759
Soppeng	7.244	4.048	7.118	11.344	968	30722
Wajo	13.329	6.459	13.138	27.667	2332	62925
Sidenreng Rappang	6.083	3.206	8.096	12.271	1311	30967
Pinrang	7.691	5.205	9.097	16.103	1269	39365
Enrekang	4.356	2.161	4.396	7.359	859	19131
Luwu	7.880	3.970	7.805	15.645	1468	36768
Tana Toraja	3.647	2.288	4.012	8.669	323	18939
Luwu Utara	4.030	3.296	5.836	12.746	845	26753
Luwu Timur	4.058	2.905	6.248	9.538	893	23642
Toraja Utara	4.235	1.680	4.202	8.536	463	19116
Makassar	27.265	12.368	27.583	53.869	4347	125432
Parepare	3.574	1.820	3.875	6.348	557	16174
Palopo	2.672	1.930	3.199	6.741	544	15086
Sulawesi Selatan	203.756	107.583	203.758	372.486	27.288	914.871

Lampiran 9

Banyaknya UMK menurut Lapangan Usaha dan Penggunaan Komputer

Lapangan Usaha	Menggunakan Komputer	Tidak Menggunakan Komputer	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
B. Pertambangan dan Penggalian	12	2.322	2.334
C. Industri Pengolahan	4.050	128.227	132.277
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	815	590	1.405
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	70	1.753	1.823
F. Konstruksi	1.619	10.743	12.362
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	11.110	506.049	517.159
H. Pengangkutan dan Pergudangan	428	61.830	62.258
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1.981	89.412	91.393
J. Informasi dan Komunikasi	3.631	20.696	24.327
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	1.253	1.366	2.619
L. Real Estat	100	3.131	3.231
M, N. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis & Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	4.730	7.633	12.363
P. Pendidikan	14.236	5.577	19.813
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	1.820	4.001	5.821
R, S. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi & Aktivitas Jasa Lainnya	2.820	22.866	25.686
Jumlah	48.675	866.196	914.871

Lampiran 10
Banyaknya UMK menurut Wilayah dan Penggunaan Komputer

Lapangan Usaha	Menggunakan Komputer	Tidak Menggunakan Komputer	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Selayar	688	15.175	15.863
Bulukumba	1.989	42.067	44.056
Bantaeng	975	19.351	20.326
Jeneponto	1.769	40.219	41.988
Takalar	1.443	39.457	40.900
Gowa	3.162	75.069	78.231
Sinjai	1.468	28.754	30.222
Maros	2.164	34.589	36.753
Pangkajene dan Kepulauan	1.632	31.522	33.154
Barru	1.103	17.496	18.599
Bone	3.508	86.251	89.759
Soppeng	1.651	29.071	30.722
Wajo	2.639	60.286	62.925
Sidenreng Rappang	1.830	29.137	30.967
Pinrang	1.844	37.521	39.365
Enrekang	1.017	18.114	19.131
Luwu	1.698	35.070	36.768
Tana Toraja	924	18.015	18.939
Luwu Utara	1.059	25.694	26.753
Luwu Timur	1.253	22.389	23.642
Toraja Utara	838	18.278	19.116
Makassar	11.776	113.656	125.432
Parepare	1.270	14.904	16.174
Palopo	975	14.111	15.086
Sulawesi Selatan	48.675	866.196	914.871

Lampiran 11
Banyaknya UMK menurut Lapangan Usaha dan Keperluan Menggunakan Internet

Lapangan Usaha	Banyaknya Usaha	Tidak Menggunakan	Menggunakan Internet
(1)	(2)	(3)	(4)
B. Pertambangan dan Penggalian	2.334	2.307	27
C. Industri Pengolahan	132.277	125.490	6.787
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	1.405	585	820
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	1.823	1.762	61
F. Konstruksi	12.362	10.680	1.682
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	517.159	495.513	21.646
H. Pengangkutan dan Pergudangan	62.258	60.683	1.575
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman	91.393	87.293	4.100
J. Informasi dan Komunikasi	24.327	18.763	5.564
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	2.619	1.881	738
L. Real Estat	3.231	3.124	107
M, N. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis & Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	12.363	8.303	4.060
P. Pendidikan	19.813	7.879	11.934
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	5.821	3.964	1.857
R, S. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi & Aktivitas Jasa Lainnya	25.686	21.961	3.725
Jumlah	914.871	850.188	64.683

Lampiran 11
Banyaknya UMK menurut Lapangan Usaha dan Keperluan Menggunakan Internet
(Lanjutan)

Lapangan Usaha <i>Industrial Category</i>	Keperluan Menggunakan Internet				
	Sarana Komunikasi	Mencari Informasi	Sarana Pemasaran/ Iklan	Sarana Penjualan dan/ atau Pembelian	Lainnya
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
B. Pertambangan dan Penggalian	27	11	7	4	-
C. Industri Pengolahan	4.345	4.839	3.424	2.710	342
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	379	342	235	669	30
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	51	36	23	32	-
F. Konstruksi	1.296	1.320	546	491	104
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	17.491	14.264	10.288	11.328	440
H. Pengangkutan dan Pergudangan	1.539	621	339	301	55
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	3.055	2.453	2.058	1.506	345
J. Informasi dan Komunikasi	3.948	3.286	1.879	3.386	180
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	573	515	289	242	76
L. Real Estat	82	66	85	60	-
M, N. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis & Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	2.995	3.180	2.279	1.876	136
P. Pendidikan	9.216	10.536	1.842	575	3.314
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	1.550	1.585	319	351	213
R, S. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi & Aktivitas Jasa Lainnya	2.601	2.883	1.920	1.344	173
Jumlah/Total	49.148	45.937	25.533	24.875	5.408

Lampiran 12

Banyaknya UMK menurut Wilayah dan Keperluan Menggunakan Internet

Kabupaten/Kota	Banyaknya Usaha	Tidak Menggunakan	Menggunakan Internet
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Selayar	15.863	14.994	869
Bulukumba	44.056	42.312	1.744
Bantaeng	20.326	19.369	957
Jeneponto	41.988	38.598	3.390
Takalar	40.900	38.718	2.182
Gowa	78.231	73.597	4.634
Sinjai	30.222	28.719	1.503
Maros	36.753	33.310	3.443
Pangkajene dan Kepulauan	33.154	31.392	1.762
Barru	18.599	17.253	1.346
Bone	89.759	84.907	4.852
Soppeng	30.722	27.373	3.349
Wajo	62.925	58.255	4.670
Sidenreng Rappang	30.967	29.063	1.904
Pinrang	39.365	37.181	2.184
Enrekang	19.131	17.823	1.308
Luwu	36.768	34.695	2.073
Tana Toraja	18.939	17.814	1.125
Luwu Utara	26.753	25.820	933
Luwu Timur	23.642	22.231	1.411
Toraja Utara	19.116	18.367	749
Makassar	125.432	110.409	15.023
Parepare	16.174	14.283	1.891
Palopo	15.086	13.705	1.381
Sulawesi Selatan	914.871	850.188	64.683

Lampiran 12

Banyaknya UMK menurut Wilayah dan Keperluan Menggunakan Internet (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	Keperluan Menggunakan Internet				
	Sarana Komunikasi	Mencari Informasi	Sarana Pemasaran/ Iklan	Sarana Penjualan dan/atau Pembelian	Lainnya
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kepulauan Selayar	606	715	269	296	122
Bulukumba	1.213	1.354	488	480	164
Bantaeng	793	895	376	303	41
Jeneponto	2.986	1.501	812	720	316
Takalar	1.369	1.211	821	669	150
Gowa	3.332	3.052	1.682	1.670	356
Sinjai	1.149	1.248	437	444	228
Maros	2.667	2.706	1.408	1.145	274
Pangkajene dan Kepulauan	1.275	1.232	762	743	178
Barru	911	1.138	610	619	129
Bone	3.817	3.418	1.379	1.806	413
Soppeng	2.844	1.700	758	802	222
Wajo	3.558	3.287	1.377	1.404	404
Sidenreng Rappang	1.459	1.580	781	832	122
Pinrang	1.534	1.699	1.034	817	241
Enrekang	1.079	1.132	539	521	160
Luwu	1.379	1.604	797	800	197
Tana Toraja	927	837	240	409	141
Luwu Utara	601	662	264	284	245
Luwu Timur	1.052	1.062	581	598	117
Toraja Utara	535	592	233	281	100
Makassar	11.617	11.078	8.294	7.455	968
Parepare	1.467	1.401	997	1.024	83
Palopo	978	833	594	753	37
Sulawesi Selatan	49.148	45.937	25.533	24.875	5.408

Lampiran 13
Banyaknya UMK menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kemitraan

Lapangan Usaha	Banyaknya Usaha	Tidak Menjaln Kemitraan	Menjaln Kemitraan
(1)	(2)	(3)	(4)
B. Pertambangan dan Penggalian	2.334	2.243	91
C. Industri Pengolahan	132.277	119.892	12.385
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	1.405	974	431
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	1.823	1.649	174
F. Konstruksi	12.362	11.282	1.080
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	517.159	468.716	48.443
H. Pengangkutan dan Pergudangan	62.258	59.950	2.308
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	91.393	88.717	2.676
J. Informasi dan Komunikasi	24.327	20.513	3.814
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	2.619	2.202	417
L. Real Estat	3.231	3.171	60
M, N. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis & Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	12.363	10.803	1.560
P. Pendidikan	19.813	17.428	2.385
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	5.821	4.767	1.054
R, S. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi & Aktivitas Jasa Lainnya	25.686	24.150	1.536
Jumlah	914.871	836.457	78.414

Lampiran 13
Banyaknya UMK menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kemitraan (Lanjutan)

Lapangan Usaha	Jenis Kemitraan				
	Penyediaan Uang/Barang Modal	Pengadaan Bahan Baku/Barang Dagangan	Pemasaran	Bimbingan/Pelatihan/ Penyuluhan	Lainnya
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
B. Pertambangan dan Penggalian	19	25	58	-	4
C. Industri Pengolahan	2.217	6.411	6.885	415	367
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	98	320	68	19	27
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	69	52	108	23	-
F. Konstruksi	309	707	226	63	167
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	8.915	42.916	6.927	782	275
H. Pengangkutan dan Pergudangan	445	790	1.030	53	266
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	611	2.062	426	69	81
J. Informasi dan Komunikasi	436	3.392	180	7	68
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	226	131	92	104	74
L. Real Estat	27	28	17	-	20
M, N. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis & Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	334	772	536	133	250
P. Pendidikan	777	627	132	1.578	350
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	238	709	115	313	196
R, S. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi & Aktivitas Jasa Lainnya	310	953	461	234	203
Jumlah/Total	15.031	59.895	17.261	3.793	2.348

Lampiran 14
Banyaknya UMK menurut Wilayah dan Jenis Kemitraan

Kabupaten/Kota	Banyaknya Usaha	Tidak Menjaln Kemitraan	Menjaln Kemitraan
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Selayar	15.863	15.172	691
Bulukumba	44.056	42.783	1.273
Bantaeng	20.326	18.987	1.339
Jeneponto	41.988	38.101	3.887
Takalar	40.900	37.867	3.033
Gowa	78.231	73.852	4.379
Sinjai	30.222	26.797	3.425
Maros	36.753	35.218	1.535
Pangkajene dan Kepulauan	33.154	31.236	1.918
Barru	18.599	17.172	1.427
Bone	89.759	78.850	10.909
Soppeng	30.722	28.187	2.535
Wajo	62.925	56.251	6.674
Sidenreng Rappang	30.967	28.288	2.679
Pinrang	39.365	32.149	7.216
Enrekang	19.131	15.092	4.039
Luwu	36.768	31.864	4.904
Tana Toraja	18.939	17.405	1.534
Luwu Utara	26.753	25.606	1.147
Luwu Timur	23.642	22.189	1.453
Toraja Utara	19.116	18.514	602
Makassar	125.432	115.626	9.806
Parepare	16.174	14.742	1.432
Palopo	15.086	14.509	577
Sulawesi Selatan	914.871	836.457	78.414

Lampiran 14
Banyaknya UMK menurut Wilayah dan Jenis Kemitraan (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	Jenis Kemitraan				
	Penyediaan Uang/Barang Modal	Pengadaan Bahan Baku/Barang Dagangan	Pemasaran	Bimbingan/Pelatihan/ Penyuluhan	Lainnya
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kepulauan Selayar	137	438	165	52	53
Bulukumba	151	978	192	85	30
Bantaeng	187	852	316	137	9
Jeneponto	642	2.396	1.522	162	31
Takalar	541	2.222	630	159	69
Gowa	459	3.570	641	223	186
Sinjai	958	2.959	668	174	36
Maros	395	1.230	241	81	100
Pangkajene dan Kepulauan	450	1.305	499	99	19
Barru	338	1.200	296	70	32
Bone	1.645	7.913	3.086	261	142
Soppeng	528	1.585	371	168	306
Wajo	1.049	5.147	1.589	377	60
Sidenreng Rappang	1.055	2.202	629	133	83
Pinrang	876	6.616	1.002	221	177
Enrekang	888	3.425	326	81	47
Luwu	865	3.925	814	137	54
Tana Toraja	340	1.277	178	63	61
Luwu Utara	218	821	268	39	2
Luwu Timur	381	1.102	282	69	51
Toraja Utara	80	489	77	35	25
Makassar	2.472	6.856	2.874	834	633
Parepare	262	1.040	378	106	120
Palopo	114	347	217	27	22
Sulawesi Selatan	15.031	59.895	17.261	3.793	2.348

Lampiran 15
Banyaknya Pekerja UMK menurut Lapangan Usaha dan Status Pekerja

Lapangan Usaha	Tetap dan Kontrak	Tidak Tetap/harian	Outsourcing	Asing	Tidak Dibayar	Jumlah
(1)	2	3	4	5	6	7
B. Pertambangan dan Penggalian	3.474	1.787	-	-	1.546	6.807
C. Industri Pengolahan	176.212	72.659	-	2	73.078	321.951
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	2.025	135	-	-	643	2.803
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	2.359	510	-	-	922	3.791
F. Konstruksi	38.608	59.131	54	-	-	97.793
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	585.433	54.300	195	-	295.061	934.989
H. Pengangkutan dan Pergudangan	67.279	6.634	16	-	4.518	78.447
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	124.767	13.063	33	-	55.823	193.686
J. Informasi dan Komunikasi	25.981	681	-	-	10.792	37.454
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	9.928	448	-	-	1.594	11.970
L. Real Estat	3.679	365	180	-	1.085	5.309
M, N. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis & Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	21.244	10.601	5	-	5.215	37.065
P. Pendidikan	202.608	23.417	465	-	5.106	231.596
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	44.453	6.626	88	-	11.871	63.038
R, S. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi & Aktivitas Jasa Lainnya	45.155	12.277	97	-	8.123	65.652
Jumlah	1.353.205	262.634	1.133	2	475.377	2.092.351

Lampiran 16
Banyaknya Pekerja UMK menurut Wilayah dan Status Pekerja

Kabupaten/Kota	Tetap dan Kontrak	Tidak Tetap/harian	Outsourcing	Asing	Tidak Dibayar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepulauan Selayar	21.817	10.218	5	2	8.938	40.980
Bulukumba	64.544	8.077	42	-	21.614	94.277
Bantaeng	30.841	7.603	-	-	9.068	47.512
Jeneponto	62.807	21.986	7	-	21.492	106.292
Takalar	53.611	13.182	56	-	21.951	88.800
Gowa	102.206	30.487	71	-	40.896	173.660
Sinjai	44.782	6.545	31	-	15.717	67.075
Maros	52.891	11.401	16	-	21.470	85.778
Pangkajene dan Kepulauan	45.360	9.052	36	-	17.038	71.486
Barru	29.241	7.580	-	-	11.314	48.135
Bone	121.814	18.270	6	-	36.308	176.398
Soppeng	41.786	5.356	19	-	15.150	62.311
Wajo	82.917	16.310	87	-	26.014	125.328
Sidenreng Rappang	48.150	8.501	-	-	16.871	73.522
Pinrang	52.173	14.773	-	-	24.444	91.390
Enrekang	30.025	4.130	-	-	11.513	45.668
Luwu	51.983	13.299	24	-	22.079	87.385
Tana Toraja	32.400	4.641	-	-	10.321	47.362
Luwu Utara	40.419	8.097	-	-	12.285	60.801
Luwu Timur	35.010	5.691	14	-	12.073	52.788
Toraja Utara	32.552	5.301	-	-	10.826	48.679
Makassar	221.768	23.549	670	-	73.065	319.052
Parepare	27.710	4.976	49	-	7.646	40.381
Palopo	26.398	3.609	-	-	7.284	37.291
Sulawesi Selatan	1.353.205	262.634	1.133	2	475.377	2.092.351

Lampiran 17
Banyaknya UMK yang Pkerjanya Pernah/Sedang Mengikuti Pelatihan/Penyuluhan
Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Pelatihan

Lapangan Usaha	Jumlah	Tidak Pernah Mengikuti Pelatihan/ Penyuluhan	Pernah Mengikuti Pelatihan/ Penyuluhan
(1)	(2)	(2)	(3)
B. Pertambangan dan Penggalian	2.334	2.287	47
C. Industri Pengolahan	132.277	125.020	7.257
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	1.405	1.299	106
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	1.823	1.749	74
F. Konstruksi	12.362	11.328	1.034
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	517.159	510.848	6.311
H. Pengangkutan dan Pergudangan	62.258	61.850	408
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	91.393	90.101	1.292
J. Informasi dan Komunikasi	24.327	23.836	491
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	2.619	1.760	859
L. Real Estat	3.231	3.185	46
M, N. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis & Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	12.363	11.302	1.061
P. Pendidikan	19.813	7.809	12.004
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	5.821	3.154	2.667
R, S. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi & Aktivitas Jasa Lainnya	25.686	21.575	4.111
Jumlah	914.871	877.103	37.768

Lampiran 17
Banyaknya UMK yang Pekerjaannya Pernah/Sedang Mengikuti Pelatihan/Penyuluhan
Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Pelatihan (Lanjutan)

Lapangan Usaha	Jenis Pelatihan/Penyuluhan			
	Manajerial	Keterampilan/ Teknik Produksi	Pemasaran	Lainnya
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)
B. Pertambangan dan Penggalian	-	47	2	-
C. Industri Pengolahan	547	6.592	1.053	607
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	23	86	22	2
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	32	47	34	23
F. Konstruksi	214	884	99	109
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1.246	3.539	2.646	1.028
H. Pengangkutan dan Pergudangan	70	320	23	75
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	221	817	439	304
J. Informasi dan Komunikasi	60	298	206	89
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	667	313	221	106
L. Real Estat	-	9	16	21
M, N. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis & Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	114	271	43	84
P. Pendidikan	4.419	6.961	374	4.306
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	833	2.095	151	531
R, S. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi & Aktivitas Jasa Lainnya	327	3.628	222	479
Jumlah	8.881	26.388	5.668	7.873

Lampiran 18
Banyaknya UMK yang Pekerjaanya Pernah/Sedang Mengikuti Pelatihan/Penyuluhan
Menurut Wilayah dan Jenis Pelatihan

Kabupaten/Kota	Jumlah	Tidak Pernah Mengikuti Pelatihan/ Penyuluhan	Pernah Mengikuti Pelatihan/ Penyuluhan
(1)	(2)	(2)	(3)
Kepulauan Selayar	15.863	15.011	852
Bulukumba	44.056	42.985	1.071
Bantaeng	20.326	19.419	907
Jeneponto	41.988	40.567	1.421
Takalar	40.900	39.303	1.597
Gowa	78.231	75.436	2.795
Sinjai	30.222	28.771	1.451
Maros	36.753	34.862	1.891
Pangkajene dan Kepulauan	33.154	32.056	1.098
Barru	18.599	17.662	937
Bone	89.759	87.213	2.546
Soppeng	30.722	29.428	1.294
Wajo	62.925	61.056	1.869
Sidenreng Rappang	30.967	29.599	1.368
Pinrang	39.365	37.951	1.414
Enrekang	19.131	17.809	1.322
Luwu	36.768	35.166	1.602
Tana Toraja	18.939	17.647	1.292
Luwu Utara	26.753	25.402	1.351
Luwu Timur	23.642	22.480	1.162
Toraja Utara	19.116	18.431	685
Makassar	125.432	119.343	6.089
Parepare	16.174	15.208	966
Palopo	15.086	14.298	788
Sulawesi Selatan	914.871	877.103	37.768

Lampiran 18
Banyaknya UMK yang Pekerjaannya Pernah/Sedang Mengikuti Pelatihan/Penyuluhan
Menurut Wilayah dan Jenis Pelatihan (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	Jenis Pelatihan/Penyuluhan			
	Manajerial	Keterampilan/ Teknik Produksi	Pemasaran	Lainnya
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepulauan Selayar	122	512	149	240
Bulukumba	236	824	107	150
Bantaeng	251	769	270	101
Jeneponto	245	504	207	768
Takalar	223	1.094	258	327
Gowa	592	1.808	448	616
Sinjai	439	1.121	196	225
Maros	488	1.324	217	418
Pangkajene dan Kepulauan	338	804	211	136
Barru	276	666	63	168
Bone	647	1.855	329	505
Soppeng	219	740	176	357
Wajo	513	1.305	202	445
Sidenreng Rappang	290	1.012	313	245
Pinrang	344	1.091	109	153
Enrekang	495	996	194	176
Luwu	382	1.035	163	411
Tana Toraja	457	967	58	214
Luwu Utara	156	1.101	106	336
Luwu Timur	281	750	227	274
Toraja Utara	210	472	40	241
Makassar	1.391	4.325	1.303	1.108
Parepare	213	723	198	123
Palopo	73	590	124	136
Sulawesi Selatan	8.881	26.388	5.668	7.873

Lampiran 19
Banyaknya UMK Menurut Lapangan Usaha dan Alasan Utama Tidak Pernah Menerima Kredit dari Lembaga Keuangan

Lapangan Usaha	Banyaknya Usaha	Pernah Menerima	Tidak Pernah Menerima
(1)	(2)	(3)	(4)
B. Pertambangan dan Penggalian	2.334	241	2.093
C. Industri Pengolahan	132.277	15.696	116.581
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	1.405	151	1.254
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	1.823	177	1.646
F. Konstruksi	12.362	1.021	11.341
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	517.159	90.004	427.155
H. Pengangkutan dan Pergudangan	62.258	5.238	57.020
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman	91.393	11.503	79.890
J. Informasi dan Komunikasi	24.327	1.946	22.381
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	2.619	336	2.283
L. Real Estat	3.231	140	3.091
M, N. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis & Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	12.363	2.067	10.296
P. Pendidikan	19.813	205	19.608
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	5.821	264	5.557
R, S. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi & Aktivitas Jasa Lainnya	25.686	3.090	22.596
Jumlah	914.871	132.079	782.792

Lampiran 19
Banyaknya UMK Menurut Lapangan Usaha dan Alasan Utama Tidak Pernah Menerima Kredit dari Lembaga Keuangan (Lanjutan)

Lapangan Usaha	Alasan Utama Tidak Pernah Menerima Kredit					
	Tidak Tahu Prosedur	Prosedur Sulit	Tidak Ada Agunan	Suku Bunga Tinggi	Usulan Ditolak	Lainnya
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
B. Pertambangan dan Penggalian	303	153	379	335	33	890
C. Industri Pengolahan	13.462	7.612	15.360	24.628	2.348	53.171
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	80	72	131	266	45	660
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	186	77	335	214	49	785
F. Konstruksi	804	707	1.589	2.416	209	5.616
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan	37.292	29.405	55.188	102.079	7.368	195.823
H. Pengangkutan dan Pergudangan	6.197	3.924	8.630	12.446	1.415	24.408
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	6.612	5.790	11.562	17.025	1.531	37.370
J. Informasi dan Komunikasi	1.008	1.407	2.505	5.105	454	11.902
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	68	159	119	317	98	1.522
L. Real Estat	265	274	132	633	112	1.675
M, N. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis & Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	507	598	958	2.272	234	5.727
P. Pendidikan	475	730	1.269	1.889	148	15.097
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	221	147	320	887	59	3.923
R, S. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi & Aktivitas Jasa Lainnya	1.990	1.725	3.148	4.483	474	10.776
Jumlah	69.470	52.780	101.625	174.995	14.577	369.345

Lampiran 20
Banyaknya UMK Menurut Wilayah dan Alasan Utama Tidak Pernah Menerima Kredit dari Lembaga Keuangan

Kabupaten/Kota	Banyaknya Usaha	Pernah Menerima	Tidak Pernah Menerima
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Selayar	15.863	1.184	14.679
Bulukumba	44.056	4.181	39.875
Bantaeng	20.326	3.238	17.088
Jeneponto	41.988	7.479	34.509
Takalar	40.900	9.082	31.818
Gowa	78.231	8.533	69.698
Sinjai	30.222	5.502	24.720
Maros	36.753	6.088	30.665
Pangkajene dan Kepulauan	33.154	4.226	28.928
Barru	18.599	4.174	14.425
Bone	89.759	10.464	79.295
Soppeng	30.722	5.403	25.319
Wajo	62.925	5.441	57.484
Sidenreng Rappang	30.967	9.160	21.807
Pinrang	39.365	7.351	32.014
Enrekang	19.131	2.879	16.252
Luwu	36.768	5.267	31.501
Tana Toraja	18.939	2.608	16.331
Luwu Utara	26.753	3.389	23.364
Luwu Timur	23.642	4.327	19.315
Toraja Utara	19.116	2.402	16.714
Makassar	125.432	15.335	110.097
Parepare	16.174	2.699	13.475
Palopo	15.086	1.667	13.419
Sulawesi Selatan	914.871	132.079	782.792

Lampiran 20
Banyaknya UMK Menurut Wilayah dan Alasan Utama Tidak Pernah Menerima Kredit
dari Lembaga Keuangan (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	Alasan Utama Tidak Pernah Menerima Kredit					
	Tidak Tahu Prosedur	Prosedur Sulit	Tidak Ada Agunan	Suku Bunga Tinggi	Usulan Ditolak	Lainnya
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kepulauan Selayar	2.425	493	948	4.913	50	5.850
Bulukumba	4.192	3.348	3.450	11.513	686	16.686
Bantaeng	1.478	524	2.068	4.324	566	8.128
Jeneponto	4.515	2.445	3.945	4.130	972	18.502
Takalar	575	818	4.475	4.485	581	20.884
Gowa	5.688	4.143	12.360	10.295	1.737	35.475
Sinjai	1.182	1.606	1.555	11.690	383	8.304
Maros	3.050	1.514	3.020	4.994	234	17.853
Pangkajene dan Kepulauan	2.718	2.029	2.925	10.846	354	10.056
Barru	806	903	2.397	4.396	158	5.765
Bone	5.767	4.295	10.911	23.139	727	34.456
Soppeng	2.053	1.834	2.076	4.871	169	14.316
Wajo	7.320	2.858	6.944	11.309	590	28.463
Sidenreng Rappang	2.296	1.422	3.750	5.356	468	8.515
Pinrang	2.512	2.734	2.991	7.356	417	16.004
Enrekang	715	423	2.403	2.891	133	9.687
Luwu	1.476	1.366	2.781	4.853	183	20.842
Tana Toraja	1.746	1.036	3.267	4.103	136	6.043
Luwu Utara	600	927	3.198	4.344	409	13.886
Luwu Timur	1.445	2.262	2.698	5.767	596	6.547
Toraja Utara	1.821	2.011	3.799	3.629	232	5.222
Makassar	13.144	12.224	15.177	20.626	3.979	44.947
Parepare	1.522	1.143	1.425	2.532	366	6.487
Palopo	424	422	3.062	2.633	451	6.427
Sulawesi Selatan	69.470	52.780	101.625	174.995	14.577	369.345

Lampiran 21
Banyaknya UMK Menurut Lapangan Usaha dan Komposisi Permodalan

Lapangan Usaha	Awal Pendirian							
	Milik Sendiri		Pinjaman Bank		Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank (Koperasi, Modal Ventura)		Pinjaman Perorangan, Keluarga, dan Lainnya	
	≤ 50 Persen	> 50 Persen	≤ 50 Persen	> 50 Persen	≤ 50 Persen	> 50 Persen	< 10 Persen	10 - 50 Persen
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
B. Pertambangan dan Penggalian	140	2.121	137	73	125	13	95	83
C. Industri Pengolahan	8.685	117.092	7.038	2.930	4.539	342	3.818	5.973
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	97	1.174	72	72	42	40	40	21
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	47	1.656	27	53	24	17	13	19
F. Konstruksi	739	11.371	556	262	381	18	290	416
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	35.631	458.508	33.040	17.556	18.978	3.254	15.777	17.277
H. Pengangkutan dan Pergudangan	4.296	52.621	3.297	1.250	2.232	1.412	1.824	2.781
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	5.109	82.670	4.914	2.346	2.774	437	2.359	2.872
J. Informasi dan Komunikasi	766	22.847	1.082	380	748	72	658	509
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	106	1.880	86	176	38	172	26	17
L. Real Estat	125	2.985	175	88	119	-	107	66
M, N. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis & Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	926	10.672	947	503	391	81	294	407
P. Pendidikan	348	14.117	512	52	481	193	405	141
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	185	5.117	250	94	111	21	111	75
R, S. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi & Aktivitas Jasa Lainnya	1.630	22.941	1.338	723	742	86	568	764
Jumlah	58.830	807.772	53.471	26.558	31.725	6.158	26.385	31.421

Lampiran 21
Banyaknya UMK Menurut Lapangan Usaha dan Komposisi Permodalan (Lanjutan)

Lapangan Usaha	Saat Pencacahan							
	Milik Sendiri		Pinjaman Bank		Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank (Koperasi, Modal Ventura)		Pinjaman Perorangan, Keluarga, dan Lainnya	
	≤ 50 Persen	> 50 Persen	≤ 50 Persen	> 50 Persen	≤ 50 Persen	> 50 Persen	< 10 Persen	10 - 50 Persen
-1	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
B. Pertambangan dan Penggalian	99	2.159	191	65	148	34	95	15
C. Industri Pengolahan	9.544	117.234	12.566	3.894	4.935	413	4.000	3.540
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	107	1.234	113	57	52	11	40	9
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	99	1.633	106	41	38	12	13	11
F. Konstruksi	530	11.659	1.004	190	342	-	309	129
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	49.364	449.163	64.103	24.652	21.499	2.938	16.333	10.146
H. Pengangkutan dan Pergudangan	2.733	56.584	4.767	829	2.411	550	1.816	843
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	5.683	83.196	7.712	2.716	3.441	468	2.505	1.145
J. Informasi dan Komunikasi	904	23.002	1.678	460	824	67	685	279
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	167	1.924	138	176	73	136	26	20
L. Real Estat	76	3.087	185	53	117	4	107	15
M, N. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis & Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	929	10.879	1.618	479	415	49	343	171
P. Pendidikan	220	14.246	505	7	468	193	405	83
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	101	5.270	279	38	117	11	111	27
R, S. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi & Aktivitas Jasa Lainnya	1.524	23.367	2.103	743	784	20	584	320
Jumlah	72.080	804.637	97.068	34.400	35.664	4.906	27.372	16.753

Lampiran 22

Banyaknya UMK Menurut Wilayah dan Komposisi Permodalan

Kabupaten/Kota	Awal Pendirian							
	Milik Sendiri		Pinjaman Bank		Pinjaman Lembaga Keuangan NonBank (Koperasi, Modal Ventura)		Pinjaman Perorangan, Keluarga, dan Lainnya	
	≤ 50 Persen	> 50 Persen	≤ 50 Persen	> 50 Persen	≤ 50 Persen	> 50 Persen	< 10 Persen	10 - 50 Persen
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
Kepulauan Selayar	1.084	14.298	1.353	267	1.312	58	1.135	857
Bulukumba	1.836	41.045	3.326	657	2.441	36	2.365	1.207
Bantaeng	1.311	17.839	903	622	382	82	268	416
Jeneponto	2.304	37.157	3.101	1.056	2.025	564	1.814	551
Takalar	2.893	33.392	1.904	3.384	1.145	496	1.023	1.503
Gowa	3.721	71.644	5.561	1.435	4.082	210	3.845	2.421
Sinjai	1.914	26.836	2.051	1.512	1.316	78	1.262	483
Maros	1.536	33.639	2.345	696	1.671	159	1.302	563
Pangkajene dan Kepulauan	2.080	29.483	1.944	903	1.089	310	840	928
Barru	1.450	16.061	1.398	837	453	161	406	362
Bone	4.784	81.694	4.396	1.767	2.796	586	2.399	2.802
Soppeng	3.104	26.451	1.554	891	668	103	353	1.975
Wajo	4.591	52.448	2.622	588	1.612	457	1.125	2.959
Sidenreng Rappang	5.391	24.507	3.319	1.956	763	181	589	2.434
Pinrang	2.406	35.992	2.654	764	1.436	49	1.251	1.558
Enrekang	952	16.088	638	1.445	186	97	89	280
Luwu	1.731	32.378	1.651	1.466	1.634	838	1.370	741
Tana Toraja	1.783	16.182	1.963	656	1.500	313	1.307	1.129
Luwu Utara	1.485	23.825	1.472	756	1.176	274	1.043	732
Luwu Timur	1.575	20.271	1.606	812	882	203	739	555
Toraja Utara	1.880	16.687	958	236	668	130	72	2.333
Makassar	6.897	112.325	4.781	2.844	1.557	525	968	3.961
Parepare	1.101	14.052	524	632	54	87	-	371
Palopo	1.021	13.478	1.447	376	877	161	820	300
Sulawesi Selatan	58.830	807.772	53.471	26.558	31.725	6.158	26.385	31.421

Lampiran 22
Banyaknya UMK Menurut Wilayah dan Komposisi Permodalan (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	Saat Pencacahan							
	Milik Sendiri		Pinjaman Bank		Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank (Koperasi, Modal Ventura)		Pinjaman Perorangan, Keluarga, dan Lainnya	
	≤ 50 Persen	> 50 Persen	≤ 50 Persen	> 50 Persen	≤ 50 Persen	> 50 Persen	< 10 Persen	10 - 50 Persen
-1	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17
Kepulauan Selayar	1.039	14.341	1.868	388	1.281	55	1.104	478
Bulukumba	2.310	40.641	4.235	1.068	2.398	50	2.305	519
Bantaeng	1.450	18.042	1.492	874	465	129	289	158
Jeneponto	4.120	35.509	6.046	1.793	2.265	342	1.823	389
Takalar	4.513	31.320	4.478	5.319	1.414	490	997	1.045
Gowa	5.371	70.853	8.332	1.820	4.329	193	3.844	1.403
Sinjai	1.753	25.993	3.525	2.485	1.396	94	1.230	99
Maros	2.544	32.953	4.563	1.095	1.742	107	1.373	413
Pangkajene dan Kepulauan	2.963	29.566	3.392	842	1.359	189	778	610
Barru	2.767	14.993	3.000	1.469	547	117	406	76
Bone	4.155	83.066	8.348	1.959	3.205	579	2.598	1.167
Soppeng	4.859	24.835	3.908	2.550	628	13	643	1.252
Wajo	5.148	53.678	4.546	896	1.869	247	1.208	2.581
Sidenreng Rappang	5.203	24.882	6.261	1.600	1.022	125	636	1.052
Pinrang	4.313	34.278	6.149	1.290	1.648	113	1.242	778
Enrekang	1.587	16.564	2.128	980	301	97	101	31
Luwu	2.445	32.188	3.560	1.572	2.272	731	1.466	201
Tana Toraja	971	17.616	2.877	286	1.808	96	1.351	180
Luwu Utara	2.425	23.208	2.500	1.469	1.365	328	1.203	643
Luwu Timur	2.508	19.824	3.324	946	1.053	191	745	466
Toraja Utara	1.016	17.758	1.462	183	495	59	118	1.116
Makassar	6.498	114.283	7.762	2.674	1.644	398	1.041	1.768
Parepare	1.456	14.234	1.592	515	200	76	-	228
Palopo	666	14.012	1.720	327	958	87	871	100
Sulawesi Selatan	72.080	804.637	97.068	34.400	35.664	4.906	27.372	16.753

Lampiran 23

Banyaknya UMK Menurut Lapangan Usaha dan Prospek Usaha/Perusahaan Tahun 2018

Lapangan Usaha	Lebih Baik	Sama baik	Sama Buruk	Lebih Buruk	Tidak Dapat Dibandingkan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
B. Pertambangan dan Penggalian	1.243	512	88	167	324	2.334
C. Industri Pengolahan	64.754	36.669	4.268	3.343	23.243	132.277
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	808	375	44	61	117	1.405
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	942	393	73	83	332	1.823
F. Konstruksi	5.727	3.455	415	477	2.288	12.362
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	252.689	145.241	15.271	11.980	91.978	517.159
H. Pengangkutan dan Pergudangan	24.500	19.155	3.245	3.627	11.731	62.258
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	48.349	26.065	1.909	1.894	13.176	91.393
J. Informasi dan Komunikasi	12.553	7.068	664	601	3.441	24.327
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	1.645	552	59	99	264	2.619
L. Real Estat	1.514	1.171	31	56	459	3.231
M, N. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis & Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	6.332	2.908	475	568	2.080	12.363
P. Pendidikan	11.326	5.941	170	173	2.203	19.813
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	3.188	1.645	123	120	745	5.821
R, S. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi & Aktivitas Jasa Lainnya	13.774	6.639	535	880	3.858	25.686
Jumlah	449.344	257.789	27.370	24.129	156.239	914.871

Lampiran 24
Banyaknya UMK Menurut Wilayah dan Prospek Usaha/Perusahaan Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Lebih Baik	Sama baik	Sama Buruk	Lebih Buruk	Tidak Dapat Dibandingkan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepulauan Selayar	9.921	4.918	180	188	656	15.863
Bulukumba	20.162	10.275	359	1.032	12.228	44.056
Bantaeng	11.872	7.319	190	245	700	20.326
Jeneponto	28.639	6.347	539	487	5.976	41.988
Takalar	29.950	7.146	502	730	2.572	40.900
Gowa	48.408	17.914	666	1.166	10.077	78.231
Sinjai	18.087	8.009	667	563	2.896	30.222
Maros	18.774	11.196	922	1.041	4.820	36.753
Pangkajene dan Kepulauan	13.415	8.925	590	809	9.415	33.154
Barru	9.375	4.522	114	486	4.102	18.599
Bone	37.374	21.803	1.857	1.783	26.942	89.759
Soppeng	12.064	11.229	941	1.193	5.295	30.722
Wajo	21.889	20.057	3.955	1.317	15.707	62.925
Sidenreng Rappang	13.757	9.368	836	1.091	5.915	30.967
Pinrang	13.896	19.934	1.469	843	3.223	39.365
Enrekang	6.809	7.172	997	930	3.223	19.131
Luwu	15.461	7.532	1.119	1.428	11.228	36.768
Tana Toraja	7.740	8.761	812	608	1.018	18.939
Luwu Utara	5.957	13.704	5.055	1.037	1.000	26.753
Luwu Timur	10.619	8.865	1.325	829	2.004	23.642
Toraja Utara	7.912	6.080	766	541	3.817	19.116
Makassar	72.418	26.741	2.279	4.479	19.515	125.432
Parepare	7.083	4.733	543	836	2.979	16.174
Palopo	7.762	5.239	687	467	931	15.086
Sulawesi Selatan	449.344	257.789	27.370	24.129	156.239	914.871

Lampiran 25
Banyaknya UMK Menurut Lapangan Usaha dan Rencana Pengembangan/Perluasan Usaha/Perusahaan

Lapangan Usaha	Banyaknya Usaha	Tidak Ada Rencana	Ada Rencana
(1)	(2)	(3)	(4)
B. Pertambangan dan Pengalihan	2.334	1.764	570
C. Industri Pengolahan	132.277	83.071	49.206
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	1.405	770	635
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	1.823	1.304	519
F. Konstruksi	12.362	7.927	4.435
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	517.159	300.074	217.085
H. Pengangkutan dan Pergudangan	62.258	49.274	12.984
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	91.393	56.748	34.645
J. Informasi dan Komunikasi	24.327	14.601	9.726
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	2.619	1.420	1.199
L. Real Estat	3.231	2.301	930
M, N. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis & Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	12.363	6.647	5.716
P. Pendidikan	19.813	9.516	10.297
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	5.821	3.335	2.486
R, S. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi & Aktivitas Jasa Lainnya	25.686	14.126	11.560
Jumlah	914.871	552.878	361.993

Lampiran 25
Banyaknya UMK Menurut Lapangan Usaha dan Rencana Pengembangan/Perluasan Usaha/Perusahaan (Lanjutan)

Lapangan Usaha	Rencana Pengembangan/Perluasan Perusahaan				
	Memperluas Tempat Usaha	Membuka Cabang	Meningkatkan Keahlian	Diversifikasi Produk	Lainnya
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
B. Pertambangan dan Penggalian	451	43	92	29	83
C. Industri Pengolahan	38.310	8.304	17.076	14.406	4.159
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	476	204	174	179	31
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	397	92	141	118	69
F. Konstruksi	1.863	527	3.158	787	337
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	169.570	35.911	21.509	92.345	11.835
H. Pengangkutan dan Pergudangan	5.167	1.276	2.192	1.220	6.684
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	26.951	9.418	6.249	13.058	2.028
J. Informasi dan Komunikasi	7.212	1.996	1.475	3.804	730
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	729	423	398	362	173
L. Real Estat	745	149	57	90	112
M, N. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis & Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	3.613	1.541	2.126	1.722	715
P. Pendidikan	6.816	1.182	6.117	896	1.276
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	1.701	498	1.548	312	116
R, S. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi & Aktivitas Jasa Lainnya	8.294	3.338	5.485	2.883	988
Jumlah	272.295	64.902	67.797	132.211	29.336

Lampiran 26
Banyaknya UMK Menurut Wilayah dan Rencana Pengembangan/Perluasan
Usaha/Perusahaan

Kabupaten/Kota	Banyaknya Usaha	Tidak Ada Rencana	Ada Rencana
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Selayar	15.863	8.851	7.012
Bulukumba	44.056	26.004	18.052
Bantaeng	20.326	16.060	4.266
Jeneponto	41.988	23.873	18.115
Takalar	40.900	18.957	21.943
Gowa	78.231	47.212	31.019
Sinjai	30.222	12.700	17.522
Maros	36.753	16.145	20.608
Pangkajene dan Kepulauan	33.154	13.959	19.195
Barru	18.599	9.983	8.616
Bone	89.759	56.844	32.915
Soppeng	30.722	17.238	13.484
Wajo	62.925	36.592	26.333
Sidenreng Rappang	30.967	15.694	15.273
Pinrang	39.365	28.728	10.637
Enrekang	19.131	13.395	5.736
Luwu	36.768	26.756	10.012
Tana Toraja	18.939	11.719	7.220
Luwu Utara	26.753	23.775	2.978
Luwu Timur	23.642	16.032	7.610
Toraja Utara	19.116	14.440	4.676
Makassar	125.432	74.938	50.494
Parepare	16.174	10.394	5.780
Palopo	15.086	12.589	2.497
Sulawesi Selatan	914.871	552.878	361.993

Lampiran 26
Banyaknya UMK Menurut Wilayah dan Rencana Pengembangan/Perluasan Usaha/Perusahaan (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	Rencana Pengembangan/Perluasan Perusahaan				
	Memperluas Tempat Usaha	Membuka Cabang	Meningkatkan Keahlian	Diversifikasi Produk	Lainnya
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kepulauan Selayar	5.023	930	1.434	2.292	927
Bulukumba	15.696	1.518	1.968	3.691	1.000
Bantaeng	3.274	484	583	869	256
Jeneponto	14.055	1.100	3.268	5.561	1.239
Takalar	15.198	4.464	3.412	10.456	1.967
Gowa	25.935	4.655	4.731	6.525	2.078
Sinjai	14.642	3.353	3.829	7.493	697
Maros	14.879	3.426	3.056	10.395	1.444
Pangkajene dan Kepulauan	14.393	3.724	3.465	8.028	1.728
Barru	5.765	1.348	1.912	3.927	263
Bone	23.591	4.570	5.236	10.920	2.199
Soppeng	8.298	1.058	1.741	4.857	2.302
Wajo	20.314	3.574	4.342	9.631	2.058
Sidenreng Rappang	11.468	4.300	5.511	8.540	1.161
Pinrang	8.271	805	1.321	4.274	899
Enrekang	4.669	1.332	1.193	2.613	266
Luwu	7.269	1.182	1.361	3.278	1.859
Tana Toraja	4.634	1.155	1.217	3.313	571
Luwu Utara	2.136	231	499	612	376
Luwu Timur	6.229	1.400	1.078	3.186	472
Toraja Utara	3.069	508	562	1.025	809
Makassar	37.601	18.197	14.714	18.244	4.429
Parepare	4.263	1.300	908	1.575	232
Palopo	1.623	288	456	906	104
Sulawesi Selatan	272.295	64.902	67.797	132.211	29.336

Lampiran 27

Banyaknya UMK Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kendala Perusahaan

Lapangan Usaha <i>Industrial Category</i>	Banyaknya Usaha	Tidak Ada Kendala	Ada Kendala	Jenis Kendala Perusahaan		
				Permodalan/ Likuiditas	Bahan Baku/ Barang Dagangan	Pemasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
B. Pertambangan dan Penggalian	2.334	207	2.127	1.387	652	527
C. Industri Pengolahan	132.277	26.315	105.962	67.614	28.411	26.701
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	1.405	373	1.032	667	88	222
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	1.823	576	1.247	759	336	251
F. Konstruksi	12.362	3.482	8.880	5.260	1.249	1.571
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	517.159	85.445	431.714	308.882	64.338	142.493
H. Pengangkutan dan Pergudangan	62.258	11.197	51.061	24.161	3.756	9.901
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	91.393	23.497	67.896	44.163	6.136	19.028
J. Informasi dan Komunikasi	24.327	6.003	18.324	11.953	1.249	5.040
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	2.619	1.084	1.535	780	80	249
L. Real Estat	3.231	1.929	1.302	698	37	398
M, N. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis & Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	12.363	3.141	9.222	4.998	887	3.194
P. Pendidikan	19.813	9.900	9.913	3.677	1.090	927
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	5.821	3.186	2.635	855	345	563
R, S. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi & Aktivitas Jasa Lainnya	25.686	6.757	18.929	11.652	2.370	4.985
Jumlah	914.871	183.092	731.779	487.506	111.024	216.050

Lampiran 27
Banyaknya UMK Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kendala Perusahaan (Lanjutan)

Lapangan Usaha	Jenis Kendala Perusahaan						
	Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Energi	Infrastruktur	Tenaga Kerja	Peraturan dan Birokrasi Pemerintah	Pungutan Liar	Adanya Pesaing	Lainnya
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
B. Pertambangan dan Penggalian	213	544	141	59	54	836	203
C. Industri Pengolahan	4.050	12.581	9.446	692	458	45.088	5094
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	27	125	88	21	9	464	93
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	22	104	53	18	13	640	71
F. Konstruksi	369	805	1.236	221	37	4.777	422
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	8.786	32.243	9.831	3.952	5.396	247.325	8136
H. Pengangkutan dan Pergudangan	5.760	9.838	672	1.165	1.416	35.683	2892
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1.534	3.148	2.883	951	1.099	38.282	1634
J. Informasi dan Komunikasi	135	871	409	62	113	10.482	479
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	14	91	154	64	5	563	385
L. Real Estat	8	126	16	13	24	756	16
M, N. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis & Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	214	559	1.095	224	125	5.638	404
P. Pendidikan	189	3.544	3.296	620	135	2.417	1647
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	28	491	366	150	51	944	157
R, S. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi & Aktivitas Jasa Lainnya	320	903	1.661	236	222	9.881	679
Jumlah	21.669	65.973	31.347	8.448	9.157	403.776	22.312

Lampiran 28

Banyaknya UMK Menurut Wilayah dan Jenis Kendala Perusahaan

Kabupaten/Kota	Banyaknya Usaha	Tidak Ada Kendala	Ada Kendala	Jenis Kendala Perusahaan		
				Permodalan/ Likuiditas	Bahan Baku/ Barang Dagangan	Pemasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepulauan Selayar	15.863	3.527	12.336	9.151	2.785	3.005
Bulukumba	44.056	7.931	36.125	24.052	3.473	11.909
Bantaeng	20.326	6.430	13.896	9.191	1.281	3.552
Jeneponto	41.988	7.552	34.436	23.022	3.282	5.481
Takalar	40.900	7.632	33.268	23.475	5.347	8.029
Gowa	78.231	14.359	63.872	45.606	5.569	9.698
Sinjai	30.222	4.062	26.160	16.803	6.210	9.708
Maros	36.753	9.399	27.354	18.483	4.680	6.572
Pangkajene dan Kepulauan	33.154	4.034	29.120	21.563	4.072	11.809
Barru	18.599	3.733	14.866	9.732	2.608	4.958
Bone	89.759	14.009	75.750	48.074	11.195	29.503
Soppeng	30.722	8.328	22.394	12.097	3.214	7.675
Wajo	62.925	12.220	50.705	31.309	9.173	17.168
Sidenreng Rappang	30.967	3.288	27.679	21.645	8.348	11.514
Pinrang	39.365	6.666	32.699	22.244	3.995	8.301
Enrekang	19.131	4.989	14.142	8.234	3.178	4.090
Luwu	36.768	5.326	31.442	22.802	6.052	8.272
Tana Toraja	18.939	3.041	15.898	11.567	4.057	6.116
Luwu Utara	26.753	6.462	20.291	14.343	4.462	5.990
Luwu Timur	23.642	4.092	19.550	14.425	2.514	5.519
Toraja Utara	19.116	2.111	17.005	12.057	3.464	6.494
Makassar	125.432	34.967	90.465	53.138	10.004	25.890
Parepare	16.174	4.060	12.114	8.152	1.165	2.461
Palopo	15.086	4.874	10.212	6.341	896	2.336
Sulawesi Selatan	914.871	183.092	731.779	487.506	111.024	216.050

Lampiran 28
Banyaknya UMK Menurut Wilayah dan Jenis Kendala Perusahaan (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	Jenis Kendala Perusahaan						
	Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Energi	Infrastruktur	Tenaga Kerja	Peraturan dan Birokrasi Pemerintah	Pungutan Liar	Adanya Pesaing	Lainnya
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kepulauan Selayar	269	1.572	308	123	36	4.482	518
Bulukumba	406	1.917	966	333	402	22.617	1.017
Bantaeng	334	259	224	56	163	7.637	225
Jeneponto	541	1.322	1.476	402	1.503	21.173	1.140
Takalar	237	997	1.048	154	167	18.756	783
Gowa	2.016	4.646	2.649	463	372	39.901	3.247
Sinjai	990	4.508	967	255	131	16.100	483
Maros	456	1.862	713	267	446	16.059	909
Pangkajene dan Kepulauan	887	933	703	84	174	14.856	477
Barru	233	977	830	135	71	6.169	343
Bone	2.862	7.146	1.958	941	552	40.431	1.635
Soppeng	559	3.100	1.004	84	68	11.432	1.119
Wajo	1.793	8.490	2.638	547	668	27.882	2.007
Sidenreng Rappang	1.005	2.178	2.538	308	243	16.573	325
Pinrang	201	1.543	904	185	191	16.779	1.099
Enrekang	480	2.651	538	114	84	6.231	305
Luwu	1.192	6.835	1.293	737	305	14.249	565
Tana Toraja	1.369	3.129	1.294	170	92	5.882	1.010
Luwu Utara	1.631	3.442	1.025	85	78	8.714	643
Luwu Timur	521	1.602	825	88	129	9.415	544
Toraja Utara	838	2.566	1.091	375	115	8.546	730
Makassar	2.566	3.611	5.385	2.076	2.814	57.144	2.303
Parepare	189	227	578	275	268	6.358	592
Palopo	94	460	392	191	85	6.390	293
Sulawesi Selatan	21.669	65.973	31.347	8.448	9.157	403.776	22.312

Lampiran 29
Banyaknya UMK Menurut Lapangan Usaha dan Perolehan Laba Tahun 2016
Dibandingkan Tahun 2015

Lapangan Usaha	Meningkat	Tetap	Menurun	Tidak dapat dibandingkan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B. Pertambangan dan Penggalian	640	850	723	121	2.334
C. Industri Pengolahan	48.504	51.136	24.213	8.424	132.277
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	557	478	212	158	1.405
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	493	818	326	186	1.823
F. Konstruksi	4.247	4.616	2.782	717	12.362
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	182.152	200.949	96.166	37.892	517.159
H. Pengangkutan dan Pergudangan	13.012	26.601	18.145	4.500	62.258
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	30.120	36.771	16.941	7.561	91.393
J. Informasi dan Komunikasi	9.296	8.767	3.909	2.355	24.327
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	1.275	664	470	210	2.619
L. Real Estat	760	1.867	306	298	3.231
M, N. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis & Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	4.646	3.776	2.827	1.114	12.363
P. Pendidikan	8.724	7.375	2.085	1.629	19.813
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	2.496	1.965	805	555	5.821
R, S. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi & Aktivitas Jasa Lainnya	9.156	9.238	5.056	2.236	25.686
Jumlah	316.078	355.871	174.966	67.956	914.871

Lampiran 30
Banyaknya UMK Menurut Wilayah dan Perolehan Laba Tahun 2016 Dibandingkan Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Meningkat	Tetap	Menurun	Tidak dapat dibandingkan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Selayar	5.523	6.701	2.934	705	15.863
Bulukumba	17.544	16.091	6.881	3.540	44.056
Bantaeng	8.448	9.670	1.465	743	20.326
Jeneponto	17.613	14.970	7.216	2.189	41.988
Takalar	19.736	13.707	5.259	2.198	40.900
Gowa	35.903	28.448	9.169	4.711	78.231
Sinjai	10.673	12.072	5.787	1.690	30.222
Maros	15.133	12.473	7.205	1.942	36.753
Pangkajene dan Kepulauan	13.130	12.279	5.789	1.956	33.154
Barru	6.084	7.536	2.924	2.055	18.599
Bone	24.676	39.453	17.675	7.955	89.759
Soppeng	9.829	11.463	7.023	2.407	30.722
Wajo	16.119	25.711	15.385	5.710	62.925
Sidenreng Rappang	10.872	11.740	5.051	3.304	30.967
Pinrang	17.050	14.344	6.013	1.958	39.365
Enrekang	6.857	7.454	2.875	1.945	19.131
Luwu	10.420	13.110	9.461	3.777	36.768
Tana Toraja	6.188	9.239	3.044	468	18.939
Luwu Utara	5.791	12.041	7.777	1.144	26.753
Luwu Timur	6.403	9.117	6.428	1.694	23.642
Toraja Utara	6.212	8.808	2.972	1.124	19.116
Makassar	37.428	47.205	28.230	12.569	125.432
Parepare	4.705	6.001	4.098	1.370	16.174
Palopo	3.741	6.238	4.305	802	15.086
Sulawesi Selatan	316.078	355.871	174.966	67.956	914.871

Lampiran 31
Banyaknya Usaha/Perusahaan, Pekerja, Balas Jasa dan Upah Pekerja UMK Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	Banyaknya Usaha	Banyaknya Pekerja		
		Banyaknya Pekerja Dibayar	Banyaknya Pekerja Tidak Dibayar	Jumlah Pekerja
-1	-2	-3	-4	-5
B. Pertambangan dan Penggalian	2.334	3.785	3.022	6.807
C. Industri Pengolahan	132.277	158.245	163.706	321.951
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	1.405	1.113	1.690	2.803
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	1.823	1.375	2.416	3.791
F. Konstruksi	12.362	97.793	-	97.793
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	517.159	181.824	753.165	934.989
H. Pengangkutan dan Pergudangan	62.258	17.024	61.423	78.447
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	91.393	64.687	128.999	193.686
J. Informasi dan Komunikasi	24.327	3.893	33.561	37.454
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	2.619	9.303	2.667	11.970
L. Real Estat	3.231	1.180	4.129	5.309
M, N. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis & Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	12.363	25.771	11.294	37.065
P. Pendidikan	19.813	225.004	6.592	231.596
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	5.821	48.171	14.867	63.038
R, S. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi & Aktivitas Jasa Lainnya	25.686	40.332	25.320	65.652
Jumlah	914.871	879.500	1.212.851	2.092.351

Lampiran 31
Banyaknya Usaha/Perusahaan, Pekerja, Balas Jasa dan Upah Pekerja UMK Menurut Lapangan Usaha (Lanjutan)

Lapangan Usaha	Rata- Rata Pekerja per Usaha	Balas Jasa dan Upah	Rata - Rata Balas Jasa dan Upah per Pekerja Dibayar
-1	-6	-7	-8
B. Pertambangan dan Penggalian	3	49.226.685.280	13.005.729
C. Industri Pengolahan	2	1.720.653.793.340	10.873.353
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	2	11.983.514.800	10.766.860
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	2	14.674.054.600	10.672.040
F. Konstruksi	8	1.897.364.753.263	19.401.846
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	2	2.221.771.142.848	12.219.350
H. Pengangkutan dan Pergudangan	1	238.229.766.644	13.993.760
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	2	736.221.382.564	11.381.288
J. Informasi dan Komunikasi	2	32.828.787.000	8.432.773
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	5	147.072.556.280	15.809.154
L. Real Estat	2	29.243.290.000	24.782.449
M, N. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis & Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	3	301.032.885.852	11.681.071
P. Pendidikan	12	6.523.442.911.013	28.992.564
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	11	1.319.592.129.744	27.393.912
R, S. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi & Aktivitas Jasa Lainnya	3	425.433.125.152	10.548.277
Jumlah	2	15.668.770.778.380	17.815.544

Lampiran 32
Banyaknya Usaha/Perusahaan, Omset/Pendapatan, dan Pengeluaran UMK Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	Banyaknya Usaha	Omset / Pendapatan	Pengeluaran	Rasio Pengeluaran Terhadap Pendapatan
-1	-2	-3	-4	-5
B. Pertambangan dan Penggalian	2.334	319.943.508.000	175.927.889.094	0,55
C. Industri Pengolahan	132.277	20.145.491.174.448	13.700.062.346.126	0,68
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	1.405	285.751.897.700	217.376.777.723	0,76
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	1.823	110.373.143.920	69.056.908.907	0,63
F. Konstruksi	12.362	8.719.689.361.382	5.469.542.422.204	0,63
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	517.159	97.834.734.256.831	83.140.659.855.632	0,37
H. Pengangkutan dan Pergudangan	62.258	3.403.474.756.048	1.864.108.104.741	0,55
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	91.393	12.188.416.265.259	7.841.778.725.740	0,64
J. Informasi dan Komunikasi	24.327	1.949.758.040.096	1.570.927.329.687	0,81
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	2.619	862.381.037.843	579.575.841.566	0,67
L. Real Estat	3.231	271.113.886.515	97.613.653.946	0,36
M, N. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis & Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	12.363	1.887.984.968.000	1.050.845.932.864	0,56
P. Pendidikan	19.813	12.054.267.357.802	9.763.299.108.056	0,81
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	5.821	3.026.911.482.942	2.409.560.850.281	0,80
R, S. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi & Aktivitas Jasa Lainnya	25.686	2.189.576.035.560	1.177.318.607.029	0,54
Jumlah	914.871	165.249.867.172.346	129.127.654.353.596	0,60

Lampiran 33
Banyaknya Usaha/Perusahaan, Omset/Pendapatan, dan Pengeluaran UMK Menurut Wilayah

Kabupaten/Kota	Banyaknya Usaha	Omset / Pendapatan	Pengeluaran	Rasio Pengeluaran Terhadap Pendapatan
-1	-2	-3	-4	-5
Kepulauan Selayar	15.863	1.757.888.772.704	1.398.973.864.843	0,62
Bulukumba	44.056	6.075.205.387.805	5.083.568.406.734	0,68
Bantaeng	20.326	3.006.297.115.352	2.487.121.926.986	0,67
Jeneponto	41.988	8.419.872.600.658	6.860.388.779.162	0,59
Takalar	40.900	6.999.635.931.168	5.582.017.284.534	0,62
Gowa	78.231	14.173.437.151.983	10.897.976.366.443	0,56
Sinjai	30.222	4.772.298.493.101	3.864.249.601.736	0,61
Maros	36.753	6.979.174.237.639	5.750.863.181.690	0,63
Pangkajene dan Kepulauan	33.154	5.595.778.674.418	4.416.207.033.068	0,57
Barru	18.599	2.900.743.365.024	2.303.825.135.470	0,66
Bone	89.759	13.160.165.171.772	10.734.884.400.610	0,56
Soppeng	30.722	3.507.410.443.165	2.848.649.579.213	0,61
Wajo	62.925	7.922.015.703.388	6.369.880.166.362	0,62
Sidenreng Rappang	30.967	6.459.106.906.682	4.908.827.819.916	0,59
Pinrang	39.365	8.532.098.999.400	7.072.907.414.004	0,73
Enrekang	19.131	2.949.173.301.241	2.319.097.613.383	0,60
Luwu	36.768	5.238.466.193.269	4.352.914.355.363	0,68
Tana Toraja	18.939	2.577.922.533.405	2.144.604.001.537	0,71
Luwu Utara	26.753	5.919.718.338.380	4.981.329.117.681	0,72
Luwu Timur	23.642	6.292.119.170.904	4.560.825.354.797	0,54
Toraja Utara	19.116	3.431.848.189.758	2.738.915.558.395	0,66
Makassar	125.432	30.913.500.242.430	22.507.066.739.151	0,56
Parepare	16.174	3.318.625.368.122	2.652.151.749.566	0,66
Palopo	15.086	4.347.364.880.578	2.290.408.902.952	0,34
Sulawesi Selatan	914.871	165.249.867.172.346	129.127.654.353.596	0,60

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jl. H. Bau No. 6, Makassar, 90125

Telp.: (0411) 854838, Fax: (0411) 85125

Homepage: <http://sulsel.bps.go.id> E-mail: bps7300@bps.go.id

ISBN 978-602-6426-64-4



9 786026 426864